



2019

Evaluasi Implementasi dan Restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan

EVALUASI IMPLEMENTASI DAN RESTRUKTURISASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019

Evaluasi Implementasi dan Restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan

Tim Peneliti :

Dr. Sabar Budi Raharjo, M.Pd.
Meni Handayani, SS, M.Si.
Dr. Parwanto, SE, MM
Iwan Mustari, S. Pd

ISBN 978-602-0792-44-6

Penyunting :

Nur Berlian Venus Ali, MSE
Dr. Edi Rakhmat Widodo
Dra. Ida Kintamani Dewi, M.Sc

Tata Letak:

Joko Purnama
Genardi Atmadiredja

Penerbit :

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Juli 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA SAMBUTAN

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan pendidikan yang memberikan kesempatan semua warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Salah satunya dengan mengeluarkan perubahan kebijakan terkait penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan standar layanan pendidikan kepada peserta didik. Dengan pedoman tersebut, diharapkan layanan yang diberikan pemerintah kepada warga negara menjadi terstandar dan tidak ada perbedaan dalam layanan pendidikan kepada warga negara. Oleh karena itu, setiap penyelenggara pendidikan harus berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan terutama terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana Prasarana, dan Standar Pembiayaan.

Walaupun dalam penyelenggaraan pendidikan Standar Nasional Pendidikan sudah dilaksanakan namun demikian mutu pendidikan masih belum mencapai prestasi seperti yang diharapkan. Hasil akreditasi menunjukkan bahwa belum semua sekolah mendapatkan akreditasi A. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan masih menemui kendala dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan capaian mutu pendidikan tersebut diharapkan kajian Implementasi dan Restrukturisasi

Standar Nasional Pendidikan dapat memberikan masukan rekomendasi dalam implementasi Standar Nasional Pendidikan serta dapat memberikan solusi untuk memberikan masukan restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan.

Dengan selesainya kajian Implementasi dan Restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan ini kami ucapkan terima kasih kepada para peneliti yang sudah menyelesaikan penelitian dan penyusunan laporan penelitian. Demikian juga kepada semua *stakeholder* yang menerima laporan kajian ini, apabila ada saran masukan kami harapkan dapat disampaikan kepada kami untuk penyempurnaan laporan dan kajian berikutnya.

Jakarta, Juli 2019

Kepala Pusat,



Muktiono Waspodo

KATA PENGANTAR

Dalam menjamin terwujudnya mutu pendidikan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 dan perubahan kedua dalam PP Nomor 13 Tahun 2015. Perubahan tersebut sebagai upaya pemerintah dalam menyesuaikan perkembangan pembangunan pendidikan menuju pendidikan yang bermutu. Seiring dengan hal tersebut Standar Nasional Pendidikan merupakan pedoman atau panduan setiap penyelenggaraan pendidikan. Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada tingkat satuan pendidikan banyak mengalami kendala baik yang dihadapi oleh guru maupun kepala sekolah sehingga berdampak pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Kajian evaluasi implementasi dan restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk mengetahui kesulitan, kendala dan solusi yang dihadapi oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Sebagian satuan pendidikan banyak yang mengalami kendala dalam pemenuhan delapan standar tersebut sehingga mutu pendidikan secara nasional belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu perlu adanya formulasi dan restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan dalam mencapai mutu pendidikan yang diharapkan.

Kajian evaluasi implementasi dan restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan pada prinsipnya dilakukan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dalam memperkuat ketercapaiannya standar pada satuan pendidikan. Melalui

standar yang dapat dicapai oleh setiap satuan pendidikan maka akan memudahkan bagi pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu secara nasional.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian kajian ini, kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada saran perbaikan dapat disampaikan kepada kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	III
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL.....	IX
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR GRAFIK.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan	6
C. Sasaran	6
D. Keluaran	7
E. Ruang Lingkup	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....	9
A. Mutu Sekolah.....	9
B. Standar Nasional Pendidikan	17
C. Penelitian Terkait dengan Implementasi SNP	27
D. Kerangka Pikir Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan.....	31
B. Teknik Pengumpulan Data	31
C. Teknik Pengolahan dan Analisis data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Capaian Akreditasi Standar Nasional Pendidikan..	35
B. Implementasi setiap Standar Nasional Pendidikan	45
C. Formulasi Restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan	155

BAB V	SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI	
	KEBIJAKAN.....	229
A.	Simpulan	229
B.	Saran	231
C.	Rekomendasi Kebijakan.....	232
DAFTAR PUSTAKA		245

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sampel Penelitian.....	32
Tabel 2. Skill yang dibutuhkan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian	30
Gambar 2. Keterkaitan pemenuhan antar standar.....	186
Gambar 3. Tahapan pola pikir penyusunan SNP.....	190
Gambar 4. Tahapan pelaksanaan SNP,	191
Gambar 5. Tantangan dalam pengetahuan, sikap, kepribadian, paradigm	196
Gambar 6. Hubungan KBM-hasil belajar-SNP	202
Gambar 8. Kerangka Konsep Penyusunan Desain SNP	239
Gambar 9. Sistem implementasi SNP	241

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pemenuhan SNP Sekolah/Madrasah Akreditasi Ulang.....	4
Grafik 2. Capaian Akreditasi Jenjang SD Tahun 2017.....	35
Grafik 3. Capaian Akreditasi Jenjang SMP Tahun 2017.....	36
Grafik 4. Capaian Akreditasi Jenjang SMA Tahun 2017	37
Grafik 5. Standar Kompetensi Lulusan	38
Grafik 6. Standar Isi	39
Grafik 7. Standar Proses	39
Grafik 8. Standar Penilaian	40
Grafik 9. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	40
Grafik 10. Standar Sarana dan Prasarana.....	41
Grafik 11. Standar Pengelolaan.....	42
Grafik 12. Standar Pembiayaan.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

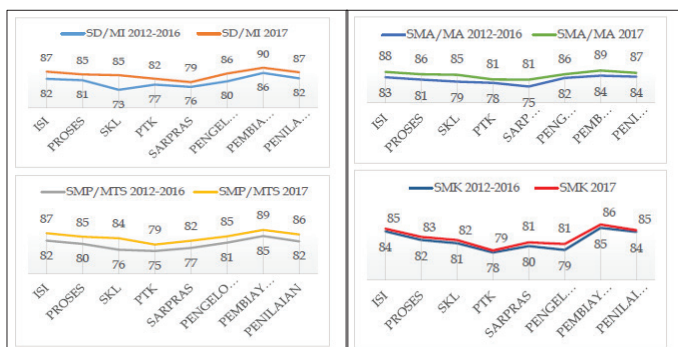
Kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara telah dijamin dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal tersebut menunjukkan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Tentang pemahaman pendidikan yang bermutu banyak pakar pendidikan memiliki pendapat yang berbeda namun pada dasarnya bertujuan sama dalam memandang pemberian layanan pendidikan bermutu kepada peserta didik. Pada era globalisasi yang memiliki dampak kemajuan pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat maka dunia pendidikan dipaksa untuk mampu menyesuaikan kemajuan agar tidak tertinggal dengan bidang lain. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada acara Rembuknas Pendidikan tahun 2018 dimana beliau mengatakan saat ini dunia berubah tak lagi secara linier, oleh sebab itu cara bekerja pun harus berubah dimana “Semua pelaku pendidikan harus mengubah paradigma, agar pendidikan Indonesia berkualitas, demi generasi depan yang lebih baik” (Republika.co.id, 2018). Hal tersebut menunjukkan indikator bahwa permasalahan pendidikan kita belum mencapai mutu seperti yang diharapkan.

Data terkait hal tersebut di atas dapat dilihat dari hasil akreditasi tahun 2012-2017 untuk seluruh jenjang (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan SLB) berdasarkan peringkat yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Persentase sekolah/madrasah dengan peringkat A sebanyak 30,8%; b. Persentase sekolah/madrasah dengan peringkat B sebanyak 53,5%; c. Persentase sekolah/madrasah dengan peringkat C sebanyak 14,3%, (Mu'ti, 2017). Artinya, bahwa mutu pendidikan berdasarkan akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menunjukkan tingkat yang masih rendah karena capaian akreditasi dengan kategori akreditasi A masih memberikan indikasi kriteria minimal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 86 ayat (3) bahwa akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil akreditasi merupakan refleksi mutu pendidikan secara umum, sebagai hasil pengukuran ke delapan SNP pada setiap jenjang pendidikan. Meskipun demikian, masih banyak permasalahan di dunia pendidikan yang menyebabkan capaian tersebut belum sepenuhnya dapat mewujudkan misi ideal yang diinginkan oleh konstitusi dan secara tidak langsung dapat kita akui bahwa capaian mutu pendidikan berdampak pada masalah daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat regional dan global masih belum cukup memuaskan.

“Peringkat daya saing menurut Ketua Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Rully Chairul Azwar sesuai hasil riset *World Economic Forum* yang dimiliki belum lama ini memperlihatkan posisi Indonesia yang menurun pada tahun 2015-2016, Indonesia berada di peringkat 37 dari 138 negara dan tahun 2016-2017 turun ke 41,” katanya dalam *Forum Round Table Discussion* Lembaga Pengkajian MPR RI 2017, di Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. (Republika.co.id). Posisi tersebut di bawah negara serumpun seperti Singapura yang menduduki di peringkat dua, Malaysia peringkat 18 dan Thailand peringkat 32. Disamping itu, data Unicef tahun 2016 menunjukkan sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan, hal ini dikarenakan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi meskipun terdapat juga faktor kultur yang membuat anak Indonesia dan orang tua mereka tidak tertarik pada pendidikan di sekolah.

Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan Wakil Presiden Yusuf Kalla dalam Rembuknas Kemendikbud tahun 2018 yang menyatakan kondisi Indonesia yang heterogen, sangat memerlukan standar sebagai tolok ukur dan acuan mutu pendidikan nasional. Tanpa adanya SNP, kita tidak bisa mengetahui apa yang harus dicapai, sebab persaingan global yang terjadi sekarang berkaitan dengan bagaimana melihat standar-standar di negara lain. “Negara yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi pasti memiliki standar, oleh karena itu jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan, kita memerlukan standar”. Terkait dengan SNP di Indonesia yang telah ditetapkan melalui PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP dan

mendapat revisi dalam penyempurnaan melalui PP Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP. Seiring dengan perkembangan pendidikan, dimana SNP sudah berjalan kurang lebih 13 tahun namun mutu pendidikan Indonesia posisinya masih relatif rendah di bandingkan dengan negara-negara serumpun. Hal ini diduga bukan karena SNP yang kurang berkualitas namun pemenuhan dan implementasi SNP belum berjalan maksimal. Hasil akreditasi dari BAN-S/M menunjukkan bahwa perkembangan mutu sekolah belum mencapai perkembangan yang menggembirakan. Hal ini bisa di lihat dari hasil akreditasi ulang seperti pada di grafik di bawah.



Grafik 1. Pemenuhan SNP Sekolah/Madrasah Akreditasi Ulang

Grafik tersebut menunjukkan bahwa hasil akreditasi ulang secara rata-rata kenaikan angkanya masih sangat kecil, artinya bahwa selama 5 tahun masa akreditasi sekolah belum melakukan perbaikan terhadap delapan SNP secara signifikan. Dari delapan SNP tersebut, secara rata-rata capaian standar yang paling rendah adalah standar pendidik dan tenaga

kependidikan dan standar sarana dan prasarana. Permasalahan yang dihadapi sekolah dalam hal ini adalah kemampuan dalam pemenuhan SNP oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang belum dapat mendorong dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan sesuai SNP secara signifikan, hal ini akan berdampak pada mutu lulusan peserta didik. Terkait dengan hal tersebut, seperti di kutip oleh (Republika.co.id, 2018), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam acara Rembuknas Pendidikan tahun 2018 menyampaikan bahwa “pemerintah daerah berperan dalam membuat kebijakan dan program berkaitan dengan upaya mengatasi kesulitan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan secara memadai dari segi kemudahan jangkauan ke sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan penyediaan sarana prasarana pendidikan”. Hal ini memerlukan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara bersama-sama untuk mengatasi permasalahan mutu pendidikan, terutama yang terkait dengan persoalan daerahnya masing-masing. Meskipun sekarang akses sudah tidak lagi menjadi persoalan namun pemerintah tetap memperhatikan sekaligus berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan kepada segenap warga negara. Oleh karena itu, permasalahan dalam kajian ini yaitu bagaimana satuan pendidikan memberikan layanan kepada peserta didik, apakah sudah memenuhi standar pendidikan seperti dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP. Demikian juga apakah kedelapan standar tersebut sudah cukup dalam mengukur mutu pendidikan kita, faktanya ketercapaian SNP diduga banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain; 1) substansi SNP belum sepenuhnya dipahami oleh kepala sekolah dan guru, 2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih belum dapat

memenuhi ketercapaian delapan SNP, 3) banyaknya peraturan yang terkait dengan pengaturan delapan SNP, dan 4) perubahan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang cepat sehingga SNP harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam mengembangkan kajian evaluasi implementasi dan restrukturisasi SNP. Kajian ini perlu dilakukan karena layanan pendidikan yang bermutu harus memiliki acuan yang baku. Ketercapaian SNP di sekolah-sekolah diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dapat berdaya saing dengan negara lain.

B. Tujuan

Tujuan kajian evaluasi implementasi dan restrukturisasi SNP yaitu untuk mendapatkan data dan informasi tentang;

1. Capaian akreditasi SNP.
2. Implementasi setiap SNP dilihat dari kendala dan solusi.
3. Formulasi Restrukturisasi SNP.

C. Sasaran

Kajian evaluasi implementasi dan restrukturisasi SNP yang menjadi sasaran yaitu delapan SNP pada jenjang SMA, secara rinci sasaran kajian adalah sebagai berikut:

1. Capaian akreditasi SNP.
2. Implementasi setiap SNP dilihat dari kendala dan solusinya,
3. Formulasi restrukturisasi SNP.

D. Keluaran

Keluaran dari evaluasi implmentasi dan restrukturisasi SNP yaitu laporan hasil kajian yang meliputi: 1. analisis capaian akreditasi SNP terhadap ketepatan dalam mengukur mutu sekolah, dan 2) rekomendasi hasil penelitian terkait dengan implementasi dan restrukturisasi SNP dalam mencapai mutu sekolah.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup/batasan kajian evaluasi implementasi dan restrukturisasi SNP yaitu delapan SNP jenjang SMA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Mutu Sekolah

Usaha mewujudkan pembangunan pendidikan tidak bisa lepas dari persoalan mutu sekolah. Hal tersebut karena sekolah merupakan wadah terjadinya proses belajar mengajar dimana terdapat interaksi antara guru dengan murid dan lingkungan sekolah. Semua yang ada di lingkungan sekolah memiliki peran dalam memberikan kontribusi terciptanya mutu sekolah. Sekolah yang bermutu akan memberikan sumbangan kualitas SDM yang dapat bersaing dengan negara lain.

Mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang berarti bahwa setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Secara luas, mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Karakteristik mutu dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Pelanggan bisa berupa mereka yang langsung menjadi penerima produk dan jasa tersebut atau mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk dan jasa tersebut (Karsidi, 2005).

Istilah mutu atau kualitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *quality*. Dalam kamus Oxford kata *quality* yaitu *the standart of something when it is compared to other things like it* (Oxford University Press, 2010:1198), yang artinya kualitas adalah suatu standar atau ukuran dari sesuatu ketika dibandingkan

dengan hal lain yang sama, sementara Nasution mengemukakan secara istilah mutu adalah kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, sehingga mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan (Denim, 2008: 15).

Demikian juga pengertian mutu terkait dengan layanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan atau yang menerima layanan. Pengertian mutu memiliki pengertian yang bervariasi, beberapa ahli telah mendefinisikan mutu seperti berikut:

1. Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*), (Mulyadi, 2010:77).
2. Ishikawa mengatakan bahwa “*quality is customer satisfaction*”, dengan demikian pengertian mutu adalah keadaan yang sesuai dan melebihi harapan pelanggan hingga memperoleh kepuasan (Engkoswara dan Aan Komariah, 2010: 304-305).
3. Nanang (2012:2), mutu adalah kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa (*service*) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan (*satisfaction*) pada pelanggan (*customers*).

Pemahaman mutu sangat luas dan bervariasi namun pada intinya mutu memberikan kepuasan pelanggan dalam menerima layanan sehingga dapat memberikan keluaran yang memiliki kualitas sesuai dengan kontennya.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, keluaran, dan dampaknya. Menurut Denim (2008:53), mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1. Kondisi baik atau tidaknya masukan SDM seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa.
2. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain.
3. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja.
4. Mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.
5. Hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Mutu bidang pendidikan meliputi mutu *input*, proses, *output*, dan *outcome*. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses, proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAIKEM (Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Menyenangkan, dan Bermakna), *output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik siswa tinggi dan *outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas (Usman, 2009:513). Adapun mutu pendidikan menurut Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan SNP.

Menurut Groonroos dalam Engkoswara, (2010: 306), terdapat tiga kriteria pokok dalam menilai kualitas jasa, yaitu *outcome related*, *process related*, dan *image related criteria*. Dalam

Penjabaran ketiga kriteria tersebut memiliki enam unsur karakteristik jasa yang bermutu yaitu:

1. *Professionalism and skills*, menjadi kriteria utama suatu jasa bermutu. Para pelanggan percaya bahwa SDM penyedia jasa memiliki syarat profesionalisme dan keahlian yang mumpuni sekaligus dapat menghasilkan produk yang bermutu.
2. *Attitude and behavior*, sikap dan perilaku yang ditunjukkan personil penyedia jasa dalam melayani atau melaksanakan proses sangat empatik dan siap membantu pelanggan.
3. *Accesbility and flexibility*, proses dirancang secara fleksibel untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan akses.
4. *Reliability and trusthworthness*, reputasi baik dan selalu menjaga kepercayaan pelanggan, membuat para pelanggan percaya dan yakin dengan apa yang diberikan penyedia jasa adalah suatu pelayanan bermutu.
5. *Recovery*, saat terjadi kesalahan atau kekeliruan, pelanggan tidak terlalu cemas dan khawatir karena mereka percaya penyedia jasa dapat membantu memecahkan masalahnya.
6. *Reputation and credibility, image* yang dibuat penyedia jasa adalah menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan.

Usman dalam Hanik (2011: 79-82), menyebutkan bahwa mutu memiliki 13 karakteristik yaitu:

1. Kinerja (*Performance*), berkaitan dengan aspek fungsional sekolah, misalnya kinerja guru dalam mengajar baik, memberikan penjelasan yang meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran yang lengkap. Pelayanan administratif dan edukatif yang baik ditandai

- oleh hasil belajar yang tinggi, lulusan banyak, putus sekolah sedikit, dan lulus tepat waktu banyak,
2. Waktu wajar (*timeliness*), selesai dengan waktu yang wajar, misalnya guru memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, batas waktu pemberian pekerjaan rumah wajar, dan waktu untuk naik pangkat wajar,
 3. Handal (*reliability*), misalnya pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari tahun ke tahun dan guru bekerja dari tahun ke tahun,
 4. Daya tahan (*durability*), misalnya meskipun krisis moneter sekolah masih tetap bertahan, siswa dan guru tidak mengalami rasa putus asa dan selalu sehat,
 5. Indah (*aesthetics*), misalnya interior dan eksterior sekolah ditata dengan baik, taman yang ditanami bunga yang menarik dan terpelihara dengan baik, guru membuat media pendidikan yang menarik, dan warga sekolah berperilaku rapi,
 6. Hubungan manusia (*personal interface*), menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme,
 7. Mudah penggunaan (*easy of use*), sarana prasarana dipakai. Misalnya aturan-aturan mudah diterapkan, buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu serta penjelasan guru dikelas mudah dimengerti siswa,
 8. Bentuk khusus (*feature*), keunggulan tertentu. Misalnya ada sekolah yang unggul dengan kegiatan ekstrakurikuler,
 9. Standar tertentu (*conformance to specification*), memenuhi standar tertentu. Misalnya sekolah sudah terakreditasi dan mencapai nilai akreditasi A (amat baik) dan sekolah sudah memenuhi standar minimal ujian nasional,

10. Konsistensi (*consistency*): keajegan, konstan, stabil. Misalnya mutu sekolah dari dulu sampai sekarang,
11. Seragam (*uniform*), tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya sekolah menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas dan sekolah melaksanakan aturan tidak pandang bulu atau pilih kasih,
12. Mampu melayani (*service ability*), mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya, serta sekolah mampu memberikan pelayanan primanya sehingga semua pelanggan merasa puas,
13. Ketepatan (*accuracy*): ketepatan dalam pelayanan. Misalnya sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah.

Denim (2008: 53), mendefinisikan mutu menurut konteks, persepsi, *customer*, dan kebutuhan serta kemauan *customer*. Menurutnya, mutu memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kepemimpinan puncak tidak hanya berkewajiban untuk menentukan kebutuhan *customer* sekarang saja tetapi juga harus mengantisipasi kebutuhan *customer* yang akan datang,
2. Mutu ditentukan oleh *customer*,
3. Perlu dikembangkan ukuran-ukuran untuk memiliki efektivitas upaya guna memenuhi kebutuhan *customer* melalui karakteristik mutu,
4. Kebutuhan dan kemauan *customer* harus di perhitungkan dalam desain produk atau jasa,
5. Kepuasan *customer* merupakan syarat yang perlu bagi mutu dan selalu jadi tujuan proses untuk menghasilkan produk atau jasa,

6. Mutu juga harus dapat menentukan harga produk atau jasa.

Memperhatikan karakteristik mutu dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya penentuan mutu harus berdasarkan standar tertentu sebagai acuan yang akan dicapai. Standar yang ditentukan memberikan jaminan bagi pelanggan sehingga mendapat layanan yang berkualitas. Demikian juga bila dikaitkan dengan mutu sekolah maka standar yang telah ditentukan adalah sebagai jaminan bagi peserta didik untuk menerima layanan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, menurut Sallis (2006: 73), sekolah dikategorikan bermutu apabila memiliki indikator sebagai berikut:

1. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal,
2. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal,
3. Sekolah memiliki investasi pada SDMnya,
4. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif,
5. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk perbaikan pada layanan berikutnya,
6. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas,
7. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya,

8. Sekolah mendorong orang yang dipandang memiliki kreatifitas, mampu menciptakan kualitas, dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas,
9. Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horisontal,
10. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas,
11. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut,
12. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai suatu keharusan.

Sekolah yang bermutu intinya selalu melakukan inovasi dan evaluasi terhadap kualitas yang dicapai sebagai jalan dalam memperbaiki layanan yang diberikan kepada pelanggan (peserta didik atau orang tua murid). Proses perbaikan terus menerus yang dilakukan oleh sekolah memberikan jaminan kepada pelanggan untuk menerima layanan pendidikan yang bermutu.

Kelayakan mutu pada satuan pendidikan mengacu pada SNP. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan, lingkup SNP meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan (SKL); (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK); (5) standar sarana dan prasarana (sarpras); (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Sekolah yang telah memenuhi delapan SNP mencerminkan

bahwa sekolah tersebut telah memiliki mutu sesuai dengan standar yang ada. Capaian standar tersebut di buktikan dengan hasil akreditasi dari BAN- S/M, oleh karena itu setiap sekolah yang ada harus memiliki acuan yang sama yaitu SNP. Sekolah dikatakan bermutu apabila sekolah telah memenuhi delapan SNP dengan minimal nilai akreditasi A, selain itu bukti lain tentang sekolah yang bermutu adalah apabila kegiatan proses belajar mengajar sudah menggunakan standar yang ditentukan. Dengan demikian sekolah yang bermutu yaitu sekolah yang telah melakukan proses belajar mengajar dengan acuan SNP, artinya standar kompetensi lulusan yang dihasilkan telah di dukung oleh standar isi, PTK, pengelolaan, pembiayaan, penilaian dan sarpras yang memadai.

B. Standar Nasional Pendidikan

Dalam mencapai tujuan pendidikan maka penerapan standar sangat dibutuhkan supaya mutu pendidikan dapat dikontrol. Dengan adanya standar diharapkan dapat memberikan jaminan bagi warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, standarisasi layanan pendidikan memberikan kepastian dalam layanan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Tilaar (2006:47), standarisasi merupakan “suatu pengejawantahan dari paham *all can be measured* (segala sesuatu dapat diukur), karena apabila sesuatu dapat diukur maka akan dapat dicapai efisiensi dan juga diketahui kualitasnya, baik berupa benda ataupun suatu jasa, selanjutnya Wiley dalam bukunya *The Leader's Guide to Standar* (Nukleus Smart.Konsep Dasar Penerapan Standar Sistem Pendidikan (file:///http/konsep-

dasar-penerapan-standar-sistem.html yang diunduh 16 November 2010) menyatakan bahwa:

1. Standar adalah aturan main, dengan demikian standar itu bukan sesuatu yang baru melainkan telah melekat dalam kehidupan,
2. Standar itu sedang-sedang saja (*mediocrity*), menerapkan standar berarti bukan menetapkan kriteria yang paling unggul,
3. Standar itu konsistensi, jika anda gunakan standar berarti anda menetapkan harapan,
4. Standar itu nilai tambah, jika anda menerapkan standar maka harus fokus pada prioritas,
5. Standar itu kejujuran kepada publik, menerapkan standar berarti melaksanakan tugas dengan mendeskripsikan harapan dengan tepat dan memenuhi harapan sebagai penunaian kewajiban,
6. Standar itu efektivitas, memenuhi standar artinya memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan dalam tujuan.

Penerapan standar berarti menerapkan manajemen *scientific* yang memerlukan langkah investigasi berbagai fenomena melalui kegiatan observasi dan analisis empiris terhadap berbagai peristiwa yang terukur. Selain itu, penerapan ini memerlukan pemahaman tentang tujuan yang hendak dicapai, kemudian dalam proses ini diperlukan juga tahap mengenali batas-batas pekerjaan dengan jelas. Menerapkan standar memerlukan pemahaman teori yang mendasari pekerjaan dan keterampilan, mengaplikasikan teori dalam pekerjaan sehari-hari. Penerapan standar itu juga memerlukan penguasaan penjabaran definisi konsep ke dalam definisi operasional (<http://www.wikipedia.org/wiki/oprasional>).

Untuk mewujudkan standar tersebut, maka dibentuk badan mandiri melalui Permendikbud Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan. BNSP merupakan badan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengawasi SNP. Capaian SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan SNP dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. SNP disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

SNP telah mengalami perubahan, dari PP Nomor 19 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 32 Tahun 2013. Namun demikian, SNP yang diajukan baik dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 maupun PP Nomor 32 Tahun 2013 memiliki jumlah yang tetap yaitu delapan standar. Hanya saja pada PP Nomor 32 Tahun 2013 terdapat perubahan konten yang elementer pada empat standar yaitu: standar isi, standar proses, SKL dan standar penilaian. SNP menurut PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan SNP dirumuskan bahwa SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup SNP meliputi standar isi, standar proses, SKL, standar PTK, standar sarpras, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar

penilaian pendidikan. Secara rinci dapat dijelaskan seperti di bawah;

1. Standar Kompetensi Lulusan

SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Pasal 1 menyebutkan, SKL pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar PTK, standar sarpras, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. SKL sebagaimana dimaksud meliputi: a) Kompetensi Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; b) Kompetensi Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan c) Kompetensi Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/ Paket C.

Berdasarkan SKL tersebut, maka dalam pelaksanaan proses belajar mengajar hendaknya mengacu pada Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) Dan Kompetensi Dasar (KD) Pelajaran pada Kurikulum 2013 seperti pada Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa KI pada Kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas, lebih lanjut pada ayat 2 dinyatakan bahwa “KD merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan

pendidikan yang mengacu pada KI". KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) KI sikap spiritual; b) KI sikap sosial; c) KI pengetahuan; dan d) KI keterampilan. Berdasarkan capaian KD dan KI tersebut seorang lulusan dapat memperoleh SKL pada jenjang pendidikan.

2. Standar Isi

Menurut PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, yang dimaksudkan dengan standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, kemudian sesuai dengan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi Pendidikan Dasar Dan Menengah pada Pasal 1, ayat (1) standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan KI sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu, (2) KI meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, (3) Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat KD dan KI untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, (4) Standar isi untuk muatan peminatan kejuruan pada SMK/MAK setiap program keahlian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.

Dengan demikian standar isi memberikan arah kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti ketuntasan proses belajar yang diselenggarakan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

3. Standar Proses

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah pada Pasal 1 ayat (1), menyebutkan standar proses pendidikan dasar dan menengah selanjutnya disebut standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Terkait dengan standar proses maka dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada satuan pendidikan perlu diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Dengan demikian bahwa standar proses memberikan layanan proses belajar dalam mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus

dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- a. Kompetensi pedagogik;
- b. Kompetensi kepribadian;
- c. Kompetensi profesional; dan
- d. Kompetensi sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

5. Standar Penilaian

Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang SNP pada Pasal 1, yang dimaksud dengan: 1) SNP adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, 2) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya pada Pasal 2, Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c) penilaian hasil belajar oleh pemerintah, sedangkan

penilaian hasil belajar seperti pada Pasal 3 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek: a) sikap; b) pengetahuan; dan c) keterampilan.

Dengan demikian standar penilaian memberikan penilaian terhadap kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti ketuntasan proses belajar yang diselenggarakan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

6. Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarpras, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Gaji PTK serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
- b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
- c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Peraturan terkait dengan Standar Biaya Pendidikan tertuang dalam Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009 yang mengatur tentang biaya operasional non operasional.

7. Standar Sarana dan Prasana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

8. Standar Pengelolaan

Indikator standar pengelolaan menurut Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan, meliputi:

a. Perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pemangku kepentingan, ciri-cirinya adalah rencana kerja sekolah (RKS) dan rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) disusun berdasarkan pemetaan kondisi satuan pendidikan serta visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, ruang lingkup RKS dan RKAS minimal sesuai standar, dan perencanaan dilakukan bersama pemangku kepentingan serta disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan satuan pendidikan.

b. Pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pemangku kepentingan, ciri-cirinya adalah kelengkapan pedoman pengelolaan satuan pendidikan, penerimaan peserta didik berjalan dengan objektif, transparan, dan akuntabel, tersedianya layanan konseling, ekstrakurikuler, pembinaan prestasi dan penelusuran alumni, adanya pengembangan program peningkatan kapasitas SDM, adanya upaya menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan, pelibatan masyarakat dalam mengelola pendidikan, dan PTK berkinerja baik.

c. Satuan pendidikan melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara berkala, ciri-cirinya adalah memiliki program pengawasan dan disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. Pemantauan pengelolaan satuan pendidikan dilakukan oleh komite sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan, supervisi pengelolaan akademik dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan, satuan pendidikan melaporkan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan satuan pendidikan melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan.

d. Kepala satuan pendidikan berkinerja baik, ciri-cirinya adalah memiliki sistem informasi mutu dan sistem informasi mutu dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

C. Penelitian Terkait dengan Implementasi SNP

Terkait dengan studi Implementasi pada delapan SNP, pada tahun 2017 Puslitjakdikbud telah melakukan studi pada empat Kabupaten/Kota yaitu Kota Bandung, Kota Surabaya, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Buleleng. Penelitian ini melibatkan beberapa kepala/wakil kepala SMP yang menjadi sasaran sampel. Hasilnya diperoleh;

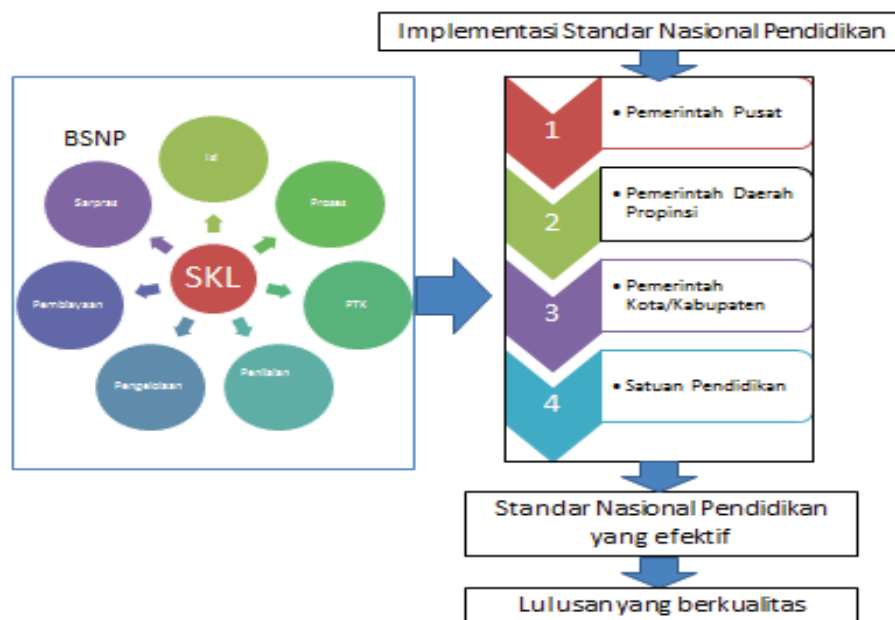
1. Standar isi, a) sebagian besar sekolah (91,7%) sudah memiliki dokumen kurikulum dan melaksanakan K-13, hanya 1 sekolah (8,3%) menggunakan KTSP 2006; b) semua guru menggunakan silabus dan RPP sesuai ketentuan, c) buku yang disediakan pemerintah sesuai dengan kurikulum; dan d) sebagian besar sekolah menilai kontribusi kurikulum terhadap UN cukup baik. Namun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum adalah motivasi siswa, kemampuan guru kurang, inovasi dan kreativitas guru rendah, disiplin guru, kurikulum sering berubah/kurikulum KTSP 2006, anggaran terbatas, dan sarana prasarana kurang.
2. Standar proses, di sebagian besar sekolah (72,2%) penggunaan ruangan dan peraga sudah memadai, sebagian besar sekolah (66,7%) menggunakan buku yang telah sesuai dengan yang disediakan pemerintah, sebagian besar sekolah (77,8%) sudah melaksanakan PR dan *remedial*, dan sebagian sekolah (63,9%) menjalankan PBL, namun demikian pelaksanaan standar proses pada sebagian sekolah berjalan dengan lancar.
3. Standar Lulusan/SKL, dilaksanakan di semua sekolah melalui ekstrakurikuler, pengayaan, dan program bimbingan belajar melalui pendidik dan siswa.

4. Standar PTK, standar ini belum tercapai maksimal karena ada persoalan guru seperti guru menjelang pensiun sehingga mengalami kesulitan mengikuti perkembangan kurikulum, kualitas guru rendah sehingga guru masih memerlukan peningkatan kemampuan pengelolaan kelas, pembimbingan siswa kreatif dan berkarakter.
5. Standar Sarpras, sebagian besar sekolah memiliki prasarana yang belum lengkap, antara lain karena alasan kekurangan ruang kelas, laboratorium IPA, IPS, komputer, perpustakaan, olahraga, komputer, maupun ruang UKS.
6. Standar Pengelolaan, sebagian besar sekolah sudah melaksanakan standar ini namun dinilai belum maksimal karena masih ada kendala dalam penerapannya seperti kekurangan guru PNS.
7. Standar Pembiayaan, sebagian besar sekolah telah melaksanakan pembiayaan menggunakan standar dengan proporsi besar dari dana BOS dan sebagian lain dari BOS/Bopda yang sering mengalami kelambatan pencairannya, dan
8. Standar Penilaian, sebagian sekolah menyatakan guru belum menguasai penilaian sesuai standar.

D. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian pustaka maka kerangka pikir penelitian ini terkait dengan mutu sekolah. Mutu sekolah merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan dalam memberikan layanan pendidikan kepada setiap warga negara. Mutu sekolah akan tercapai apabila dibangun dari beberapa segi atau dimensi pendidikan. Sekolah merupakan wadah berlangsungnya kegiatan belajar mengajar untuk menghasilkan

lulusan yang memiliki kompetensi yang diharapkan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belajar harus terjadi interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kepala sekolah, guru, staf tata usaha, staf teknis, dan keamanan serta tenaga kebersihan lingkungan kelas sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan masyarakat sekitar sekolah yang melibatkan tokoh masyarakat, wali murid, pemerhati pendidikan dan media sosial yang berkembang di sekitar lingkungan sekolah. Terjadinya interaksi antara faktor internal dan eksternal tersebut menuntut sekolah dalam mewujudkan mutu pendidikan untuk menggunakan pedoman pencapaian mutu yaitu SNP. Dalam upaya untuk meningkatkan mutu sekolah, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah dimana Pasal 1 Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar PTK, standar sarpras, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten dan satuan pendidikan merupakan lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan SNP dalam mengimplementasikan SNP secara berjenjang. SNP merupakan ukuran atau barometer dalam melihat profil mutu sekolah, dengan terpenuhinya SNP diharapkan ada jaminan mutu terhadap layanan pendidikan. Hal tersebut memberikan arti bahwa dengan tercapainya SNP, mutu sekolah diharapkan dapat ditingkatkan, pemenuhan SNP menjadi tolok ukur dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Adapun kerangka pikir penelitian sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Kajian evaluasi implementasi dan restrukturisasi SNP menggunakan pendekatan *mixed method*, dimana data kuantitatif yang diperoleh dari BAN-S/M Tahun 2017 di analisis butir capaian akreditasi SNP untuk mengetahui jawaban butir hasil akreditasi. Data terkait implementasi SNP yang diperoleh dari kepala sekolah, pengawas sekolah dan cabang dinas pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di analisis untuk mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan satuan pendidikan. Data terkait formulasi restrukturisasi diperoleh dari kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan kepala sekolah, pengawas sekolah dan perwakilan cabang dinas serta narasumber dari akademisi dan praktisi pendidikan.

Responden penelitian diambil dengan metode *purposive sampling* dengan target sekolah yang terakreditasi A di daerah perkotaan, hal tersebut karena sekolah yang terakreditasi A dapat diperoleh informasi mengenai tingkat kesulitan dan kendala dalam mengimplementasikan SNP. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

B. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder capaian akreditasi SNP adalah hasil akreditasi Tahun 2017 dari BAN-S/M sedangkan data primer dalam kajian ini diperoleh dari pendalaman ke satuan pendidikan untuk

mengetahui implementasi delapan SNP. Pendalaman ini dilakukan untuk menggali informasi tentang kesulitan, kendala dan solusi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam implementasi SNP. Data terkait restrukturisasi SNP diperoleh dari makalah narasumber dan hasil FGD dengan pemangku kepentingan di sekolah dan dinas pendidikan di daerah. Sampel penelitian yang diambil sebagai berikut:

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Nama Propinsi/ Kota	Dinas Pendidikan	Sekolah	Narasumber
1	Kota Malang, Jawa Timur	1. Perwakilan Cabdin 2. Pengawas sekolah	1. SMA Negeri 3 Malang 2. SMA Negeri 4 Malang 3. SMA Negeri 7 Malang 4. SMA Negeri 8 Malang 5. SMA Negeri 10 Malang 6. SMA Santo Yusup Malang	1. Prof. Dr. Anang Santoso 2. Prof. Dr. Dawud 3. Prof. Dr. Haris Anwar Syafrudie
2	Kota Bandung dan Kota Bekasi, Jawa Barat	1. Perwakilan Cabdin 2. Pengawas sekolah	1. SMA Negeri 2 Bandung 2. SMA Negeri 8 Bandung 3. SMA Negeri 3 Bandung 4. SMA Negeri 5 Bandung 5. SMA Taruna Bakti Bndg 6. SMA Kartika XIX-1 Bandung	1. Prof. Dr. Abdul Azis 2. Prof. De. Ace Suryadi 3. Dr. Heru Tiyono

No	Nama Propinsi/ Kota	Dinas Pendidikan	Sekolah	Narasumber
		1. Perwakilan Cabdin 2. Pengawas sekolah	1. SMA Negeri 1 Bekasi 2. SMA Negeri 1 Kedungwaringin 3. SMA Negeri 2 Tambun 4. SMA Negeri 4 Tambun	1. Dr. Budiono 2. Dr. Ibrahim Musa 3. Prof. Dr. Made Putrawan
3	DKI Jakarta	1. Perwakilan Cabdin 2. Pengawas sekolah	1. SMA Negeri 75 Jakarta 2. SMA Negeri 103 Jakarta 3. SMA Negeri 8 Jakarta 4. SMA Negeri 4 Jakarta	1. Bahrul Hayat, Ph.D. 2. Prof. Dr. Syarif Sumantri
4	Banten, Kota Tangerang Selatan	Perwakilan Cabdin 2. Pengawas sekolah	1. SMA Negeri 7 Tangsel 2. SMA Negeri 12 Tangsel 3. SMA Al Adzkar, Tansel 4. SMA Islam Al-Azhar, Tansel	1. Herwindo Haribowo, Ph.D. 2. Dr. Siskandar 3. Prof. Dr. Djaali 4. Dr. Jafriansen Damanik
5	DIY, Yogyakarta	1. Perwakilan Cabdin 2. Pengawas sekolah	1. SMA Negeri 1 Yogya 2. SMA Negeri 2 Yogya 3. SMA Negeri 8 Yogya 4. SMA Negeri 3 Yogya 5. SMA Bopkri 1 Yogya	1. Prof. Dr. Djemari Mardapi 2. Prof. Dr. Farida Hanum 3. Prof. Dr. Sugiyono

No	Nama Propinsi/ Kota	Dinas Pendidikan	Sekolah	Narasumber
			6. SMA Muhammadiyah Yogyakarta 1	

C. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Data implementasi SNP yang diperoleh dari hasil pendalaman pada tingkat satuan pendidikan diolah dan disusun dalam matriks kemudian setiap satuan pendidikan di analisis. Matriks yang telah disusun diklasifikasikan berdasarkan faktor kesulitan, kendala dan solusi yang dihadapi oleh satuan pendidikan. Dari matriks yang disusun dilakukan analisis berdasarkan klasifikasi faktor kesulitan, kendala dan solusi yang digunakan oleh satuan pendidikan.

Data formulasi restrukturisasi SNP diperoleh dari makalah narasumber dan hasil FGD dengan pemangku kepentingan di sekolah dan dinas pendidikan di daerah. Data yang diperoleh di analisis berdasarkan fokus pendapat dan saran dari narasumber terkait dengan formulasi SNP yang memberikan kontribusi terhadap capaian mutu pendidikan.

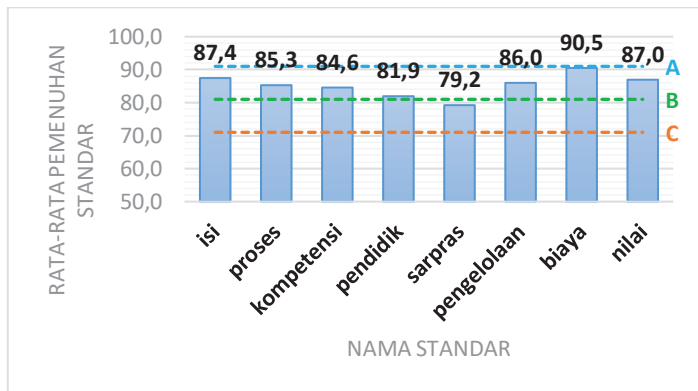
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV Hasil Kajian dan Pembahasan ini disajikan penjelasan terkait dengan capaian akreditasi SNP, implementasi SNP dan formulasi restrukturisasi SNP. Penjelasan tersebut diuraikan sebagaimana berikut.

A. Capaian Akreditasi Standar Nasional Pendidikan

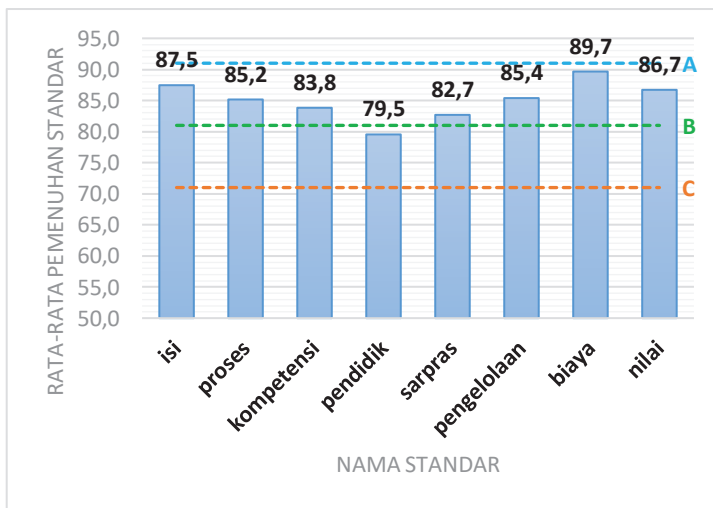
Capaian akreditasi jenjang SD pada tahun 2017 tersaji sebagaimana dalam Grafik 4.1. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan terdapat 3 (tiga) standar dengan N= 19.221 capaian rata-rata paling rendah berturut-turut yaitu standar sarpras (79,2), standar pendidik (81,9), dan SKL (84,6), hal ini berarti standar sarpras rata-rata SD belum mencapai peringkat Baik.



Grafik 2. Capaian Akreditasi Jenjang SD Tahun 2017

Satu-satunya standar yang memiliki capaian rata-rata yang memenuhi kriteria unggul pada jenjang SD adalah standar biaya dengan nilai 90,5.

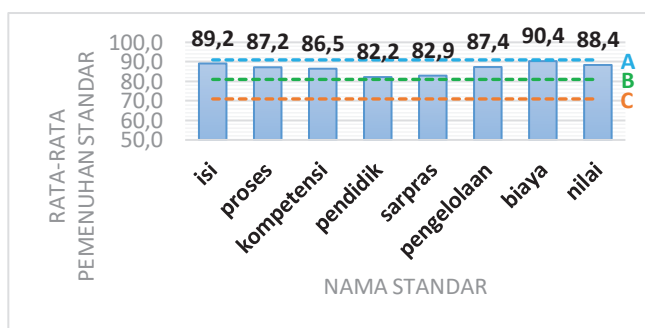
Capaian akreditasi jenjang SMP pada Tahun 2017 tersaji sebagaimana dalam Grafik 4.2., sama halnya dengan jenjang SD, terdapat tiga komponen SNP yang memiliki capaian rata-rata paling rendah dengan N = 6.090 pada jenjang SMP adalah standar sarpras, standar pendidik, dan SKL. Namun demikian, SNP yang capaian rata-rata paling rendah adalah Standar PTK, yakni 79,5 yang berarti rata-rata pendidik SMP belum mencapai peringkat Baik.



Grafik 3. Capaian Akreditasi Jenjang SMP Tahun 2017

Standar yang memiliki capaian rata-rata paling tinggi pada jenjang SMP adalah standar biaya, dengan nilai 89,7. Secara keseluruhan, rata-rata delapan SNP pada jenjang SMP tidak memiliki capaian yang memenuhi kriteria unggul.

Capaian akreditasi jenjang SMA pada Tahun 2017 tersaji sebagaimana dalam Grafik 4.3. Dalam grafik tersebut diperoleh informasi bahwa kondisi SMA menunjukkan hal yang serupa dengan jenjang SD dan SMP dimana terdapat tiga SNP yang memiliki capaian rata-rata paling rendah yaitu standar sarpras, standar PTK, dan SKL, adapun SNP yang memiliki capaian rata-rata paling rendah adalah standar PTK yakni 82,2 dan tingkat terendah berikutnya adalah standar sarpras, yakni 82,9. Meskipun nilainya paling rendah pada jenjang SMA, namun demikian kedua standar tersebut telah memenuhi kriteria Baik.



Grafik 4. Capaian Akreditasi Jenjang SMA Tahun 2017

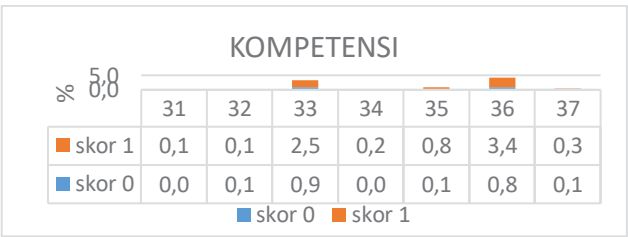
Sama halnya dengan jenjang SD, pada jenjang SMA satu-satunya komponen standar yang memiliki capaian rata-rata yang memenuhi kriteria unggul adalah standar biaya.

Dengan demikian dari semua jenjang pendidikan, terdapat tiga komponen standar pendidikan yang masih memiliki capaian paling rendah dengan N = 2.504 adalah standar PTK (82,2), standar sarpras (82,9) dan SKL (86,5), yang dilanjut dengan standar proses dengan capaian paling rendah berikutnya adalah

standar proses. Adapun untuk komponen yang capaian paling tinggi adalah standar biaya.

Capaian akreditasi berdasarkan analisis butir jenjang SMA Tahun 2017 diperoleh melalui analisis butir yang dilakukan berdasarkan jawaban dari hasil akreditasi terhadap instrumen akreditasi dari BAN-S/M Tahun 2017. Instrumen ini merupakan edisi perbaikan dari versi sebelumnya, dengan kategori pilihan jawaban A, B, C, D, E. Berdasarkan pilihan jawaban tersebut, apabila persentase sekolah yang memilih jawaban D atau E untuk sebuah butir lebih dari 10%, diduga butir pertanyaan tersebut sulit dipenuhi oleh sekolah. Dengan demikian, analisis butir perlu dilakukan untuk mengetahui butir mana saja yang pemenuhannya dirasakan sulit oleh sekolah. Uraian analisis butir akan dijelaskan secara lengkap di bawah ini.

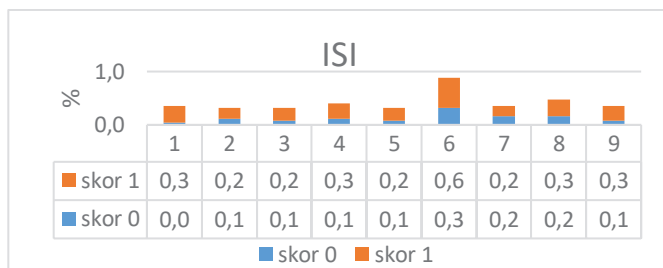
1. Capaian Standar Kompetensi Lulusan



Grafik 5. Standar Kompetensi Lulusan

Berdasarkan grafik di atas, untuk SKL tidak ada butir pertanyaan yang dijawab D atau E oleh lebih dari 10% sekolah. Artinya, tidak ada kesulitan bagi sekolah dalam pemenuhan standar ini.

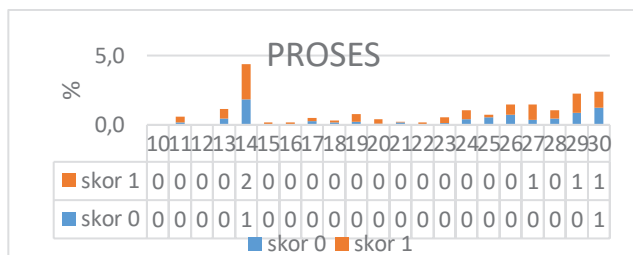
2. Capaian Standar Isi



Grafik 6. Standar Isi

Berdasarkan grafik di atas, untuk standar isi tidak ada butir pertanyaan yang dijawab D atau E lebih dari 10% sekolah. Artinya, tidak ada kesulitan bagi mayoritas sekolah dalam pemenuhan standar ini.

3. Capaian Standar Proses

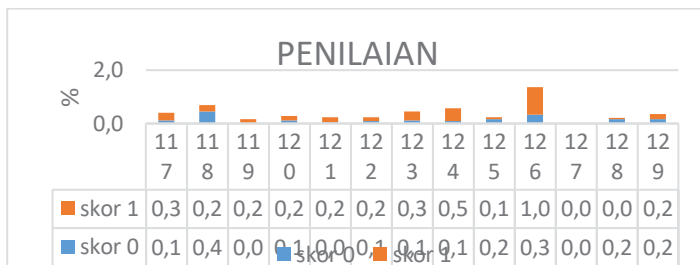


Grafik 7. Standar Proses

Berdasarkan grafik di atas, untuk standar proses tidak ada butir pertanyaan yang dijawab D atau E oleh lebih dari 10% sekolah. Artinya, tidak ada kesulitan bagi sekolah dalam pemenuhan standar ini. Butir yang terlihat relatif sulit dipenuhi oleh cukup banyak sekolah adalah nomor 14, yakni

penggunaan buku teks pelajaran oleh siswa dalam proses pembelajaran.

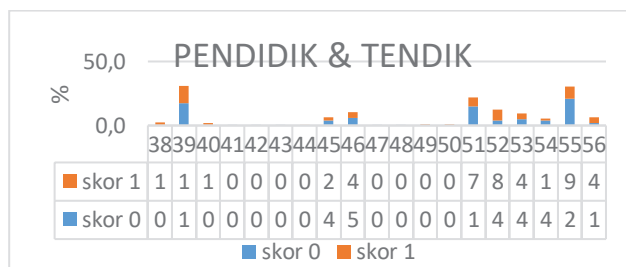
4. Capaian Standar Penilaian



Grafik 8. Standar Penilaian

Berdasarkan grafik di atas, untuk standar penilaian tidak ada butir pertanyaan yang dijawab D atau E oleh lebih dari 10% sekolah. Artinya, tidak ada kesulitan bagi mayoritas sekolah dalam pemenuhan standar ini.

5. Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

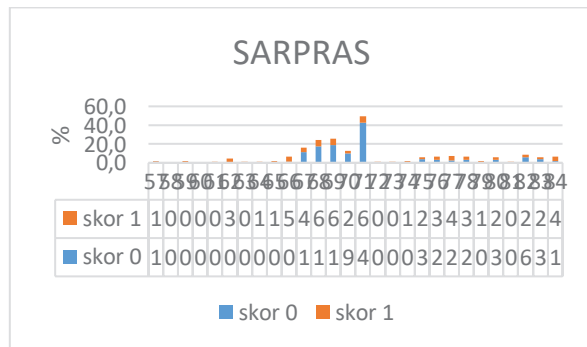


Grafik 9. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan grafik di atas, untuk standar PTK lebih dari 10% sekolah mengalami kesulitan memenuhi butir 39, 46, 51, 52, dan 55. Penjelasan butir-butir tersebut adalah sebagai berikut:

- Butir 39: sekolah dengan kondisi kurang dari 55% guru belum memiliki sertifikat pendidik (772 sekolah);
- Butir 46: rasio antara guru BK dengan jumlah siswa lebih kecil dari 1:251 (255 sekolah);
- Butir 51: sekolah memiliki Kepala Tenaga Adminstrasinya masih kurang (551 sekolah);
- Butir 52: sekolah memiliki tenaga administrasi yang berkualifikasi (313 sekolah);
- Butir 53: sekolah memiliki perpustakaan memenuhi syarat (238 sekolah);
- Butir 55: sekolah memiliki laboran dengan kualifikasi akademik (764 sekolah);

6. Capaian Standar Sarana dan Prasarana

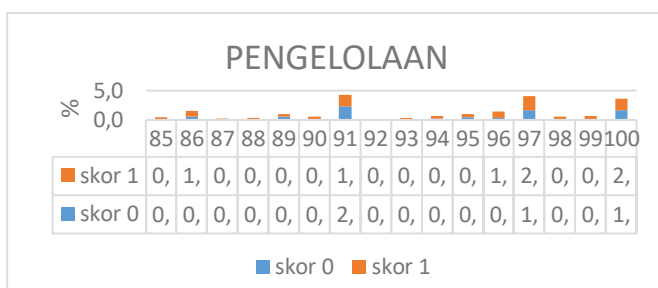


Grafik 10. Standar Sarana dan Prasarana

Berdasarkan grafik di atas, untuk standar sarpras lebih dari 10% sekolah mengalami kesulitan memenuhi butir 67, 68, 69, 70, dan hampir 50% sulit memenuhi 71. Isi butir-butir tersebut adalah sebagai berikut:

- Butir 67: sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium biologi (404 sekolah);
- Butir 68: sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium fisika (612 sekolah);
- Butir 69: sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium kimia (636 sekolah);
- Butir 70: sekolah yang belum memiliki ruang komputer/TIK (312 sekolah);
- Butir 71: sekolah belum memiliki ruang laboratorium bahasa (1237 sekolah);

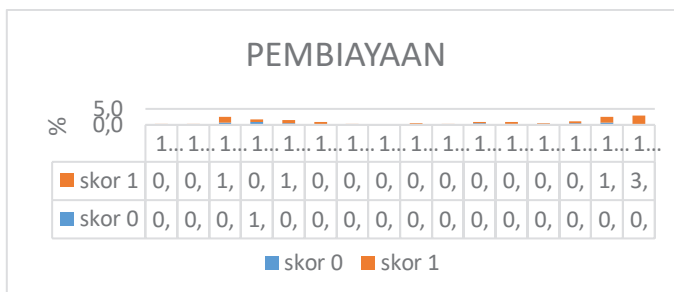
7. Capaian Standar Pengelolaan



Grafik 11. Standar Pengelolaan

Berdasarkan grafik di atas, untuk standar pengelolaan tidak ada butir pertanyaan yang dijawab D atau E oleh lebih dari 10% sekolah. Artinya, tidak ada kesulitan bagi mayoritas sekolah dalam pemenuhan standar ini. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap satuan pendidikan dapat memenuhi seluruh ketentuan standar pengelolaan dengan baik.

8. Capaian Standar Pembiayaan



Grafik 12. Standar Pembiayaan

Berdasarkan grafik di atas, untuk standar pembiayaan tidak ada butir pertanyaan yang dijawab D atau E oleh lebih dari 10% sekolah. Artinya, tidak ada kesulitan bagi mayoritas sekolah dalam pemenuhan standar ini.

Dari hasil analisis butir di atas dapat diketahui bahwa standar yang dirasakan sulit untuk dipenuhi adalah empat standar yaitu, 1) standar PTK, 2) standar sarpras, 3) SKL, dan 4) standar proses, dengan rincian sebagai berikut;

a. Standar PTK, butir pertanyaan yang sulit dipenuhi untuk jawaban D dan E lebih dari 10% adalah:

Butir 39: sekolah kurang dari 55% guru belum memiliki sertifikat pendidik;

Butir 46: rasio antara guru BK dengan jumlah siswa lebih kecil dari 1:251;

Butir 51: sekolah memiliki Kepala Tenaga Administrasinya masih kurang;

Butir 52: sekolah memiliki tenaga administrasi yang berkualifikasi;

Butir 53: sekolah memiliki perpustakaan memenuhi syarat;

Butir 55: sekolah memiliki laboran dengan kualifikasi akademik.

b. Standar sarpras, butir pertanyaan yang sulit dipenuhi untuk jawaban D dan E lebih dari 10% yaitu:

Butir 67: sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium biologi;

Butir 68: sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium fisika;

Butir 69: sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium kimia;

Butir 70: sekolah yang belum memiliki ruang komputer/TIK;

Butir 71: sekolah belum memiliki ruang laboratorium Bahasa

c. Pada SKL dan standar proses secara keseluruhan tidak ada butir jawaban D dan E yang melebihi 10%. Artinya dua standar tersebut walaupun tergolong capaian rendah namun hampir semua butir pertanyaan menunjukkan tidak ada kesulitan. Hanya pada standar proses yang terlihat relatif sulit dipenuhi oleh cukup banyak sekolah yaitu butir 14, yakni penggunaan buku teks pelajaran oleh siswa dalam proses pembelajaran. Namun jumlah yang menjawab D dan E masih dibawah 10%.

B. Implementasi setiap Standar Nasional Pendidikan

Berdasarkan implementasi SNP, pada bagian ini disampaikan data dan informasi tentang persepsi kepala sekolah, pengawas sekolah dan Dinas Cabang Pendidikan pada tingkat wilayah.

1. Implementasi SNP Menurut Pendapat Kepala Sekolah

Data dan informasi tentang persepsi terhadap implementasi delapan SNP pada tingkat satuan pendidikan bersumber kepala sekolah. Kedelapan standar tersebut adalah SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar PTK, standar pengelolaan, standar sarpras, dan standar pembiayaan. Persepsi tersebut disajikan sebagai berikut:

a. Standar Kompetensi Lulusan

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, diketahui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam implementasi SKL untuk memenuhi:

- a) Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap,
- b) Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan,
- c) Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan,

Adapun komponen yang sulit dipenuhi, meliputi:

- a) Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME,
- b) Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak,
- c) Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin,
- d) Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun,

- e) Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur,
 - f) Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli,
 - g) Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri,
 - h) Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab,
 - i) Siswa memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat,
 - j) Siswa memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif,
 - k) Siswa memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri,
 - l) Siswa memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis,
 - m) Siswa memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif,
 - n) Siswa memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif,
 - o) Siswa memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif,
 - p) Mengukur siswa memiliki pengetahuan metakognitif (dikarenakan sebagian besar guru masih terbatas daya kreatifitas mereka sehingga cenderung kembali mengajar dengan lebih banyak ceramah.)
- 2) Kendala-Kendala implementasi
- a) Kendala terkait Tenaga Pendidik
- Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala Tenaga Pendidik terhadap implementasi SKL yang dihadapi adalah:

- (1) Mentalitas (*mindset*) untuk melakukan perubahan belum merata dimiliki oleh guru sehingga apapun pelatihan dan upaya peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan yang dilaksanakan tidak membuahkan hasil yang signifikan,
- (2) Kemampuan guru masih kurang untuk menjelaskan kepada siswa tentang fakta, prosedur, konsep dan metakognitif,
- (3) Usia tenaga pendidik yang relatif masih muda/baru lulus Perguruan Tinggi, kompetensi standar proses pembelajaran belum sepenuhnya dipahami dan dikuasai, terutama dalam menumbuhkan keterampilan berpikir siswa,
- (4) Belum semua guru memiliki pemahaman tentang aplikasi metakognitif di kelas,
- (5) Guru mengajarkan materi *entrepreneur* dibatasi hanya pada mata pelajaran kewirausahaan, seharusnya bisa pada mata pelajaran lain seperti seni rupa,
- (6) Belum semua guru mampu menyajikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum,
- (7) Guru masih perlu melakukan memotivasi kepada siswa sehingga memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif.

b) Kendala terkait Penilaian Sikap

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala penilaian sikap dalam implementasi SKL yang dihadapi adalah:

- (1) Untuk menunjukkan kompetensi sikap seorang siswa harus menunjukkan pengetahuan dan keterampilan untuk di implementasikan menjadi sikap,
- (2) Dalam dimensi sikap, setiap individu/siswa memiliki pribadi yang unik sedangkan proses pembelajaran dilaksanakan secara klasikal,
- (3) Pengamatan untuk memberikan penilaian sikap membutuhkan kriteria dan standar serta instrumen tertentu,
- (4) Kompetensi dimensi sikap belum di apresiasi semua dalam implementasinya, sedangkan dalam dimensi keterampilan kendalanya karena guru mengalami kesulitan menilai keterampilan berpikir dan bertindak kritis (menyusun instrumen),
- (5) Mengukur instrumen sikap memiliki banyak ragam dan validitas instrumennya masih dirasa meragukan.

c) Kendala terkait Karakteristik Siswa

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala karakteristik siswa terhadap implementasi SKL yang dihadapi yaitu:

- (1) Motivasi belajar peserta secara intrinsik masih kurang,
- (2) Masih ada siswa yang mencontek pada saat ulangan,
- (3) Masih ada siswa yang belum biasa membedakan pengetahuan faktual, prosedural, konseptual dan metakognitif,
- (4) Tidak semua siswa memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif dan kritis,

- (5) Permasalahan yang berkaitan dengan budaya instan, dengan pola pikir anak sekarang pembelajaran yang masih menggunakan teknik dan strategi lama tidak menarik lagi bagi siswa,
 - (6) Untuk membentuk karakter siswa yang mempunyai pengetahuan faktual, prosedural dan konseptual serta metakognitif diperlukan peran serta lingkungan di luar sekolah seperti keluarga dan masyarakat. Hal ini bergantung pada seberapa dalam peran keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter tersebut,
 - (7) Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya penguatan siswa untuk beribadah, disiplin, jujur dan bertanggung jawab,
 - (8) Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter,
 - (9) Siswa perlu bimbingan dan motivasi serta strategi pembelajaran tertentu untuk mencapai pengetahuan metakognitif,
 - (10) Siswa belum memiliki kebiasaan belajar mandiri di luar sekolah,
 - (11) Lulusan belum memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan secara maksimal dan merata. Sebagian besar orang tua hanya fokus pada penilaian dimensi kognitif atau pengetahuan.
- 3) Solusi yang dilakukan
- a) Solusi terkait tenaga pendidik
- Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi tenaga pendidik terkait

implementasi SKL yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Menyarankan guru untuk selalu memotivasi belajar siswa dengan memberi contoh-contoh konkrit (video, film, bahasa dan cerita),
- (2) Menyarankan guru untuk memberikan aneka pengalaman belajar yang bervariasi dengan pembelajaran inovatif, kreatif dan menyenangkan,
- (3) Selalu memberikan motivasi dan berbagai peningkatan kapasitas guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, melaksanakan supervisi kunjungan kelas, memenuhi alat dan bahan peraga KBM atau praktikum, menambah referensi perpustakaan, dan melaksanakan kegiatan literasi sekolah,
- (4) Selain melakukan Program Induksi Guru Pemula (PIGP), sekolah melakukan IHT/*workshop* guna meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Selain itu, perlu dilakukan supervisi kelas guna mengevaluasi dan mencari tindak lanjutnya,
- (5) Guru memberikan tugas-tugas atau proyek pada siswa sebagai bagian dari pembiasaan belajar secara mandiri,
- (6) Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada pembina ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi anak didiknya,
- (7) Melakukan diskusi dengan seluruh rekan guru pengajar mengenai penilaian sikap siswa,
- (8) Memotivasi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip K-13, yang

memfasilitasi siswa untuk belajar kreatif, produktif dan kritis,

- (9) Melakukan sosialisasi penilaian K-13 bagi orang tua siswa,
- (10) Melakukan supervisi di kelas oleh kepala sekolah,
- (11) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan melengkapi sarpras pendukung dalam proses pembelajaran,
- (12) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan melengkapi sarpras pendukung dalam proses pembelajaran,
- (13) Melaksanakan kajian materi dan strategi pembelajaran dalam kegiatan MGMP internal,
- (14) Memberi pengertian dan pemahaman pada guru agar proses pembelajaran siswa mencapai pengetahuan metakognitif,
- (15) Memberi himbauan pada guru agar pembelajaran bersifat tuntas,
- (16) Pendampingan bagi guru dalam mengembangkan perangkat mengajar yang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk bisa menghasilkan lulusan yang mendekati SNP,
- (17) Meningkatkan pengawasan pada saat penilaian.

b) Solusi penilaian sikap

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi penilaian sikap dalam implementasi SKL yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Perlunya pemberian motivasi dan bimbingan dari guru untuk menambah wawasan bahkan mempraktekkan dalam kehidupan nyata,
- (2) Pelatihan dan *lesson study* sebagai upaya untuk lebih memahami aplikasi dan penilaian ranah metakognitif,
- (3) Pendidikan karakter dikembangkan melalui pembiasaan dan keteladanan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat,
- (4) Menggunakan metode penilaian yang bersifat variatif dan melakukan penilaian sikap secara langsung maupun tidak langsung secara berkala,
- (5) Kedisiplinan kolaborasi untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap yang lebih baik. Memberikan contoh instrumen untuk keterampilan berpikir dan bertindak kritis.

c) Solusi terkait karakteristik siswa

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terhadap karakteristik siswa dalam implementasi SKL yang dilaksanakan adalah:

- (1) Membangun/membangkitkan peserta didik dalam belajar untuk selalu mempunyai visi dan misi,
- (2) Memberikan arahan untuk meningkatkan percaya diri pada siswa,
- (3) Memberikan pemahaman bahwa nilai harus diperoleh dengan cara yang jujur karena mereka diberi kesempatan *remedial*,
- (4) Siswa diberi wawasan dan kesadaran bahwa sikap adalah hasil proses pembelajaran yang terjadi secara

terus menerus dan sikap adalah hasil belajar yang merupakan hasil dari pengetahuan dan keterampilan,

- (5) Kepala sekolah memberikan *reward* kepada siswa yang berprestasi,
- (6) Adanya kegiatan yang melatih siswa untuk berpikir dan bertindak kreatif, produktif dan kritis,
- (7) Memberikan pengertian bahwa belajar membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan secara instan, serta melaksanakan pembelajaran yang bersifat terbuka dan bebas berpendapat,
- (8) Memperbanyak waktu pada anak untuk dapat mengembangkan budaya “literasi” pada dirinya, sehingga anak lebih mudah menyerap konsep-konsep yang bersifat konseptual dan struktural,
- (9) Kepala sekolah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan prestasi siswa baik di bidang akademik, maupun non akademik,
- (10) Membuat buku pedoman tata tertib yang lebih lengkap dan terukur. Adapun dalam hal kegiatan beribadah, guru agama diberi pengertian untuk lebih intensif dalam memberikan penguatan beribadah peserta didik sesuai ajaran agamanya masing-masing,
- (11) Pemberian tugas secara terstruktur dan terukur pada siswa sehingga memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif,
- (12) Kegiatan sekolah yang diprogramkan selalu diarahkan untuk penguatan karakter yang juga menjadi program unggulan.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi SKL, tenaga pendidik (guru) masih terdapat kendala dalam kemampuan guru untuk menjelaskan kepada siswa tentang fakta, prosedur, konsep dan metakognitif. Belum semua guru memiliki keseragaman dalam memahami aplikasi metakognitif di kelas. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kendala lain terkait dengan penilaian sikap dan karakteritik siswa.

b. Standar Isi

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kepala sekolah merasakan kesulitan dalam implementasi standar isi pada;

- a) Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan,
- b) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai prosedur,
- c) Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan, lebih lanjut kesulitan pada subindikator, pada umumnya sekolah mengalami kesulitan pada penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Kesulitan lainnya yang dirasakan pada sekolah sampel yaitu pada pemenuhan subindikator sebagai berikut:

- a) Sekolah menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal,

- b) Sekolah melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa,
- c) Perangkat pembelajaran memuat karakteristik kompetensi keterampilan,
- d) Perangkat pembelajaran menyesuaikan tingkat kompetensi siswa,
- e) Perangkat pembelajaran memuat karakteristik kompetensi sikap,
- f) Perangkat pembelajaran memuat karakteristik kompetensi pengetahuan,

Menurut kepala sekolah bahwa pengembangan kurikulum membutuhkan upaya ekstra karena harus sesuai dengan kondisi dan karakteristik tingkat satuan pendidikan. Dalam pengembangannya membutuhkan penelaahan bersama dengan pemangku kepentingan yang tentu akan memunculkan banyak ide kreatif yang perlu dikemas menjadi sebuah rumusan yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan itu sendiri.

Menurut kepala sekolah bahwa selama ini sekolah sudah berusaha untuk memenuhi standar isi secara bertahap sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Untuk sekolah swasta seperti SMA Muhammadiyah, beban belajar siswa menjadi lebih berat karena ada tambahan jam agama yang cukup banyak yaitu 12 jam per minggunya.

Berdasarkan data dan informasi tersebut diketahui bahwa sebagian besar sekolah sampel masih merasakan kesulitan dalam implementasi standar isi.

2) Kendala yang dialami

Berdasarkan informasi yang diperoleh kendala yang dialami dalam implementasi standar isi, menurut kepala sekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

a) Pemahaman terhadap Standar Isi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala pemahaman terhadap implementasi SNP ada pada implementasi standar isi terutama dalam hal prosedur, aturan dan petunjuk teknis yang dirasa rumit. Hal ini memberikan akibat pada pemahaman kepala sekolah terhadap standar isi tidak optimal.

b) Kendala terkait Tenaga Pendidik

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah bahwa kendala terkait tenaga pendidik dalam implementasi SNP adalah sebagai berikut:

- (1) Sebagian besar guru menganggap bahwa perangkat pembelajaran yang dibuat hanya bersifat formalitas untuk pemenuhan kebutuhan administrasi belaka,
- (2) Masih ada beberapa guru yang malas untuk membuat/menyusun perangkat pembelajaran secara mandiri,
- (3) Masih ada guru yang menyusun perangkat tidak berdasarkan kompetensi secara runtut terhadap apa yang akan dilakukan,
- (4) Guru kesulitan membuat administrasi terkait perencanaan kegiatan pembelajaran dan instrumen penilaian,

- (5) Tidak semua guru memiliki pemahaman yang merata tentang standar isi, biasanya perangkat pembelajaran disusun untuk 1 semester, dan perangkat tersebut berlaku bagi semua kelas yang diajarkan, padahal setiap siswa memiliki kompetensi yang berbeda-beda,
 - (6) Kompetensi guru yang belum optimal dalam menyusun perangkat pembelajaran yang memuat karakteristik kompetensi keterampilan, karena penyusunan ini membutuhkan guru yang terampil. Hal ini berpengaruh pada penyesuaian tingkat kompetensi siswa,
 - (7) Sekolah mengalami kendala dalam mengatur penambahan beban belajar terutama untuk pendalaman materi karena keterbatasan kompetensi/kemampuan SDM dari tenaga pendidik dan siswa,
 - (8) Kemampuan atau kompetensi guru sangat beragam, pendalaman materi diperlukan untuk penguasaan pengetahuan yang memadai,
 - (9) SDM yang mendukung sekolah kurang memadai.
- c) Kendala terkait pelaksanaan proses belajar

Berdasarkan informasi dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala terkait pelaksanaan proses belajar terhadap implementasi SNP yang dihadapi sekolah adalah:

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di kelas terkadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan,
- (2) Sekolah mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi,

- (3) Kesulitan mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi karena terbentur dengan aplikasi Dapodik,
- (4) Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran di luar jam KBM kurang efektif.

d) Kendala terkait Waktu

Berdasarkan informasi dari kepala sekolah dapat di pahami bahwa kendala terkait waktu implementasi SNP yang dihadapi adalah:

- (1) Pengerjaan perangkat pembelajaran memakan waktu yang banyak sehingga dapat menghilangkan waktu untuk melaksanakan tugas pokok,
- (2) Waktu belajar yang relatif singkat,
- (3) Durasi jam belajar setiap hari menjadi lama (rata-rata sampai pukul 17.00),
- (4) Pengaturan waktu antara beban mengajar dengan waktu untuk menganalisa perangkat pembelajaran, serta tenggang waktu pengumpulan perangkat yang sangat terbatas,
- (5) Ruang lingkup materi pembelajaran sering terkendala waktu yang tidak mencukupi,
- (6) Sekolah dalam melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan memiliki kendala, karena keterbatasan waktu sehingga bentuk pendalaman materi kadang tidak sesuai dengan beban belajar, struktur kurikulum yang berlaku tidak di dukung tenaga pengajar yang mencukupi. Pengembangan diri siswa tidak dapat berjalan optimal dikarenakan terkendala waktu pelaksanaan,

- (7) Jam mata pelajaran keagamaan terbatas (hal ini untuk pembentukan nilai religius, karakter) maka perlu dilakukan ekstra kerja keras agar semua bisa terpenuhi.

e) Kendala terkait Sarana

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala terkait sarana yang dihadapi yaitu:

- (1) Ketersediaan alat-alat praktik hanya yang bersifat umum. Banyak alat yang tersedia tetapi tidak ada untuk keterampilan yang khusus (menimbang, mengukur, membaca skala, ukuran secara teliti kurang),
- (2) Faktor kecukupan ruang kelas dan ruang guru masih kurang.

f) Kendala terkait Peserta didik

Berdasarkan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa kendala terhadap implementasi yaitu:

- (1) Pengembangan diri siswa yang sangat beragam sehingga tidak mudah untuk dilakukan kepada semua siswa,
- (2) Perangkat pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kompetensi siswa,
- (3) SDM dan tingkat kompetensi siswa yang beragam dan bervariasi terutama pada ranah kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Sehubungan dengan hal tersebut sekolah hanya mengadakan kelas *regular* sebagai konsekuensi dari sistem pelaksanaan PPDB, sekolah hanya menerapkan

saringan melalui wawancara dan tidak mengadakan seleksi secara akademik (tidak menerapkan penentuan *passing grade* berdasarkan hasil UN di SMP maupun tes saringan akademik bagi para calon peserta didik yang mendaftar ke sekolah),

- (4) Keragaman karakteristik dan kompetensi siswa,
- (5) Sulit membedakan antara kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan terutama pada mata pelajaran tertentu, misalnya matematika.

g) Kendala terkait Pelibatan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa kendala terkait pelibatan pemangku kepentingan dalam implementasi yaitu:

- (1) Sulit menentukan waktu untuk menghadirkan seluruh pemangku kepentingan,
- (2) Pemangku kepentingan memiliki kesibukan dan tugas yang padat,
- (3) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengembangkan kurikulum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan terdapat kesulitan dalam pola pandangan yang beragam,
- (4) Sebagian sekolah masih mengalami kesulitan dalam menghadirkan dunia usaha,
- (5) Bagi sekolah swasta pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Hal ini terjadi karena sekolah swasta harus mampu membuat sinkronisasi antara tujuan Yayasan dan Dinas Pendidikan yang dijadikan sebagai acuan,

- (6) Sekolah mengalami kesulitan untuk menyerap dan memberdayakan peran pemangku kepentingan,
- (7) Pelibatan para pemangku kepentingan memerlukan waktu yang cukup untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan,
- (8) Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan KTSP adalah adanya kepentingan yang sangat beragam dari pemangku kepentingan sehingga sulit menyusun KTSP yang dapat memenuhi keinginan dari setiap pemangku kepentingan.

h) Kendala terkait Muatan Lokal

Berdasarkan informasi dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala terhadap implementasi yang dihadapi yaitu satuan pendidikan belum menentukan jenis muatan lokal sesuai dengan hasil analisis konteks, karena terbatasnya SDM.

i) Kendala terkait Peminatan

Berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa kendala terhadap implementasi peminatan adalah sebagai berikut:

- (1) Pengaturan kegiatan pembelajaran melalui lintas peminatan,
- (2) Jumlah siswa dalam rombongan belajar mata pelajaran Lintas Minat tidak merata, bahkan ada yang kurang dari 20 siswa (kendala pada kesesuaian dengan Dapodik),
- (3) Jadwal pembelajaran Lintas Minat di luar jam KBM, pada umumnya berbenturan dengan kegiatan

pengembangan diri dan kegiatan individual siswa seperti kegiatan bimbingan belajar /*les private*,

- (4) Pilihan ekstrakurikuler masih terbatas dan hanya berasal dari minat siswa.

j) Kendala terkait Penerapan Sistem SKS

Berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa sistem SKS terhadap implementasi menimbulkan kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan sistem SKS. Kendala tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kelompok berbeda dalam satu kelas (kelompok belajar cepat, sedang, dan lambat). Dengan kondisi yang berbeda tersebut maka perangkat pembelajaran harus bisa mengakomodir ketiga kelompok tersebut.

3) Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah

Solusi yang dilakukan oleh sekolah terkait kesulitan dan kendala standar isi dalam implementasi SNP pada tingkat satuan pendidikan yaitu:

a) Solusi terkait pemahaman terhadap Standar Isi

Berdasarkan informasi dari kepala sekolah solusi terkait dengan pemahaman standar isi maka solusi yang dilakukan sebagai berikut:

- (1) Untuk menjelaskan karakteristik kompetensi keterampilan dilakukan dengan cara mengefektifkan literasi digital pada setiap kesempatan KBM/tatap muka dengan peserta didik,
- (2) Koreksi terhadap KTSP dilakukan secara bergantian, dengan cara menyesuaikan waktu luang masing-masing,

- (3) Menyebarakan proposal ke seluruh instansi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum,
- (4) Melakukan sosialisasi program sekolah dengan orang tua,
- (5) Solusi yang ditawarkan dalam penyusunan kurikulum ialah dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah dalam mengembangkan KTSP,
- (6) Menyelesaikan hanya untuk memenuhi syarat administrasi.

b) Solusi terkait dengan Tenaga Pendidik

Berdasarkan informasi kepala sekolah terkait solusi tenaga pendidik dalam implementasi standar isi adalah sebagai berikut:

- (1) Selalu memberikan motivasi dan melakukan berbagai peningkatan kapasitas guru, baik di dalam maupun di luar sekolah dan melaksanakan supervisi kunjungan kelas,
- (2) Sekolah harus terus meningkatkan pemahaman standar isi bagi semua tenaga pendidik secara berkesinambungan (bisa setiap semester) melalui kegiatan *workshop* atau IHT, sehingga pemahaman tentang standar isi pendidik terus meningkat,
- (3) Memperbanyak IHT tentang penyusunan perangkat pembelajaran dengan benar,
- (4) Melakukan kolaborasi dengan Dosen PTN Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam kegiatan IHT yang dilakukan sebulan sekali,
- (5) Membagi beban tugas dengan adil sesuai dengan beban tugas yang diampunya,

- (6) Kepala sekolah memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh guru secara berkala,
- (7) Meningkatkan kompetensi guru melalui *workshop* implementasi kompetensi sikap melalui pembelajaran dan penilaian,
- (8) Mengoptimalkan proses penataan dan penugasan guru sesuai dengan kompetensinya serta penambahan guru tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan guru sesuai struktur kurikulum,
- (9) IHT merupakan perangkat guru yang dilakukan sebelum tahun pelajaran dimulai,
- (7) Pendampingan tindak lanjut dari IHT pada nomor a sehingga dokumen perangkat guru dapat terdokumentasi dengan baik dan lengkap sesuai standar,
- (8) Dalam menghadapi kendala pendalaman materi, pihak sekolah selalu berupaya untuk meningkatkan SDM tenaga pendidik melalui penyelenggaraan IHT, keikutsertaan dalam seminar, pelatihan, dan mendorong berperan aktif dalam kegiatan MGMP mata pelajaran baik di tingkat sekolah, Kota maupun Provinsi dan memotivasi para tenaga pendidik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
- (9) Memberdayakan MGMP sekolah dan MGMP Kota,
- (10) Setiap MGMP di sekolah berkumpul untuk membicarakan dan menganalisis perangkat pembelajaran pada hari MGMP.

c) Solusi terkait Pelaksanaan Proses Belajar

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah terkait solusi proses belajar terhadap pelaksanaan standar isi sebagai berikut;

- (1) Melakukan analisis terhadap kegiatan di luar jam KBM atau di luar hari kerja,
- (2) Kerja sama dengan komite sekolah agar dapat mengadakan pendalaman untuk materi-materi tertentu,
- (3) Mencoba untuk mewujudkan kegiatan yang bisa mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan mengatur waktu penyusunan pada saat libur sekolah,
- (4) Perangkat pembelajaran disesuaikan dengan rumusan kompetensi lulusan,
- (5) Untuk meminimalisir keberagaman SDM dan tingkat kompetensi peserta didik maka sekolah mengeluarkan kebijakan bahwa dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 sekolah menerapkan sistem seleksi berupa tes akademik bagi beberapa mata pelajaran yang diUNkan di SMP dengan menggunakan perangkat berbasis komputer,
- (6) Membentuk kelas khusus berdasarkan tingkat kompetensi peserta didik yang homogen,
- (7) Memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mendalami materi melalui penyelenggaraan ekstrakurikuler Kelompok Ilmiah Remaja,
- (8) Menyenggarakan kegiatan pengayaan,
- (9) Melakukan kegiatan pemetaan SKL untuk KI dan KD,

- (10) Menambah jam pelajaran di luar jam reguler untuk program pendalaman materi khusus kelas XII,
- (11) Pelaksanaan supervisi akademik yang selektif dan evaluatif bagi perangkat yang masih kurang baik.

d) Solusi terkait waktu

Berdasarkan informasi kepala sekolah solusi terkait dengan waktu dalam pelaksanaan standar isi sebagai berikut:

- (1) Mengerjakan hal-hal yang pokok dan penting saja,
- (2) Mengefektifkan waktu belajar secara optimal,
- (3) Melakukan komunikasi dengan perserikatan Muhammadiyah yaitu tatap muka dan praktik yang dikompromikan agar beban siswa dalam pembelajaran keagamaan bisa terpenuhi semuanya.

e) Solusi terkait Peserta Didik

Berdasarkan informasi kepala sekolah terkait dengan peserta didik pada pelaksanaan standar isi, maka solusi yang dilakukan sebagai berikut:

- (1) Memberikan izin kepada peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal diluar sekolah/ luar KBM,
- (2) Memahami keberagaman karakteristik belajar peserta didik,
- (3) Melakukan pendampingan kepada siswa dalam memilih ekstrakurikuler,
- (4) Memfasilitasi siswa dengan *virtual learning*,
- (5) Melaksanakan pembelajaran klinis mata pelajaran dimana siswa bebas memilih guru yang diinginkan

untuk memfasilitasi siswa yang memiliki keragaman kompetensi.

f) Solusi terkait Pelibatan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan informasi kepala sekolah terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan standar isi, maka solusi yang dilakukan sebagai berikut:

- (1) Mendengarkan aspirasi dan memberikan respon positif dari setiap masukan yang diberikan pemangku kepentingan,
- (2) Melakukan diskusi dan musyawarah antara manajemen sekolah swasta dan pihak Yayasan dalam upaya pengembangan kurikulum, sehingga setelah tercapai hasil mufakat akan disampaikan kepada forum orang tua peserta didik (pemangku kepentingan) sehingga akan terjadi sinergi yang baik,
- (3) Meminta pendapat atau memberi kesempatan para pemangku kepentingan untuk memverifikasi dan menelaah KTSP yang sudah disusun oleh sekolah,
- (4) Mengadakan diskusi dan memberikan fasilitas untuk dipelajari oleh pemangku kepentingan agar mempunyai persepsi yang sama,
- (5) Mengundang pelaku dunia usaha sebagai narasumber dalam seminar sekolah,
- (6) Melakukan kegiatan sebagai solusi dasar dimana semua *stakeholder* duduk bersama, menginventarisasi setiap ide yang muncul dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan yang relevan dengan kerangka dasar penyusunan kurikulum dan dijabarkan dalam bentuk operasional

dan berbagai instrumen yang diperlukan. Proses ini dibantu oleh narasumber yang berkompeten dan diramu dalam bentuk FGD atau IHT sehingga proses pengembangan kurikulum tingkat satuan ini dapat lebih terarah.

g) Solusi terkait Muatan Lokal

Berdasarkan informasi kepala sekolah terkait dengan muatan lokal pada pelaksanaan standar isi maka solusi yang dilakukan adalah menggunakan jenis muatan lokal yang sudah diidentifikasi oleh Provinsi, sebagai contoh Provinsi Banten yaitu rampak bedug dan batik sebagai muatan lokal yang diintegrasikan pada mata pelajaran seni budaya.

h) Solusi terkait Sarana Prasarana

Berdasarkan informasi kepala sekolah terkait dengan sarpras dalam pelaksanaan standar isi maka solusi yang dilakukan sekolah adalah mengajukan permohonan RKB kepada pemerintah.

i) Solusi terkait Peminatan

Berdasarkan informasi kepala sekolah terkait dengan peminatan terhadap pelaksanaan standar isi maka solusi yang dilakukan sebagai berikut:

- (1) Mengidentifikasi data empirik pemilihan mata pelajaran Lintas Peminatan tahun pelajaran sebelumnya,
- (2) Menetapkan dua mata pelajaran dengan jumlah terbanyak yang dipilih siswa,

- (3) Memasukkan mata pelajaran Lintas Peminatan ke dalam jadwal pelajaran umum,
- (4) Menerapkan sistem seleksi tes wawancara dalam upaya menggali minat dan bakat calon peserta didik serta sosialisasi terhadap visi, misi dan tata tertib sekolah,
- (5) Mengadakan psikotes sebagai data pendukung dalam proses penentuan kelas peminatan yang sesuai bagi peserta didik.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa dalam implementasi standar isi, sebagian besar guru menganggap bahwa perangkat pembelajaran yang dibuat hanya bersifat formalitas untuk pemenuhan kebutuhan administrasi. Pemahaman guru terhadap standar isi juga belum merata sehingga masih ada beberapa guru yang malas untuk membuat/menyusun perangkat pembelajaran secara mandiri. Kendala lain terkait implementasi standar isi yaitu pelaksanaan proses belajar, pengerjaan perangkat pembelajaran yang memakan waktu, ketersediaan sarana, karakteristik siswa yang beragam, pembelajaran lintas peminatan juga memberikan kendala dalam pelaksanaan proses belajar di dalam kelas.

c. Standar Proses

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, kesulitan dalam pemenuhan standar proses terkait:

- a) Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan,

- b) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat,
- c) Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran.

Adapun komponen yang sulit dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru dan menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran,
- b) Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar
(dikarenakan sebagian besar guru masih sering kembali pada metode ceramah dan berkomunikasi satu arah karena ada kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan seluruh KD, minimnya literasi guru, kurangnya minat dan daya baca, serta tidak menguasai model pembelajaran aktif),
- c) Pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi,
- d) Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif,
- e) Pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat,
- f) Pembelajaran Terpadu,
- g) Pembelajaran mendorong siswa mencari tahu,
- h) Pembelajaran menuju penguatan penggunaan pendekatan ilmiah,
- i) Perencanaan pembelajaran mengacu pada silabus yang telah dikembangkan,
- j) Melakukan pemantauan proses pembelajaran,
- k) Melakukan penilaian otentik secara komprehensif,
- l) Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa,

- m) Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan,
- n) Pendidik menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis,
- o) RPP mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah,
- p) Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa,
- q) Memanfaatkan hasil penilaian otentik,
- r) Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru,
- s) Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran,
- t) Memanfaatkan media dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.

2) Kendala yang dialami

a) Kendala terkait dengan Kemampuan Tenaga Pendidik Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala tenaga pendidik dalam implementasi standar proses yaitu:

- (1) SDM sekolah yang tidak memadai dan penyelenggaraan pelatihan yang minim,
- (2) Tidak seluruh guru dapat melakukan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi,
- (3) Tidak seluruh guru dapat melakukan pembelajaran menuju keterampilan aplikatif,
- (4) Memberikan pemahaman dan kesadaran pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat,
- (5) Tidak semua guru Melakukan penilaian otentik pada tingkat 4, 5 dan 6,

- (6) Sebagian besar guru menganggap bahwa perangkat pembelajaran yang dibuat hanya bersifat formalitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi, sekedar menggugurkan kewajiban, RPP tidak dibuat sendiri, serta minat dan daya baca yang masih rendah,
- (7) Masih ada beberapa guru yang belum dapat melakukan pengawasan dan penilaian otentik dalam proses pembelajaran,
- (8) Guru banyak yang melakukan penilaian pada akhir proses pembelajaran dan sepanjang proses PBM,
- (9) Masih banyak guru yang hanya *copy paste* silabus dan tanpa dikembangkan,
- (10) Belum seluruh pendidik menyusun dokumen rencana pembelajaran dengan lengkap dan sistematis,
- (11) Belum semua guru menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan K-13 secara terus menerus,
- (12) Tidak setiap tenaga pendidik memahami adanya perbedaan yang dimiliki oleh siswa, sehingga harus terus menerus diingatkan. Selain itu masih diperlukan penjelasan manfaat penilaian otentik kepada seluruh siswa,
- (13) Beberapa guru kurang memiliki kemampuan untuk memotivasi siswa dan memiliki strategi pembelajaran yang mampu mendorong siswa untuk mencari tahu lebih mendalam,
- (14) Tidak semua guru mampu menggabungkan konsep dalam pembelajaran secara terpadu,
- (15) Guru belum terbiasa dengan model pembelajaran HOTS terkait kebenaran multidimensi,

- (16) *Student centered* kadang terlupakan oleh guru dan berubah menjadi *teacher centered*,
- (17) Guru masih terpaku pada proses pembelajaran di dalam kelas.

b) Kendala terkait dengan Waktu

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala waktu dalam implementasi standar proses yang dihadapi yaitu:

- (1) Waktu untuk pembelajaran bagi siswa untuk mencari tahu sangat kurang dan apabila diberikan pekerjaan rumah yang banyak menimbulkan keluhan dari orang tua,
- (2) Waktu dan kemampuan guru untuk menuju keterampilan aplikatif sangat kurang,
- (3) Tagihan RPP yang banyak komponennya kadang menyita waktu guru dalam pembuatannya.

c) Kendala terkait dengan supervisi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah bahwa kendala supervisi terhadap implementasi standar proses yang dihadapi yaitu:

- (1) Keterbatasan waktu untuk melaksanakan supervisi proses pembelajaran,
- (2) Waktu supervisi akademis sering pelaksanaannya tidak bisa sesuai jadwal dikarenakan padatnya kegiatan sekolah baik kegiatan internal maupun kegiatan eksternal.

d) Kendala terkait dengan sarana prasarana

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah bahwa kendala sarpras dalam implementasi standar proses yang dihadapi yaitu:

- (1) Metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa masih kurang variatif karena sarpras dan kemampuan pengajar yang masih kurang,
- (2) Kekurangan ruang belajar,
- (3) Jumlah siswa dalam satu rombongan belajar melebihi ketentuan.

e) Kendala terkait dengan Penilaian Otentik

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah bahwa kendala penilaian otentik terhadap implementasi standar proses yang dihadapi yaitu:

- (1) Penilaian otentik belum sepenuhnya dipahami dengan baik,
- (2) Pelaksanaan penilaian otentik terkadang menyita waktu,
- (3) Belum memiliki instrumen untuk penilaian secara komprehensif,
- (4) Guru masih banyak yang belum menguasai teknik yang tepat untuk digunakan dalam penilaian otentik,
- (5) Kendala ada pada sistem penilaian yang metodenya sering berubah. Diharapkan sistem penilaian dapat dikaji dengan lebih seksama sehingga guru tidak terbebani dengan penilaian yang cukup menyita waktu. Sistem penilaian perlu dilakukan secara sederhana namun bisa mencakup semuanya.

f) Kendala terkait dengan Pembelajaran dengan Jawaban yang Kebenarannya Multidimensi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi dalam implementasi standar proses yang dihadapi adalah:

- (1) Tidak semua pertanyaan memiliki kebenaran jawabannya multidimensi,
- (2) Kesulitan dalam mengoreksi kebenaran dari jawaban yang multidimensi,
- (3) Sekolah masih menerapkan bentuk soal penilaian guru dalam pelaksanaan PAS (Penilaian Akhir Semester) dan PAT (Penilaian Akhir Tahun),
- (4) Beberapa mata pelajaran UN masih berbentuk pilihan ganda sehingga siswa diarahkan dengan jawaban yang tidak multidimensi,
- (5) Sekolah tidak menerapkan sistem pembagian kelas yang berdasarkan kemampuan kompetensi para peserta didiknya yang homogen dan paralel. Hal tersebut berdampak pada heterogenitas kemampuan siswa,
- (6) Peserta didik memiliki minat dan penguasaan yang variatif pada setiap mata pelajaran.

3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah

a) Solusi terkait dengan Kemampuan Tenaga Pendidik
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terkait dengan kemampuan tenaga pendidik dalam implementasi standar proses adalah sebagai berikut:

- (1) Mengadakan IHT atau mengikutsertakan guru dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di luar sekolah,
- (2) Selalu memberikan motivasi dan berbagai peningkatan kapasitas guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, melaksanakan supervisi kunjungan kelas, memenuhi alat dan bahan peraga KBM /praktikum, menambah referensi perpustakaan, dan melaksanakan kegiatan literasi sekolah,
- (3) Sekolah melakukan pembinaan lewat program PIGP (Program Induksi Guru Pemula) minimal 1 tahun pelajaran, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kompetensi mengajar/pembelajaran para guru/pendidik secara berkesinambungan,
- (4) Melakukan kegiatan IHT & *workshop* dengan memanggil narasumber yang ahli di bidangnya,
- (5) Pembekalan dan *workshop* di awal tahun pelajaran, memberdayakan MGMP sekolah untuk meningkatkan kualitas guru, mengikutsertakan guru dalam berbagai pelatihan yang relevan dan supervisi di kelas oleh kepala sekolah,
- (6) Belajar dengan teman sejawat (MGMPs) dan mengikuti kegiatan *lesson study*,
- (7) Sekolah memfasilitasi peningkatan kemampuan guru terutama kemampuan untuk memilih dan menggunakan strategi pembelajaran melalui *workshop*, IHT atau memberdayakan MGMP dan PKB terutama terkait dengan penilaian otentik dan peranannya dalam masih pembelajaran,
- (8) Melakukan *workshop* dan sosialisasi proses belajar berbasis 4 C, HOTS dan STEM

- (9) Memberi kesempatan bagi guru melakukan proses belajar di luar kelas dan mengembangkan sistem belajar *student centered*,
- (10) Pendelegasian kepada Ketua MGMP untuk mendorong anggotanya secara bersama-sama menyelesaikan perangkat pembelajaran tepat pada waktu yang telah disepakati,
- (11) Pembuatan RPP diberi waktu yang panjang pada saat libur sekolah sebagai tugas rumah guru.

b) Solusi terkait dengan Supervisi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terkait dengan persoalan supervisi terhadap implementasi standar proses adalah:

- (1) Membagi supervisi proses pembelajaran dalam satuan tim (kepala sekolah, guru-guru senior yang ditunjuk dengan golongan yang lebih tinggi) atau lama mengajar dengan kualifikasi tertentu,
- (2) Mengefektifkan waktu supervisi dalam beberapa kelompok,
- (3) Membagi supervisi dalam rumpun mata pelajaran yang sama dalam kelompok,
- (4) Melakukan supervisi terjadwal secara baik dan menyeluruh maupun kelompok mata pelajaran semua mendapatkan masukan/evaluasi dan tindak lanjut proses pembelajaran,
- (5) Melakukan komunikasi antara supervisor dan pihak yang di supervisi tentang jadwal pengganti, dan tim manajemen mutu menyiapkan prosedur dan dokumen untuk pendataan jadwal pengganti tersebut,

- (6) Membentuk tim pelaksana kegiatan supervisi pembelajaran dengan melibatkan beberapa guru senior yang dipandang mampu untuk melaksanakan supervisi pembelajaran,
- (7) Melatih guru yang diberi tugas melaksanakan supervisi pembelajaran tentang teknik supervisi kelas,
- (8) Penekanan tentang penting pelaksanaan pengawasan dalam penilaian otentik dalam proses pembelajaran.

c) Solusi terkait Metode Pembelajaran yang Berdasarkan Karakteristik Siswa

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah terungkap bahwa solusi terkait persoalan pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa terhadap implementasi standar proses yang dihadapi yaitu:

- (1) Tenaga pendidik menyelenggarakan analisis hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik sehingga bisa menentukan dan mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik para peserta didik pada masing-masing kelas yang diampunya,
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah menyelenggarakan tes akademik dan psikotes dalam menentukan pembagian kelas perminatan sehingga bisa meminimalisir heterogenitas kemampuan/ kompetensi para peserta didik yang ditempatkan pada satu kelas peminatan,
- (3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dapat membentuk rombongan belajar dengan

jumlah siswa maksimal tanpa mengabaikan kualitas pembelajaran,

(4) Pengajuan ruang kelas baru.

d) Solusi terkait dengan Pembelajaran dengan Jawaban yang Kebenarannya Multidimensi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi yang dilakukan terkait dengan pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa dalam rangka implementasi standar proses adalah menyikapi kendala pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sekolah perlu mengarahkan para tenaga pendidik untuk berkoordinasi dan berdiskusi menyelesaikan kendala tersebut dalam kegiatan MGMP sehingga mereka bisa menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran yang mengarah pada teknik penilaian atau penugasan yang berdampak pada proses pembelajaran yang bisa memotivasi para peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang kebenaran jawabannya multidimensi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang mereka ampu.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa dalam implementasi standar proses, sebagian guru hanya melakukan *copy paste* terhadap silabus tanpa dikembangkan. Guru tidak seluruhnya dapat melakukan pembelajaran yang terkait dengan substansi dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Kesulitan lain yang dihadapi guru adalah mereka tidak dapat melakukan pembelajaran menuju keterampilan aplikatif. Dalam pelaksanaan standar proses kendala yang dirasakan

adalah keterbatasan kepala sekolah untuk melakukan supervisi karena padatnya kegiatan internal dan eksternal.

d. Standar Penilaian

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam implementasi standar penilaian yaitu untuk memenuhi:

- a) Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi,
- b) Teknik penilaian objektif dan akuntabel,
- c) Penilaian pendidikan ditindaklanjuti,
- d) Instrumen penilaian menyesuaikan aspek,
- e) Penilaian dilakukan mengikuti prosedur,

Adapun komponen-komponen yang sulit adalah:

- a) Pada umumnya instrumen penilaian yang ada tidak digunakan sepenuhnya karena dianggap merepotkan dan menambah beban administrasi guru, serta jumlah rasio kelas yang masih besar menambah implementasi penilaian sikap dan keterampilan individu menjadi kurang akurat,
- b) Jenis teknik penilaian yang digunakan objektif dan akuntabel,
- c) Kelengkapan perangkat teknik penilaian,
- d) Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian,
- e) Melakukan pelaporan penilaian secara periodik,
- f) Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai,

- g) Penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
 - h) Bentuk pelaporan penilaian sesuai dengan ranah yang dinilai,
 - i) Instrumen penilaian aspek sikap,
 - j) Prosedur penilaian berdasarkan penyelenggara penilaian.
- 2) Kendala yang dialami
- a) Kendala terkait dengan Kemampuan Tenaga Pendidik
- Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala kemampuan tenaga pendidik dalam implementasi standar penilaian adalah sebagai berikut:
- (1) Konsep tentang penilaian pada pendidik di sekolah belum merata. Mereka belum menggunakan metode yang variatif dalam melakukan penilaian peserta didik,
 - (2) Belum semua guru melengkapi perangkat teknik penilaian,
 - (3) Guru belum terlatih menyusun rubrik penilaian secara mandiri untuk ranah sikap dan keterampilan,
 - (4) Banyaknya aspek yang harus di nilai membuat guru kurang tertib dalam melakukan pelaporan penilaian secara periodik,
 - (5) Masih banyak guru dalam melakukan penilaian tidak sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku, misalnya guru dalam melakukan penilaian hanya berdasarkan nilai tes ulangan harian tanpa melakukan penilaian proses di dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu pola komunikasi dan pelaporan hasil

penilaian yang belum optimal sehingga seringkali ada beberapa masalah kesulitan belajar siswa dan penyimpangan perilaku siswa yang terlambat di deteksi dan ditangani,

- (6) Guru kesulitan membagi waktu antara tugas pokok dan tindak lanjut penilaian,
- (7) Masih ada guru yang perlu pendampingan dan pelatihan dalam menyusun instrumen HOTS baik mulai dari kisi-kisi, soal, sampai dengan tindak lanjut penilaian,
- (8) Tidak semua guru mengumpulkan kelengkapan perangkat penilaian secara lengkap.

b) Kendala terkait dengan Penilaian Sikap

Berdasarkan informasi yang yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala penilaian sikap dalam implementasi standar penilaian adalah sebagai berikut:

- (1) Instrumen sikap dan keterampilan yang dimiliki tidak dilaksanakan sepenuhnya, hanya sekedar memenuhi kebutuhan administrasi,
- (2) Agak sulit untuk menilai aspek sikap terutama dalam menyusun instrumen yang secara spesifik tepat dalam mengukur sikap,
- (3) Belum semua guru bisa menganalisis hasil penilaian dengan baik,
- (4) Penilaian aspek sikap dilakukan dengan instrumen yang bersifat kualitatif dan cenderung subjektif,
- (5) Kesulitan membuat instrumen penilaian sikap.

c) Kendala Kelengkapan Instrumen Penilaian

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala instrumen penilaian dalam implementasi standar penilaian yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- (1) Kelulusan hanya mensyaratkan nilai dengan lengkap tetapi pada rapor belum sesuai dengan SKS,
 - (2) Banyak penilaian masih di dominasi dengan metode pelaporan tugas/presentasi dan tes tertulis,
 - (3) Pemenuhan administrasi kelengkapan instrumen penilaian yang utuh:
 - (a) Kisi-kisi
 - (b) Kartu soal
 - (c) Telaah soal
 - (d) Naskah soal
 - (e) Kunci jawaban
 - (4) Dalam melayani perangkat teknik penilaian dan dalam hasil pelaporan penilaian,
 - (5) Kelengkapan perangkat teknik penilaian,
 - (6) Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian,
 - (7) Alat penilaian unjuk kerja belum dilengkapi dengan rubrik penilaian,
 - (8) Penyusunan perangkat tes keterampilan,
 - (9) Proses penilaian disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara penilaian.
- 3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah
- a) Solusi terkait dengan Kemampuan Tenaga Pendidik
- Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terkait dengan

kemampuan tenaga pendidik dalam implementasi standar penilaian adalah sebagai berikut:

- (1) Sekolah melakukan pendampingan dalam menyusun perangkat pembelajaran para pendidik. Selain itu perlu dilaksanakan IHT tentang standar penilaian,
- (2) Mengadakan *workshop* atau IHT kepada guru-guru dalam membuat instrumen penilaian aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan,
- (3) Pembekalan dan *workshop* di awal tahun pelajaran, memberdayakan MGMP sekolah untuk meningkatkan kualitas guru, mengikutsertakan guru dalam berbagai pelatihan yang relevan dan supervisi di kelas oleh kepala sekolah,
- (4) Melatih guru menyusun rubrik penilaian di bimbing oleh kepala sekolah dan pengawas pelaporan dibuat terpadu dengan satu sistem manajemen berbasis IT,
- (5) Kepala sekolah melakukan kegiatan supervisi KBM dan memberikan arahan dalam proses penilaian tersebut,
- (6) Secara khusus menyelenggarakan pelatihan pakar yang berkaitan dengan metode penilaian,
- (7) Kepala sekolah membuat suasana nyaman bagi guru di sekolah,
- (8) Kepala sekolah memberikan motivasi kepada semua guru,
- (9) Memberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi guru dan seluruh warga sekolah, solusinya adalah dengan menguatkan tim kurikulum dalam melakukan evaluasi kinerja guru. Salah satu anggota tim kurikulum adalah bagian akademik

yang diberikan tugas untuk memeriksa seluruh sistem penilaian dan lainnya,

- (10) Mengadakan pelatihan tentang pembuatan alat penilaian unjuk kerja/*performance* dan rubrik penilaiannya,
- (11) Dilakukan pelatihan penyusunan instrumen khususnya penilaian keterampilan (proyek, praktik, portofolio),
- (12) Selalu memberikan motivasi dan berbagai peningkatan kapasitas guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, melaksanakan supervisi kunjungan kelas, memenuhi alat dan bahan peraga KBM /praktikum, menambah referensi perpustakaan, dan meneruskan pelaksanaan kegiatan literasi sekolah,
- (13) Mengaktifkan kegiatan MGMP sekolah dalam proses pembuatan/penyusunan soal penilaian.

b) Solusi terkait dengan Penilaian Sikap

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terkait dengan penilaian sikap dalam implementasi standar penilaian yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- (1) Simulasi penyusunan instrumen sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sering dilakukan dengan di dampingi oleh narasumber ahli,
- (2) Mengaktifkan MGMP sekolah,
- (3) Melakukan penugasan MGMP mata pelajaran tingkat sekolah untuk membuat instrumen penilaian sikap,
- (4) Penguatan penilaian aspek sikap sehingga lebih objektif dan komprehensif.

c) Solusi Kelengkapan Instrumen Penilaian

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terkait dengan instrumen penilaian dalam implementasi standar penilaian yang dihadapi yaitu:

- (1) Menyediakan aplikasi test *online* yang memuat kisi-kisi, kartu soal, dan evaluasi,
- (2) Pengembangan ICT *Support* dalam proses penilaian berkelanjutan dan berkesinambungan bukan sebatas pada kebutuhan penerbitan buku rapor saja melainkan membentuk penilaian yang terukur setiap hari sehingga hambatan belajar dan penyimpangan perilaku siswa dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan,
- (3) Pengadaan aplikasi berbasis IT untuk pengelolaan instrumen penilaian, seperti bank soal dan analisis soal,
- (4) Melengkapi perangkat penilaian agar bisa menindaklanjuti hasil pelaporan,
- (5) Peningkatan kompetensi pendidik tentang analisis kualitatif dan kuantitatif, program *remedial* dan pengayaan,
- (6) Perlu pembiasaan penyusunan instrumen-instrumen *test*,
- (7) Menerapkan *e-raport* dalam proses penilaian di sekolah,
- (8) Terus melakukan *update* mengenai penilaian dan pengembangannya,

- (9) Melakukan IHT/*workshop* mengenai penilaian HOTS secara berkesinambungan,
- (10) Mengoptimalkan kegiatan MGMP sekolah dalam memahami mengenai penilaian HOTS,
- (11) Mempelajari dokumen prosedur dan berkonsultasi kepada pengawas,
- (12) Melakukan kegiatan penilaian harian (kognitif) secara serentak pada waktu tertentu,
- (13) Memberikan batas waktu pengumpulan perangkat penilaian tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa dalam implementasi standar penilaian, masih terdapat guru yang kurang tertib dalam melakukan pelaporan penilaian secara periodik. Masih banyak guru dalam melakukan penilaian tidak sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku. Selain itu pola komunikasi dan pelaporan hasil penilaian yang belum optimal sehingga seringkali ada beberapa masalah kesulitan belajar siswa dan penyimpangan perilaku siswa yang terlambat di deteksi dan ditangani. Artinya bahwa kompetensi guru masih bermasalah dalam melakukan proses penilaian terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.

e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa sekolah mengalami kesulitan dalam implementasi standar PTK terkait dengan pemenuhan:

- a) Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan,

- b) Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan,
- c) Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan,
- d) Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan, dan
- e) Kompetensi pustakawan sesuai ketentuan,

termasuk komponen-komponen lain seperti dibawah ini:

- a) Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
- b) Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi
- c) Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
- d) Tersedia Tenaga Teknisi Laboratorium
- e) Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
- f) Tersedia Tenaga Pustakawan

Hampir semua sekolah sampel belum bisa memenuhi tenaga administrasi, tenaga laboran dan pustakawan. Demikian pula sekolah swasta juga mengalami kesulitan untuk memenuhi ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan.

2) Kendala yang dialami

Berdasarkan informasi yang diperoleh kendala yang dialami dalam implementaasi standar PTK menurut kepala sekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Kendala terkait dengan Tenaga Pendidik

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala tenaga pendidik dalam implementasi SNP yang dihadapi yaitu:

- (1) Tidak tersedianya guru untuk setiap mata pelajaran seperti sejarah dan sosiologi,
- (2) Belum semua tenaga guru dan kependidikan bersertifikat,
- (3) Tidak semua guru honorer (non PNS) memiliki sertifikat pendidik,
- (4) Belum semua guru melengkapi perangkat teknik penilaian,
- (5) Tidak semua pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan sekolah sesuai dengan ketentuan syarat yang seharusnya,
- (6) Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM,
- (7) Untuk Indikator 1, subindikator 2, ada beberapa guru yang mengajar bidang mata pelajaran tertentu melebihi 24 JP,
- (8) Beberapa tenaga pendidik yang masih berstatus honorer belum memiliki sertifikat pendidik karena belum mengikuti PLPG atau PPG,
- (9) Untuk indikator nomor 1 masih ada guru yang belum S1, tetapi pada tahun 2018 ini guru tersebut memasuki masa pensiun.

b) Kendala terkait dengan Kepala Sekolah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala kepala sekolah dalam implementasi SNP yang dihadapi yaitu:

- (1) Kepala sekolah belum bersertifikat sebagai kepala sekolah (khususnya sekolah swasta),
- (2) Tidak semua pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan sekolah sesuai dengan ketentuan persyaratan yang seharusnya.

c) Kendala terkait Tenaga Administrasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala tenaga administrasi dalam implementasi SNP yang dihadapi adalah:

- (1) Pekerjaan administrasi dan tupoksinya saling merangkap/pekerjaan ganda,
- (2) Kepala tenaga administrasi belum bersertifikat sehingga kompetensinya tidak maksimal dalam melaksanakan tupoksinya,
- (3) Sekolah belum memiliki tenaga kepala administrasi, tenaga laboran, dan tenaga perpustakaan yang kompeten sesuai dengan ketentuan,
- (4) Belum semua tenaga pelaksana urusan administrasi berpendidikan sesuai dengan ketentuan,
- (5) Belum ada pelatihan untuk memperoleh sertifikat bagi kepala tata usaha dan kepala lab,
- (6) Tenaga urusan administrasi masih belum sesuai,
- (7) Kepala tenaga administrasi belum bersertifikat,
- (8) Tidak memiliki kepala tata usaha yang tersertifikasi dan tidak memiliki tenaga administrasi yang sesuai dengan kompetensi dan berlatar belakang pendidikan yang sesuai tugasnya,
- (9) Hanya memiliki tenaga administrasi yang berstatus PNS.

d) Kendala terkait Tenaga Laboran

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala tenaga laboran dalam implementasi SNP yang dihadapi yaitu:

- (1) Jarang ada program pelatihan bagi laboran dan pustakawan yang diselenggarakan dan bersertifikat. Tidak dapat merekrut pustakawan dan laboran yang

berijazah pustakawan atau laboran karena standar gaji yang tidak memadai,

- (2) Adanya kerusakan alat peraga yang tidak bisa langsung diperbaiki karena tidak memiliki tenaga teknisi laboratorium,
- (3) Belum ada tenaga laboran dan teknisi laboran yang bersertifikasi,
- (4) Belum ada kepala laboratorium, kepala perpustakaan, dan tenaga pustakawan bersertifikat,
- (5) Sekolah belum memiliki tenaga teknisi laboratorium yang berpendidikan sesuai ketentuan,
- (6) Kepala laboratorium dijabat oleh guru mata pelajaran yang sudah memiliki sertifikat sebagai kepala laboratorium, bukan berasal dari tenaga khusus sebagai kepala laboratorium,
- (7) Belum adanya kepala laboratorium di sekolah,
- (8) Laboran yang tersedia belum memenuhi kualifikasi sebagai laboran,
- (9) Terdapat laboran yang masih berpendidikan di bawah D1, namun sudah mengikuti diklat untuk tenaga laboran,
- (10) Terdapat laboran yang sudah bersertifikat sebagai laboran atau yang lainnya namun mengajukan pindah tugas,

e) Kendala terkait tenaga pustakawan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala tenaga pustakawan dalam implementasi SNP yang dihadapi yaitu:

- (1) Jarang ada program pelatihan laboran dan pustakawan yang diselenggarakan dan bersertifikat. Tidak dapat merekrut pustakawan dan laboran yang

berijazah pustakawan atau laboran karena standar gaji yang tidak memadai,

- (2) Belum memiliki pustakawan yang sesuai ketentuan,
- (3) Kesulitan mencari pustakawan yang memiliki kualifikasi dan bersertifikasi *linear* dengan latar belakang pendidikan,
- (4) Tidak tersedianya kepala pustakawan yang khusus,
- (5) Belum memiliki pustakawan yang menguasai *e-library*,
- (6) Tenaga pustakawan belum memiliki kualifikasi yang memenuhi,
- (7) Belum memiliki tenaga pustakawan yang profesional dan kepala perpustakaan yang ada adalah guru yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai kepala perpustakaan.

Seiring dengan perkembangan zaman apalagi di era generasi 4.0 yang mensyaratkan kompetensi berbasis teknologi informasi dan komunikasi tentu mendorong untuk melakukan *upgrading* kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada. Pelayanan kependidikan seharusnya dapat ditingkatkan atau setidaknya dapat mengikuti perkembangan zaman. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tentu saja kompetensi yang ada hari ini yang dianggap sudah memenuhi standar yang ditentukan, namun esok lusa sudah tidak termasuk dalam kategori standar mengingat era 4.0 akan mendesak optimalisasi pelayanan yang jauh berbeda.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi maka diperlukan program-program yang berdampak pada

pembiayaan program dan ketersediaan sarpras dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga hal ini akan tergantung pada ketersediaan pembiayaan yang ada.

3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah

a) Solusi terkait dengan Tenaga Pendidik

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terkait dengan tenaga pendidik dalam implementasi SNP yang dihadapi yaitu:

- (1) Memberdayakan tenaga guru dan mengikutsertakan dalam pelatihan,
- (2) Mengefektifkan dan mengefisiensi SDM yang ada,
- (3) Kekurangan guru dapat dipenuhi dengan memberikan tugas kepada guru mata pelajaran yang serumpun, sebagai contoh kekurangan guru mata pelajaran sejarah diatasi oleh guru mata pelajaran PKN atau ekonomi dan kekurangan guru sosiologi di atasi oleh guru mata pelajaran geografi,
- (4) Memberikan kesempatan kepada guru nonPNS yang belum memiliki sertifikat pendidik untuk mencari informasi dan mengikuti PPG dalam jabatan,
- (5) Pembekalan dan *workshop* di awal tahun pelajaran, memberdayakan MGMP sekolah untuk meningkatkan kualitas guru, mengikutsertakan guru dalam berbagai pelatihan yang relevan dan supervisi di kelas oleh kepala sekolah,
- (6) Mengadakan program-program *upgrading* dalam bentuk *training*, bimbingan teknis, pelatihan teknis/kursus, IHT dan berbagai program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Upaya ini diikuti dengan upaya

penyediaan sarpras berbasis ICT sebagai salah satu media untuk meningkatkan kompetensi sekaligus meningkatkan pelayanan kependidikan,

- (7) Mengadakan pelatihan dan menggiatkan MGMP sehingga tenaga pendidik mendapatkan bimbingan dan informasi terkait mata pelajaran yang diampunya dan pihak sekolah mendorong dan memfasilitasi para pendidik yang belum bersertifikasi pendidik untuk meningkatkan kompetensinya sehingga bisa terdaftar dalam program PPG.

b) Solusi terkait dengan Kepala Sekolah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi kepala sekolah dalam implementasi SNP adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala sekolah membantu pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi (contoh persuratan, pengarsipan, DLSB),
- (2) Kepala sekolah menunggu jadwal diklat penguatan kepala sekolah,
- (3) Mengadakan program *upgrading* dalam bentuk *training*, bimbingan teknis, pelatihan teknis/kursus, IHT dan berbagai program peningkatan kompetensi tenaga PTK. Upaya tersebut diikuti dengan upaya penyediaan sarpras berbasis ICT sebagai salah satu media untuk meningkatkan kompetensi sekaligus meningkatkan pelayanan kependidikan,
- (4) Kepala sekolah mengikuti seleksi calon kepala sekolah,
- (5) Kepala sekolah selalu aktif ikut serta dalam kegiatan pelatihan, seminar dan kegiatan yang berhubungan

dengan kebijakan pemerintah dalam bidang manajemen sekolah.

c) Solusi terkait Tenaga Administrasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terkait masalah tenaga administrasi dalam implementasi SNP yang dihadapi yaitu:

- (1) Mengalokasikan anggaran untuk pelatihan tenaga administrasi sesuai kompetensi yang dibutuhkan,
- (2) Memfungsikan tenaga administrasi yang ada secara optimal untuk melaksanakan tugas sebagai kepala administrasi, memfungsikan guru yang memiliki latar belakang pendidik yang sesuai untuk menjalankan fungsi tenaga laboran dan pustakawan, dan mendorong untuk meningkatkan kompetensinya,
- (3) Sekolah mengadakan perekrutan dan seleksi untuk kepala tenaga administrasi bersertifikat,
- (4) Mengangkat Pelaksana Harian kepala tata usaha,
- (5) Mengangkat tenaga administrasi yang mendesak dan diperlukan dengan persetujuan komite sekolah.

d) Solusi terkait Tenaga Laboran

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terkait kendala tenaga laboran dalam implementasi SNP yang dihadapi yaitu:

- (1) Meminta bimbingan ke sekolah lain yang sudah memiliki personel laboran atau pustakawan yang sudah sesuai dengan ketentuan,
- (2) Mengikutsertakan tenaga laboran dalam pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kualifikasi,

- (3) Walaupun tidak sesuai dengan kualifikasi namun kompetensi laboran dan pustakawan sudah baik dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya,
- (4) Rekrutmen tenaga pustakawan dan kepala laboratorium sesuai dengan kualifikasi dan kompeten di bidangnya,
- (5) Mengirim teknisi laboratorium ke pelatihan yang sesuai untuk mendukung pekerjaannya,
- (6) Mengikutsertakan guru mata pelajaran IPA ke dalam diklat kepala laboratorium,
- (7) Mengikutsertakan beberapa staf tata usaha untuk mengikuti pelatihan laboran kimia,
- (8) Mencari lembaga yang berkompeten dan bisa diajak kerja sama untuk meningkatkan kompetensi laboran dan lainnya,
- (9) Mendatangkan narasumber pada *workshop* meskipun harus mengeluarkan biaya besar.

e) Solusi terkait Tenaga Pustakawan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terkait masalah tenaga pustakawan yang dihadapi dalam implementasi SNP yaitu:

- (1) Menyiapkan tenaga yang tersedia untuk mengikuti pelatihan tentang perpustakaan,
- (2) Walaupun tidak sesuai dengan kualifikasi namun kompetensi laboran dan pustakawan sudah baik dan dapat bekerja sesuai tupoksinya,
- (3) Rekrutmen tenaga pustakawan dan kepala laboratorium sesuai dengan kualifikasi dan kompeten di bidangnya,
- (4) Menambah pustakawan yang menguasai *e-library*,

- (5) Merekrut tenaga pustakawan yang bersertifikat,
- (6) Sekolah mengadakan perekrutan dan seleksi tenaga pustakawan yang berkompetensi pengembangan profesi minimal baik,
- (7) Mengikutsertakan tenaga pendidik untuk mengikuti diklat kepala perpustakaan,
- (8) Mendatangkan narasumber pada *workshop* meskipun harus mengeluarkan biaya besar.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa dalam implementasi standar PTK, kendala yang dihadapi adalah masih adanya guru yang belum tersertifikasi. Sebagian besar sekolah tidak memiliki tenaga administrasi, tenaga laboran, dan tenaga pustakawan meskipun sudah terakreditasi A namun sebagian besar sekolah sampel masih terkendala dengan kepemilikan tenaga tersebut.

f. Standar Sarana dan Prasarana

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah kesulitan dalam implementasi standar sarpras yaitu untuk memenuhi kebutuhan:

- a) memiliki sarpras pembelajaran yang lengkap dan layak,
- b) memiliki sarpras pendukung yang lengkap dan layak,
- c) daya tampung sekolah memadai.

Adapun komponen yang sulit dipenuhi sebagai berikut;

- a) Memiliki laboratorium biologi sesuai standar,
- b) Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar,
- c) Memiliki laboratorium IPA sesuai standar,
- d) Memiliki laboratorium fisika sesuai standar,

- e) Memiliki laboratorium komputer sesuai standar,
- f) Memiliki laboratorium kimia sesuai standar,
- g) Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar,
- h) Memiliki ruang pimpinan sesuai standar,
- i) Memiliki ruang guru sesuai standar,
- j) Memiliki ruang UKS sesuai standar,
- k) Memiliki ruang tata usaha sesuai standar,
- l) Memiliki ruang konseling sesuai standar,
- m) Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar,
- n) Menyediakan kantin yang layak,
- o) Menyediakan tempat parkir yang memadai,
- p) Memiliki ruang organisasi kesiswaaan sesuai standar,
- q) Memiliki gudang sesuai standar,
- r) Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja,
- s) Memiliki tempat ibadah sesuai standar,
- t) Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa,
- u) Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa,
- v) Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan,
- w) Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar,
- x) Memiliki jamban sesuai standar,

2) Kendala yang dialami

Berdasarkan informasi yang diperoleh kendala yang dialami dalam implementaasi standar sarpras menurut kepala sekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Kendala terkait dengan Ketersediaan Anggaran

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala ketersediaan anggaran dalam implementasi standar sarpras yaitu:

- (1) Kendala dana untuk pengadaan/melengkapi sarpras belajar yang layak,
 - (2) Sekolah tidak mampu membeli secara keseluruhan sarana belajar,
 - (3) Keterbatasan dana dan lokasi untuk area parkir dan kantin yang sehat,
 - (4) Hampir semua indikator sudah tersedia namun dari sisi detail teknis seperti ukuran luas dan kelengkapan sarana penunjang belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga diperlukan pengembangan/penambahan luas dan kapasitas serta melengkapi sarana penunjang yang diperlukan. Beberapa ruang masih memerlukan pengembangan segera diantaranya perpustakaan, dan perbaikan beberapa laboratorium dan ruang kelas sementara itu, kendala yang muncul adalah pembiayaannya.
 - (5) Pada intinya kendala yang muncul adalah kemampuan pembiayaan sekolah dalam melakukan pemeliharaan, perbaikan kerusakan dan pengembangan. Sekolah yang memiliki lahan luas dengan pepohonan yang besar dan rindang serta luas dan memiliki bangunan tua membutuhkan perawatan, perbaikan dan pengembangan.
 - (6) Keterbatasan dana menjadi kendala dalam pengadaan dan pemeliharaan standar sarana prasarana.
- b) Kendala terkait dengan Ketersediaan Lahan Tanah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala ketersediaan lahan

tanah dalam implementasi standar sarpras yang dihadapi yaitu:

- (1) Kondisi lahan sempit untuk rombongan belajar yang cukup banyak dimana setiap rombongan belajar terdiri dari 36 siswa,
- (2) Untuk rapat persiapan/evaluasi kegiatan program organisasi kesiswaan tidak memiliki tempat tetap dan khusus,
- (3) Tidak dapat melakukan kegiatan yang melibatkan orang tua/masyarakat secara bersamaan dengan KBM atau kegiatan yang melibatkan banyak orang karena kesulitan lahan parkir atau ruang kelas seperti pada waktu pengambilan rapor bersama dari kelas X sampai dengan kelas XII atau pembagian rapor bersamaan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru,
- (4) Kondisi lahan merupakan tanah fasos/fasum yang berada di tengah perumahan sehingga luas lahan terbatas,
- (5) Kurang/keterbatasan ruang belajar karena luas area sekolah yang sempit,
- (6) Dalam pengelolaan lahan yang sempit perlu memaksimalkan pemanfaatannya diantaranya ketiadaan taman-taman sekolah dan tempat bermain anak karena keterbatasan lahan,
- (7) Lokasi yang berada dekat pusat kota yang berimbas pada terbatasnya lahan yang bisa dikembangkan /dibangun sehingga terkendala dalam pemenuhan standar sarpras yang sesuai dengan ketentuan terutama pada indikator-indikator berikut:

- a) Rasio luas lahan belum sesuai dengan jumlah siswa,
 - b) Kondisi lahan sekolah belum bisa memenuhi persyaratan,
 - c) Terbatasnya lahan yang dapat dilakukan untuk pengembangan gedung yang tidak menyalahi ketentuan dan aturan sebagai bangunan cagar budaya.
- c) Kendala terkait dengan Penggunaan Sarana

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala penggunaan sarana dalam implementasi standar sarpras yang dihadapi yaitu:

- (1) Penggunaan laboratorium secara bersama pada jenjang kelas yang berbeda,
- (2) Ruang laboratorium IPA belum memenuhi standar yang sesuai dimana laboratorium biologi, fisika, dan kimia masih menjadi satu ruangan,
- (3) Jumlah siswa yang melebihi kapasitas daya tampung sekolah,
- (4) Rasio jamban dan jumlah siswa,
- (5) Sekolah memiliki ruang perpustakaan yang belum sesuai standar,
- (6) Sekolah memiliki laboratorium biologi, fisika, kimia dan bahasa belum sesuai standar,
- (7) Laboratorium fisika belum sesuai standar,
- (8) Sekolah belum memiliki ruang UKS sesuai standar,
- (9) Kantin sekolah yang ada belum layak,
- (10) Sekolah menyediakan tempat parkir yang belum memadai,

- (11) Sekolah tidak menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja sehubungan dengan orientasi peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
 - (12) Luas ruang perpustakaan tidak sesuai dengan jumlah siswa,
 - (13) Tidak memiliki ruang untuk unit kewirausahaan,
 - (14) Belum memiliki laboratorium bahasa yang sesuai dengan standar,
 - (15) Belum ada pengembangan unit kewirausahaan.
- d) Kendala terkait dengan SDM terkait dengan Sarana Prasarana

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala SDM terkait dengan sarpras dalam implementasi standar sarpras yang dihadapi yaitu:

- (1) Tidak memiliki tenaga laboratorium biologi, fisika, komputer dan bahasa,
- (2) Kesulitan menyimpan barang aset negara yang sudah rusak/tidak dapat dipakai lagi,
- (3) Kendala SDM dalam mengembangkan sarpras tersebut,
- (4) SDM untuk pemeliharaan dan perawatan sarpras belum optimal dalam menjalankan tupoksinya,
- (5) SDM pengelola inventaris barang belum mampu melakukan kinerja secara optimal.

3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah

a) Solusi terkait dengan Ketersediaan Anggaran

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah bahwa solusi ketersediaan anggaran dalam implementasi SNP yang dihadapi yaitu:

- (1) Mengganti dan memanfaatkan sumber dana yang ada untuk melengkapi sarpras sesuai kebutuhan,
- (2) Menyusun rencana anggaran belanja untuk merenovasi tempat parkir dan kantin,
- (3) Mengajukan bantuan dari pihak sponsor,
- (4) Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan para orang tua siswa yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup bahkan lebih serta menyampaikan semua program sekolah yang hendak dilaksanakan dan menyampaikan kondisi yang ada dengan harapan mereka dapat ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di bidang pembiayaan melalui komite sekolah dengan tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku,
- (5) Upaya lain yang dilakukan adalah dengan berusaha mencari sumber-sumber pembiayaan berupa bantuan pemerintah, CSR BUMN/BUMD/Swasta, atau sumbangan dari alumni dengan penuh kehati-hatian sesuai ketentuan yang diperbolehkan, karena seringkali upaya ini rentan dengan upaya kriminalisasi,
- (6) Sekolah mengajukan proposal bantuan dan memaksimalkan pengalokasian dan pengelolaan sumber dana yang berasal dari bantuan pemerintah,

orang tua dan yayasan untuk memperbaiki, memelihara, menambahkan dan mengembangkan sarpras yang diperlukan untuk kelancaran proses KBM dan kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan dan diperlukan sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan menengah.

b) Solusi terkait dengan Ketersediaan Lahan Tanah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi atas persoalan ketersediaan lahan tanah dalam implementasi standar sarpras yaitu:

- (1) Berupaya memaksimalkan pemanfaatan lahan sempit dan halaman serta membangun sarana serta pihak sekolah mencoba untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan lahan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pemenuhan indikator-indikator yang terdapat pada standar sarpras,
- (2) Pembatasan jumlah peserta didik baru atau mutasi sehingga rasio luas lahan bisa sesuai dengan ketentuan,
- (3) Sekolah melakukan upaya-upaya agar kondisi lahan sekolah agar bisa memenuhi persyaratan yang sesuai ketentuan,
- (4) Sekolah memanfaatkan dan memberdayakan ruang yang ada untuk ruang perpustakaan meskipun belum sesuai standar,
- (5) Sekolah memanfaatkan dan memberdayakan ruang yang ada sebagai ruang laboratorium biologi meskipun belum sesuai standar,

- (6) Sekolah memanfaatkan dan memberdayakan ruang yang ada untuk ruang laboratorium fisika meskipun belum sesuai standar,
- (7) Sekolah memanfaatkan dan memberdayakan ruang yang ada untuk ruang UKS meskipun belum sesuai standar,
- (8) Sekolah memanfaatkan dan memberdayakan lahan yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk kantin walaupun belum memenuhi ketentuan,
- (9) Sekolah memanfaatkan ruang terbuka untuk tempat parkir meskipun belum memadai,
- (10) Sekolah tidak menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja sehubungan orientasi peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

c) Solusi terkait dengan Penggunaan Sarana

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi penggunaan sarana dalam implementasi standar sarpras yang dihadapi yaitu:

- (1) Memanfaatkan seoptimal mungkin sarpras yang ada,
- (2) Tidak mengadakan kegiatan yang melibatkan selain siswa secara bersama-sama,
- (3) Membuat jadwal penggunaan laboratorium,
- (4) Menggunakan ruang kelas setelah KBM berlangsung,
- (5) Membuat jadwal kegiatan pengambilan rapot (dibatasi jam per jenjang kelas), mengadakan kegiatan dengan berbeda hari,

- (6) Memberikan layanan konseling individual bagi yang membutuhkan,
 - (7) Pendataan dan usulan penghapusan (belum pernah terealisasi),
 - (8) Mengembangkan sarpras yang ada di jadikan dengan sarpras pendukung untuk peningkatan kualitas dan pencapaian tujuan Pendidikan,
 - (9) Memanfaatkan ruang kelas dan laboratorium agar dapat berfungsi ganda namun tidak mengganggu proses pelayanan kepada siswa. Misalnya ruang pimpinan bersama dengan kepala tenaga administrasi, ruang kelas bisa dimanfaatkan untuk laboratorium komputer,
 - (10) Membatasi jumlah rombongan belajar paralel sebanyak 8 rombongan belajar,
 - (11) Menambah ruang kelas dengan dana masyarakat,
 - (12) Pembangunan ke atas dengan perencanaan untuk 2 dan atau 3 lantai,
 - (13) Pengadaan laboratorium bahasa yang sesuai standar kepada pihak yayasan,
 - (14) Merencanakan pembangunan ruang perpustakaan yang lebih luas,
 - (15) Merencanakan pembangunan ruang unit kewirausahaan,
 - (16) Memberdayakan bangunan yang ada.
- d) Solusi terkait dengan SDM terkait dengan Sarana Prasarana

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi SDM dalam implementasi standar sarpras terhadap kendala yang dihadapi adalah:

- (1) Optimalisasi kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarpras melalui pembinaan dan pengawasan melekat berkelanjutan terhadap petugas yang bertanggung jawab,
- (2) Pemberdayaan SDM yang mampu merawat sarpras yang dimiliki.

e) Solusi dengan Menjalin Kerja Sama terkait dengan Sarana Prasarana

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi kerja sama dalam implementasi standar sarpras yang dilakukan adalah:

- (1) Menjalin kerja sama dengan alumni, komite, institusi negeri dan swasta serta LSM,
- (2) Mengajukan usulan rehabilitasi total sehingga bangunan menjadi 4 lantai dengan penambahan ruang untuk laboratorium bahasa dan ruang aula,
- (3) Kolaborasi dengan komite untuk mencari sumber-sumber pendanaan dari CSR,
- (4) Melakukan diskusi untuk mencari solusi terhadap kendala yang di hadapi.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi standar sarpras, kendala yang dihadapi yaitu sebagian besar sekolah belum memiliki laboratorium (fisika, kimia, biologi, komputer dan bahasa) maupun perpustakaan yang sesuai standar yang diharapkan. Walaupun sudah terakreditasi A sebagian

besar sekolah sampel juga merasa belum memiliki sarpras sesuai standar.

g. Standar Pengelolaan

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi diperoleh bahwa kepala sekolah merasakan kesulitan dalam implementasi standar pengelolaan pada hal-hal berikut:

- a) Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan,
- b) Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan,
- c) Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan,
- d) Sekolah mengelola sistem informasi manajemen (SIM).

Sedangkan komponen yang sulit dipenuhi yaitu:

- a) Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan,
- b) Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap,
- c) Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan,
- d) Meningkatkan daya guna pendidik dan tenaga kependidikan,
- e) Memiliki SIM sesuai ketentuan,
- f) Melakukan supervisi dengan baik,
- g) Memperoleh SIM sekolah yang memiliki 8 Sistem Informasi (SI), yaitu SI Profil (Portal Sekolah), SI Personalia, SI sarpras, SI Keuangan, SI Siswa, SI Akademik, SI Perpustakaan, Sistem *E-Learning*,
- h) Berjiwa kewirausahaan,
- i) Melaksanakan kegiatan evaluasi diri,

- j) Pemahaman terhadap visi, misi sekolah serta tujuannya yang memerlukan strategi untuk mencapainya,
 - k) Mengembangkan rencana kerja sekolah dengan ruang lingkup sesuai ketentuan,
 - l) Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan,
- 2) Kendala yang dialami
- a) Kendala terkait dengan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala dengan pemangku kepentingan terkait implementasi standar pengelolaan yang dihadapi yaitu:

- (1) Dalam perencanaan pengelolaan sekolah sulit menentukan waktu untuk dapat berkumpul bersama pemangku kepentingan,
- (2) Kesadaran peran orang tua untuk membantu meningkatkan kualitas sekolah masih rendah karena faktor ekonomi, pendidikan orang tua, dan faktor kebijakan politik pemerintah daerah Kabupaten juga berpengaruh (sejak 2014 Pemerintah Daerah memberi subsidi, dan 2017/2018 dihapus), sehingga untuk meningkatkan kesadaran peran serta masyarakat/orang tua relatif sulit,
- (3) Sulit membangun kemitraan dengan masyarakat dikarenakan mereka beranggapan bahwa sekolah sudah dibiayai oleh pemerintah, disamping kurangnya kesadaran dari pendidik itu sendiri.

b) Kendala terkait dengan Sistem Informasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala sistem informasi dalam implementasi standar pengelolaan yang dihadapi yaitu:

- (1) Belum memiliki sistem informasi yang baik sesuai dengan perkembangan teknologi,
- (2) Tidak memiliki personel yang ahli dalam sistem informasi,
- (3) Tidak memiliki sarpras sistem informasi yang lengkap,
- (4) Banyak pekerjaan yang masih dikerjakan secara konvensional,
- (5) Masih belum mempunyai sistem informasi yang modern,
- (6) Kekurangan tenaga ahli di bidang sistem informasi,
- (7) Data masih bersifat parsial dan belum terintegrasi,
- (8) Sulit mencari tenaga dari guru yang bisa membantu menangani SIM, karena kesibukan guru dalam menjalankan tugas utama mendidik/mengajar,
- (9) Memiliki SIM sesuai ketentuan.

c) Kendala terkait dengan SDM

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala SDM dalam implementasi standar pengelolaan yang dihadapi adalah:

- (1) Ketentuan yang banyak dan sulit dijangkau serta ketersediaan dan kompetensi SDM,
- (2) Belum memiliki aplikasi, sarpras untuk menerapkan SDM,

- (3) Peningkatan daya guna tenaga kependidikan masih belum berjalan dengan baik karena terbatasnya fasilitas pelatihan dan pemerintah,
- (4) SDM pengelolaan sistem belum memiliki visi yang sama,
- (5) Usia tenaga kependidikan di atas 55-58 tahun dan diperkirakan pada tahun 2020 tenaga pendidik banyak yang pensiun, dengan kondisi seperti ini sulit bagi tenaga pendidik untuk ditingkatkan peran dan fungsi mereka secara maksimal,
- (6) Belum optimal kerja sama antar penanggung jawab masing-masing bidang 8 SNP terkait,
- (7) Penyusunan pedoman pengelolaan sekolah yang *up to date* dalam menangani permasalahan yang timbul secara spesifik.

d) Kendala terkait dengan Kemampuan Kewirausahaan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala kemampuan kewirausahaan dalam implementasi standar pengelolaan yaitu:

- (1) Kepala sekolah belum memiliki wawasan kewirausahaan dalam mengelola sekolah,
 - (2) Tidak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang kewirausahaan secara spesifik untuk mengembangkan sekolah.
- 3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah
- a) Solusi terkait dengan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terkait dengan pemangku

kepentingan dalam implementasi SNP yang dihadapi yaitu:

- (1) Melakukan pertemuan bersama pemangku kepentingan dalam perencanaan pengelolaan sekolah yang dilakukan di luar jam/hari kerja dengan menggunakan media teknologi komunikasi,
- (2) Melakukan pertemuan rutin dengan pihak komite dan orang tua tentang rencana sekolah yang perlu mendapat dukungan dari mereka dan terkait dengan SIM serta sekolah berencana membuat web sekolah,
- (3) Melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar terutama wali murid,
- (4) Melaksanakan kegiatan bersama secara periodik dalam mereviu hasil kerja masing-masing bidang pekerjaan (tim masing-masing standar),
- (5) Evaluasi bersama tentang pemenuhan ketercapaian setiap indikator pada masing-masing standar,
- (6) Melakukan evaluasi diri dengan sistem yang kompatibel dengan akreditasi sekolah,
- (7) Melakukan sosialisasi dan pendekatan personal tentang pentingnya kerja sama antara sekolah, orang tua dan masyarakat serta dunia usaha.

b) Solusi terkait dengan Sistem Informasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terhadap kendala sistem informasi dalam implementasi SNP yang dihadapi adalah:

- (1) Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis tentang sistem informasi,

- (2) Merekrut SDM yang ahli di bidang sistem informasi,
- (3) Kerja sama dengan lembaga yang sudah menggunakan sistem informasi yang baik,
- (4) Memberdayakan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi IT untuk membantu mengelola SIM,
- (5) Mengikuti perkembangan zaman dengan menyusun sistem informasi yang mudah, cepat, dan transparan,
- (6) Dalam hal pengembangan SIM sekolah, maka dapat ditempuh dengan dua pendekatan yaitu: (1) melakukan kerja sama pengembangan sistem informasi dengan pihak ketiga yang membutuhkan pembiayaan yang cukup; dan (2) dengan penyederhanaan bentuk sistem informasi, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi gratis dan sederhana tanpa mengesampingkan kualitas dan aksesibilitas serta keamanan data,
- (7) Kepala sekolah membuat kebijakan pengelolaan SIM secara *offline*,
- (8) Kepala sekolah menetapkan tim pengelola SIM sekolah,
- (9) Membangun SIM sekolah berbasis TIK,
- (10) Sinkronisasi seluruh data dalam SIM, Dapodik dan sistem yang ada di pemerintah daerah,
- (11) Mengoptimalkan seluruh sarpras yang ada di sekolah,
- (12) Menerapkan prosedur kerja yang jelas dengan menggunakan dasar Standar Operasional Prosedur (SOP).

c) Solusi terkait dengan SDM

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terkait dengan SDM dalam implementasi SNP yang dihadapi adalah:

- (1) Mengikutsertakan guru dalam pelatihan-pelatihan,
- (2) Melakukan *revisi/update* pedoman pengelolaan sekolah secara berkala per tahun pelajaran,
- (3) Menyiapkan operator dan berusaha memenuhi sarpras serta mengadakan pelatihan untuk mempersiapkan SDM,
- (4) Melakukan *workshop* atau pelatihan rutin terhadap tenaga pendidik,
- (5) Memberikan pelatihan internal,
- (6) Mengidentifikasi kebutuhan SIM,
- (7) Merancang sistem informasi sesuai kebutuhan,
- (8) Memberikan peran dan fungsi yang lebih melalui peran keterlibatan dalam setiap kegiatan di sekolah.

d) Solusi terkait dengan Kemampuan Kewirausahaan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi terhadap kendala kemampuan kewirausahaan dalam implementasi SNP yang dihadapi yaitu:

- (1) Mengikuti pelatihan kewirausahaan khususnya dalam pengelolaan sekolah,
- (2) Memfasilitasi pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang kewirausahaan secara spesifik untuk mengembangkan sekolah melalui *workshop* atau pelatihan secara khusus.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa dalam implementasi standar pengelolaan, kendala yang dihadapi sebagian sekolah adalah mereka yang belum memiliki sistem informasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dengan keterbatasan SDM yang ada. Sebagian sekolah masih terdapat kendala dalam pelibatan pemangku kepentingan dalam menyusun rencana program sekolah serta kepala sekolah belum memiliki wawasan kewirausahaan dalam mengelola sekolah.

h. Standar Pembiayaan

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam implementasi standar pembiayaan terutama untuk memenuhi hal-hal berikut:

- a) Sekolah memberikan layanan subsidi silang,
- b) Beban operasional sekolah sesuai ketentuan,
- c) Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik.

Sedangkan komponen yang sulit dipenuhi yaitu:

- a) Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu,
- b) Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan,
- c) Terdapat biaya operasional nonpersonel sesuai ketentuan,
- d) Pengaturan alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya,
- e) Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan,

- f) APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya, dan laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan,
- g) Terdapat daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas.

2) Kendala yang dialami

a) Kendala terkait dengan Beban Biaya Operasional

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala biaya operasional dalam implementasi standar pembiayaan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- (1) Beban biaya operasional jika hanya disesuaikan dengan ketentuan terkadang menimbulkan kesulitan untuk melakukan inovasi sehingga hasilnya tidak maksimal,
- (2) Penambahan ruang kelas dan atau laboratorium di lantai 2 membutuhkan dukungan dana IPP karena bantuan pemerintah hanya untuk 1 lantai,
- (3) Selalu mengalami kekurangan biaya operasional,
- (4) Area sekolah yang luas dengan pepohonan yang besar dan rindang serta bangunan yang luas membutuhkan perawatan, perbaikan dan pengembangan,
- (5) Adanya biaya operasional nonpersonel yang tidak mungkin dibiayai oleh anggaran yang ada,
- (6) Adanya persoalan sinkronisasi penggunaan anggaran di sekolah dengan petunjuk teknis peruntukan anggaran dari APBD dan BOS,
- (7) Belum memadainya beban biaya nonpersonel yang besar karena keterbatasan sumber keuangan

sekolah, baik yang bersumber dari APBN/D maupun masyarakat.

b) Kendala terkait dengan Partisipasi Pemangku Kepentingan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala pemangku kepentingan dalam implementasi standar pembiayaan yang dihadapi yaitu tidak tepatnya waktu pencairan dana ke rekening sekolah sehingga laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan juga mengalami keterlambatan.

c) Kendala terkait dengan subsidi silang

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala SDM dalam implementasi standar pengelolaan yang dihadapi yaitu:

- (1) Daftar penerima subsidi silang yang ada seringkali bertambah, sehingga dalam pengalokasian mengalami perubahan sehingga dana yang bersumber dari pemerintah (BOS) yang dialokasikan untuk biaya operasional sekolah yang dihitung dari jumlah siswa yang kurang mampu menjadi tidak cukup,
- (2) Waktu yang dibutuhkan untuk *home visit* bagi siswa yang mengusulkan dana KJP mengganggu jam KBM wali kelas yang bersangkutan, terutama jika dalam satu kelas terdapat 5 orang siswa atau lebih,
- (3) Pengiriman laporan penggunaan dana KJP sebagai bantuan bagi siswa kurang mampu,
- (4) Jarang ada orang tua siswa yang bersedia membantu memberikan subsidi kepada siswa yang kurang mampu,

- (5) Sekolah tidak mengeluarkan kebijakan dalam melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu dengan pertimbangan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu mereka yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran,
- (6) Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu,
- (7) Belum tersedianya data penghasilan orang tua siswa,
- (8) Belum adanya program subsidi silang,
- (9) Sekolah belum sanggup membebaskan biaya kepada peserta didik, kecuali bagi anak guru dan karyawan yang diberikan pengurangan tarif baik tarif uang sekolah maupun tarif biaya masuk (DP, DPP, DPS).

d) Kendala terkait dengan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa kendala pelaporan keuangan dalam implementasi standar pembiayaan yang dihadapi yaitu:

- (1) Bukti pelaporan penggunaan dana dari masing-masing pertanggungjawaban kegiatan tidak segera diberikan ke bendahara,
- (2) Seringkali turunnya dana yang berasal dari APBN/APBD tidak tepat waktu, sementara berbagai program kegiatan sekolah harus sudah mulai berjalan,
- (3) Adanya perbedaan nomenklatur terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan,

- (4) Kesulitan dalam mengumpulkan laporan tepat waktu dan merekap bukti fisik yang harus ada.
- 3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah
 - a) Solusi terkait dengan Beban Biaya Operasional

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi biaya operasional dalam implementasi standar pembiayaan yang dihadapi yaitu:

- (1) Sekolah menyusun rencana kerja sekolah disesuaikan dengan dana yang tersedia. Selain itu sekolah harus menyusun skala prioritas sehingga tidak semua program bisa terlaksana dalam waktu yang cepat,
- (2) Memanfaatkan peranan wali kelas dalam sosialisasi pembiayaan pendidikan melalui Grup WA/media sosial orang tua,
- (3) Menjadikan forum musyawarah dengan orang tua siswa dan komite untuk sosialisasi kebutuhan pembiayaan sekolah,
- (4) Diadakan pertemuan rutin untuk membicarakan anggaran dari pemerintah agar mempermudah dalam membuat perencanaan anggaran,
- (5) Membuat skala prioritas kegiatan yang harus di penuhi terlebih dahulu sesuai kepentingannya,
- (6) Upaya lain yang dilakukan adalah dengan berusaha mencari sumber-sumber pembiayaan berupa bantuan pemerintah, CSR BUMN/ BUMD/Swasta, atau sumbangan dari alumni sesuai ketentuan yang diperbolehkan, karena seringkali upaya ini juga rentan dengan upaya kriminalisasi,

- (7) Kepala sekolah mengadakan bimbingan secara rutin kepada bagian keuangan,
- (8) Mencari sumber-sumber pendanaan yang sah sesuai aturan.

b) Solusi terkait dengan Subsidi Silang

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah bahwa solusi terkait subsidi silang dalam implementasi standar pembiayaan yang dilakukan yaitu:

- (1) Memanfaatkan fasilitas yang sudah ada sesuai regulasi yang mengaturnya seperti KJP, Bidik Misi, dan KJMU,
- (2) *Home visit* dilakukan oleh wali kelas di luar jam/ hari KBM,
- (3) Instrumen visitasi calon penerima KJP harus lebih teliti untuk menghindari salah sasaran,
- (4) Melakukan sosialisasi dan memberikan kesadaran tentang kriteria tidak mampu kepada siswa dan orang tua yang akan mengajukan KJP secara periodik sesuai jadwal tahap pengusulan KJP,
- (5) Meminta siswa dan orang tuanya menyerahkan laporan penggunaan dana KJP sebelum mengajukan permohonan berikutnya,
- (6) Sekolah selalu mensosialisasikan program bantuan dari pemerintah kepada orang tua/wali peserta didik terutama yang mempunyai orang tua yang termasuk golongan ekonomi lemah untuk memanfaatkan program bantuan tersebut,
- (7) Sekolah selalu berupaya memaksimalkan pengelolaan dana bantuan dari pemerintah agar bisa mendukung terlaksananya semua kegiatan

pendidikan di sekolah sesuai dengan yang telah direncanakan,

- (8) Pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi yang memiliki ranking 1 di setiap kelas pada semester 5 dalam bentuk pengembalian biaya uang sekolah (SPP) selama 1 semester,
- (9) Mencari alternatif pembiayaan dari sumbangan orang tua dan masyarakat yang dilakukan oleh komite,

c) Solusi terkait dengan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah diketahui bahwa solusi pelaporan keuangan dalam implementasi standar pembiayaan yang dihadapi yaitu:

- (1) Menyelesaikan laporan dengan cepat dan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Kota,
- (2) Melakukan koordinasi antar bidang/standar dalam penyusunan RKAS,
- (3) Menentukan SOP pencairan dana dan pelaporan penggunaan dana,
- (4) Menertibkan administrasi data keuangan,
- (5) Selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pengurus komite supaya pelaporan dilaksanakan dengan tertib.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa dalam implementasi standar pembiayaan kendala yang ditemui adalah sebagian sekolah menghadapi keterbatasan biaya operasional untuk melakukan inovasi peningkatan mutu. Kendala lain adalah bahwa laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan tidak diterbitkan tepat waktu

dikarenakan pencairan dana ke dalam rekening sekolah tidak tepat waktu/melewati rentang waktu tertentu dan perubahan/penataan sistem yang setiap tahun diperbaharui. Sebagian sekolah tidak memiliki kebijakan untuk melaksanakan subsidi silang dalam membantu peserta didik yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.

Berdasarkan hasil pendalaman terkait implementasi SNP pada satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dari kepala sekolah menunjukkan bahwa sekolah dengan akreditasi A masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan SNP.

Persepsi guru dan kepala sekolah terhadap standar nasional masih belum sama. Hal ini diduga bahwa standar terlalu detail dan rumit sehingga untuk pemenuhan pada tingkat satuan pendidikan menimbulkan kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua kepala sekolah dan guru memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap SNP. Persoalan lain adalah belum adanya kontrol terhadap ukuran ketercapaian implementasi SNP dengan bukti-bukti fisik (*evidence base*).

2. Implementasi SNP Menurut Pendapat Pengawas Sekolah

Data dan informasi dalam implementasi SNP pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber dari Pengawas Sekolah terkait dengan delapan SNP yaitu SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar PTK, standar pengelolaan, standar sarpras, dan standar pembiayaan seperti di bawah.

a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah, kesulitan dalam implementasi SKL untuk dipenuhi adalah:

- a) Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap,
- b) Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan,
- c) Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan.

Sedangkan komponen yang sulit dipenuhi:

- a) Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME,
- b) Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak, disiplin, santun, jujur, sikap peduli, percaya diri, bertanggungjawab, dan perilaku pembelajaran sepanjang hayat serta perilaku sehat jasmani dan rohani.

2) Kendala yang dialami

a) Kendala terkait Proses Pembelajaran

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa kendala terkait proses belajar dalam hubungannya dengan implementasi SKL yang dihadapi dapat disajikan sebagai berikut:

- (1) Secara umum perangkat dan proses pembelajaran serta penilaian sudah mengakomodir kompetensi dimensi sikap, namun yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa hasil dari proses pembelajaran dan penilaian masih terbatas pada lingkup sekolah,

- (2) Perencanaan yang komprehensif berkesinambungan dilaksanakan dengan berbagai contoh model dan toleransi,
- (3) Berusaha untuk mempelajari dan menyusun penilaian untuk mengatur siswa berkarakter, jujur, dan peduli,
- (4) Selama ini hasil pendidikan masih mengutamakan ukuran capaian pengetahuan (KKM), sedangkan keterampilan dan sikap belum optimal (sangat relatif). Untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi tolak ukurnya adalah tes (pengetahuan),
- (5) Memberikan pemahaman dan penjelasan tentang pengetahuan metakognitif.

b) Kendala Konsistensi Pemantauan dan Supervisi

Pada dasarnya perangkat dan proses pembelajaran serta penilaian hasil belajar sudah mengakomodir pemenuhan SKL untuk memiliki kompetensi dimensi keterampilan, yang perlu menjadi perhatian adalah konsistensi pemantauan dan supervisi agar menjamin pemenuhan kompetensi dimensi keterampilan.

3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah

a) Solusi terkait Proses Pembelajaran

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa solusi terkait proses belajar dalam implementasi SKL yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- (1) Berusaha untuk mempelajari penyusunan penilaian untuk mengukur siswa berkarakter, jujur, pandai

dengan bentuk nyata dalam kehidupan siswa di lingkungannya,

- (2) Mendorong kepala sekolah dan guru untuk terus memperhatikan kompetensi dimensi sikap baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah, dan melakukan pemantauan serta supervisi terkait kompetensi dimensi sikap,
- (3) Pembimbingan/pendampingan dan pemberian pengertian kepada sekolah (kepala sekolah dan guru) tentang makna penting pendidikan kecakapan/keterampilan dan sikap,
- (4) *Workshop* dan pendampingan secara rutin,
- (5) Mengikuti pedoman pelaksanaan pendidikan karakter.

b) Solusi terkait Pemantauan dan Supervisi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa solusi untuk persoalan pemantauan dan supervisi dalam implementasi SKL adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan pendampingan, pemantauan dan supervisi akademis serta mendorong kepala sekolah untuk melakukan pemantauan dan supervisi akademis secara konsisten terkait dengan kompetensi dimensi pengetahuan,
- (2) Melakukan pendampingan, pemantauan dan supervisi akademis serta mendorong kepala sekolah untuk melakukan pemantauan dan supervisi akademis bagi para guru secara konsisten terutama tentang kompetensi dimensi keterampilan.

Berdasarkan informasi dari pengawas sekolah kendala implementasi SKL tersebut adalah selama ini hasil pendidikan masih mengutamakan ukuran capaian pengetahuan (KKM), sedangkan keterampilan dan sikap belum optimal. Sebagian pengawas sekolah menyampaikan bahwa pemantauan dan supervisi untuk menjamin pemenuhan kompetensi dimensi keterampilan belum dilakukan secara konsisten.

b. Standar Isi

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa ada kesulitan dalam implementasi standar isi terutama untuk memenuhi hal-hal berikut:

- a) Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan,
- b) Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur,
- c) Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan.

Adapun subindikatornya, meliputi:

- a) Perangkat pembelajaran memuat karakteristik kompetensi sikap,
- b) Perangkat pembelajaran memuat karakteristik kompetensi pengetahuan,
- c) Perangkat pembelajaran memuat karakteristik kompetensi keterampilan,
- d) Perangkat pembelajaran menyesuaikan tingkat kompetensi siswa,

- e) Perangkat pembelajaran menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran,
- f) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan,
- g) Sekolah mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi,
- h) Sekolah menyelenggarakan aspek kurikulum dengan muatan lokal.

2) Kendala yang dialami

Berdasarkan informasi yang diperoleh kendala yang dialami dalam implementasi standar isi menurut pengawas sekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

a) Kepala Sekolah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam implementasi standar isi adalah sebagai berikut:

- (1) Pengembangan KTSP yang dilakukan oleh sekolah sudah mengupayakan keterlibatan seluruh unsur pemangku kepentingan. Namun demikian unsur komite seringkali hanya terlibat dalam pengesahan saja, sedangkan dalam proses pengembangannya tidak terlibat. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu yang dimiliki komite dan latar belakang pendidikan yang tidak menunjang dalam pengembangan KTSP. Sekolah swasta pada umumnya tidak memiliki komite.
- (2) Sekolah mengatur beban belajar berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Permendikbud

Nomor 59 Tahun 2014 sedangkan untuk kedalaman materi diserahkan pada masing-masing guru mata pelajaran. Tidak semua guru mengatur beban belajar tiap KD berdasarkan materi dari tiap-tiap KD,

- (3) Implementasi perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan belum dapat di implementasikan dengan baik karena tidak tersedia pedoman/panduan pelaksanaannya.

b) Tenaga Pendidik

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa kendala yang dihadapi terkait tenaga pendidik dalam implementasi standar isi adalah sebagai berikut:

- (1) Cara melakukan analisis SKL-KI-KD, menganalisis materi, modal pembelajaran dan evaluasi pembelajaran,
- (2) Menggunakan perangkat pembelajaran yang sesuai/ menyesuaikan tingkat kompetensi siswa,
- (3) Bagaimana guru mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ada pada KI dan KD, dengan mempertimbangkan jumlah siswa dan keberagaman kompetensi mereka.
- (4) Guru lebih cenderung menekankan kompetensi pengetahuan dan kurang memberikan pembelajaran yang memuat kompetensi keterampilan.

3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah

Berdasarkan informasi yang diperoleh, solusi yang dilakukan dalam implementasi standar isi menurut pengawas sekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- a) Berusaha mempelajari dan menyusun pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan kesepadanan antara penyelenggara SKS dengan UKBM,
- b) Melakukan pendampingan pada guru untuk melakukan analisis karakteristik kompetensi siswa dan melakukan pengelompokan berdasarkan karakteristik kompetensi mereka. Perangkat pembelajaran dikembangkan berdasarkan kelompok karakteristik kompetensi siswa,
- c) Melakukan pendekatan dengan kepala sekolah untuk terus mendorong komite sekolah dan yayasan agar dapat terlibat dalam pengembangan KTSP,
- d) Melakukan pendampingan pada guru untuk melakukan analisis KI, KD yang ditekankan pada pengaturan beban tiap-tiap KD berdasarkan kedalaman materi tiap-tiap KD,
- e) Penyusunan perangkat pembelajaran berdasarkan standar proses dengan rumusan indikator dan tujuan yang meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
- f) Dilakukan *workshop* dan pembimbingan pengawas secara berkala,
- g) Terus mempelajari dan menerapkan hasil analisis.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa dalam implementasi standar isi, menurut pengawas sekolah terdapat kendala yang dihadapi sebagian kepala sekolah

dimana mereka kesulitan melibatkan komite sekolah dalam penyusunan perencanaan karena permasalahan waktu bagi komite sekolah, sehingga mereka hanya terlibat pada pegehan. Sebagian guru masih ada yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ada pada KI dan KD dengan sejumlah siswa dan keberagaman mereka.

c. Standar Proses

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa kesulitan dalam memenuhi tuntutan standar proses terkait dengan hal-hal berikut:

- a) Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan,
- b) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat,
- c) Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran.

Adapun Komponen yang sulit dipenuhi:

- a) Perencanaan pembelajaran mengarah pada pencapaian kompetensi,
- b) Pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat,
- c) Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas,
- d) Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa,

- e) Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa,
- f) Melakukan penilaian otentik secara komprehensif,
- g) Memanfaatkan hasil penilaian otentik,
- h) Melakukan pemantauan proses pembelajaran,
- i) Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru,
- j) Mengevaluasi proses pembelajaran,
- k) Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran,
- l) Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan,
- m) Pembelajaran berbasis kompetensi,
- n) Pembelajaran Terpadu.

2) Kendala yang dialami

Berdasarkan informasi yang diperoleh kendala yang dialami dalam implementaasi standar proses menurut pengawas sekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

a) Kendala Tenaga Pendidik

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa kendala terkait tenaga pendidik dalam implementasi standar proses adalah sebagai berikut:

- (1) Masih banyak guru mengajar berbasis ketercapaian materi bukan ketercapaian kompetensi,
- (2) Masih banyak guru terjebak pada *mindset* lama yaitu pembelajaran berbasis materi dimana peserta didik dinyatakan mampu terkait dengan penguasaan materi,

- (3) Masih terdapat persoalan kesesuaian konsep antar mata pelajaran,
- (4) Guru masih harus mampu meminimalisir egosentrisnya,
- (5) Proses pemantauan dan supervisi pembelajaran tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya secara *sampling*,
- (6) Perubahan perilaku pembelajaran oleh guru, siswa, dan orang tua/masyarakat masih rendah,
- (7) Ada kesulitan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individu dan latar belakang mereka karena pembelajaran bersifat klasikal,
- (8) Pola pembelajaran guru cenderung menggunakan pola lama karena mereka sudah merasa nyaman.

b) Kendala karakteristik siswa

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa kendala terkait karakteristik siswa dalam implementasi standar proses adalah sebagai berikut:

- (1) Menerapkan model/metode pembelajaran yang tepat dan dapat menyesuaikan dengan budaya,
 - (2) Menerapkan pembelajaran yang sesuai karakteristik masing-masing siswa yang unik dan belajar sepanjang hayat
- 3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah
- Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh, solusi yang dilakukan terkait implementasi standar proses, menurut pengawas sekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Solusi Tenaga Pendidik

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa solusi terkait tenaga pendidik dalam implementasi standar proses adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan pendampingan pada guru agar memiliki pemahaman bahwa pembelajaran yang dikembangkan harus berbasis pada pencapaian kompetensi sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum (KD). Pendampingan ini dilakukan melalui kegiatan IHT, MGMP, dan supervisi akademis,
- (2) Mendorong guru untuk melakukan analisis KD antar mata pelajaran untuk mendapatkan konsep yang bersesuaian agar dapat dilakukan pembelajaran yang terpadu,
- (3) Melakukan perubahan paradigma bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, bahwa belajar dapat dilakukan dimana saja dan dari berbagai sumber,
- (4) Mendorong guru untuk melakukan pemetaan karakteristik siswa sehingga guru dapat membuat pengelompokan siswa berdasarkan karakteristiknya. Paling tidak guru diharapkan mampu memfasilitasi cara belajar siswa dengan karakteristik audio, visual dan kinestetis. Selain cara belajar siswa, guru dapat memperhatikan karakter kepribadian siswa seperti halnya siswa yang butuh perhatian, siswa yang mandiri, dan siswa yang perlu

peningkatan prestasi dengan pemberian motivasi khusus,

- (5) Untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai proses pembelajaran, dapat digunakan hasil pemantauan dan supervisi proses pembelajaran oleh kepala sekolah untuk ditindaklanjuti pendampingan dan pembinaan oleh guru yang membutuhkan.

b) Solusi Karakteristik siswa

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa kendala terkait karakteristik siswa dalam implementasi standar proses yang dihadapi adalah:

- (1) Peraturan Gubernur tentang PPDB dirumuskan oleh tim pengembang Dinas Pendidikan Provinsi yang terdiri dari berbagai unsur, salah satunya adalah pengawas sekolah yang berupaya memberikan masukan pada tim perumus agar jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan ketentuan,
- (2) Menerapkan berbagi modal/metode/pembelajaran dalam satu kelas,
- (3) Guru memperhatikan dan mengidentifikasi perbedaan latar belakang dan karakteristik siswa serta berusaha memfasilitasi pembelajaran yang bisa melibatkan siswa dengan berbagai latar belakang tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa dalam implementasi standar proses, kendala yang dihadapi sebagian pengawas sekolah adalah masih banyak guru mengajar berbasis ketercapaian materi, bukan berdasarkan kompetensi. Guru mengalami kesulitan ketika harus mengajar dan mengakomodir pembelajaran untuk keragaman kemampuan.

d. Standar Penilaian

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi diperoleh yang dari pengawas sekolah mengalami kesulitan dalam implementasi standar penilaian yaitu untuk memenuhi:

- a) Teknik penilaian objektif dan akuntabel,
- b) Penilaian pendidikan ditindaklanjuti,
- c) Instrumen penilaian menyesuaikan aspek,
- d) Penilaian dilakukan mengikuti prosedur.

Adapun komponen yang sulit dipenuhi:

- a) Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian,
- b) Melakukan pelaporan penilaian secara periodik
- c) Jenis teknik penilaian yang digunakan harus objektif dan akuntabel,
- d) Kelengkapan perangkat teknik penilaian,
- e) Prosedur penilaian berdasarkan penyelenggara penilaian,
- f) Prosedur penilaian dilakukan berdasarkan ranah yang akan dinilai,
- g) Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai,
- h) Instrumen penilaian aspek sikap,

- i) Instrumen penilaian aspek pengetahuan,
- j) Instrumen penilaian aspek keterampilan.

2) Kendala yang dialami

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa kendala dalam implementasi standar penilaian yang dihadapi adalah:

- a) Melakukan analisis dan memperoleh hasil serta memberikan rekomendasi yang tepat,
- b) Kelengkapan perangkat dan teknik masih rendah,
- c) Secara umum instrumen penilaian sudah baik, namun rubrik penilaian masih bermasalah,
- d) Kemampuan penyusunan alat penilaian relatif terbatas,
- e) Waktu penyusunan instrumen penilaian relatif terbatas,
- f) Guru mengalami kesulitan dalam penyusunan instrumen penilaian sehingga pengawas perlu membimbing dan memberikan contoh.

3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa solusi dalam implementasi standar penilaian yang dilakukan adalah:

- a) Melaporkan hasil analisis dan tindak lanjut,
- b) Berusaha melengkapi perangkat penilaian dan mempelajari teknik penilaian bersama guru dan narasumber,
- c) Memberikan pendampingan dan bimbingan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas rubrik penilaian,

- d) Diselenggarakan *workshop* penyusunan instrumen penilaian dengan materi pedoman penulisan/penyusunan instrumen penilaian. Selain itu, diperlukan usaha untuk menyadarkan bahwa penyusunan instrumen penilaian harus dilakukan dengan baik untuk dapat menghasilkan perangkat penilaian yang berkualitas.

Berdasarkan informasi pengawas sekolah diketahui bahwa kendala implementasi standar penilaian dihadapi guru dalam menganalisis dan memperoleh hasil pengolahan nilai serta memberikan rekomendasi yang tepat dan masih terdapat guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun instrumen penilaian. Prosedur penyusunan soal belum sepenuhnya dipatuhi sehingga instrumen penilaian tidak dapat menjamin kualitas hasil ukurnya.

e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi diperoleh dari pengawas sekolah mengalami kesulitan dalam implementasi standar PTK khususnya untuk memenuhi hal berikut:

- a) Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan,
- b) Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan,
- c) Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan,
- d) Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan.

Adapun komponen yang sulit dipenuhi:

- a) Tersedianya kepala tenaga laboratorium,
- b) Tersedianya tenaga laboran,
- c) Tersedianya kepala tenaga pustakawan,
- d) Tersedianya tenaga pustakawan,
- e) Tersedianya kepala tenaga administrasi bersertifikat,
- f) Tersedianya guru berkualifikasi minimal S1/D4,
- g) Terpenuhi rasio guru kelas dan guru mata pelajaran terhadap rombongan belajar yang seimbang,
- h) Guru yang memiliki sertifikat pendidik.

2) Kendala yang dialami

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa kendala dalam implementasi standar PTK adalah sebagai berikut:

- a) Belum adanya Perguruan Tinggi yang mendidik laboran dan pustakawan sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dituntut,
- b) Hampir sebagian sekolah belum memiliki tenaga laboran dan pustakawan sesuai kompetensi,
- c) Khususnya untuk guru non PNS masih banyak yang belum bersertifikat pendidik,
- d) Kepala sekolah SMA swasta pada umumnya tidak memiliki sertifikat kepala sekolah,
- e) Ketersediaan sertifikasi kepala tenaga administrasi sangat minim,
- f) Ketersediaan pelatihan sertifikasi kepala tenaga laboratorium yang didanai pemerintah sangat sedikit,

- g) Ketersediaan pelatihan sertifikasi kepala tenaga pustakawan yang didanai pemerintah sangat sedikit,
- h) Biaya PLPG dirasakan mahal.

3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa solusi untuk kendala implementasi standar PTK yang dihadapi adalah:

- a) Menugaskan guru sebagai tugas tambahan meskipun kualitas tidak sesuai,
- b) Menghimbau sekolah untuk memfasilitasi tenaga laboran dan pustakawan untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikasinya,
- c) Mendorong kepala sekolah dan guru untuk terus mencari peluang untuk mendapatkan kesempatan PPG,
- d) Mendorong kepala sekolah untuk mendapatkan sertifikat kepala sekolah dan terus meningkatkan kompetensi melalui berbagai kegiatan pelatihan, seminar, *workshop*,
- e) Mendorong dan memberikan pendampingan pada kepala tenaga administrasi untuk terus meningkatkan kompetensinya,
- f) Mendorong kepala sekolah untuk mengalokasikan dana untuk mengikutsertakan tenaga kepala laboratorium dalam sertifikasi tenaga kepala laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi,
- g) Mendorong kepala sekolah untuk mengalokasikan dana untuk mengikutsertakan tenaga kepala pustakawan dalam sertifikasi tenaga kepala

pustakawan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi,

- h) Mendorong guru mengikuti PLPG yang diprogramkan gratis oleh Kemendikbud.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa dalam implementasi standar PTK, kendala yang dihadapi sebagian pengawas sekolah adalah sebagian besar sekolah mengalami kesulitan dalam menyediakan tenaga administrasi, laboran dan pustakawan sesuai standar.

f. Standar Sarana dan Prasarana

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah bahwa sekolah mengalami kesulitan dalam implementasi standar PTK untuk memenuhi yaitu,

- a) Kapasitas daya tampung sekolah yang memadai,
- b) Sarpras pembelajaran yang lengkap dan layak,
- c) Sarpras pendukung yang lengkap dan layak.

Adapun komponen yang sulit dipenuhi adalah:

- a) Ruang pimpinan sesuai standar,
- b) Ruang guru sesuai standar,
- c) Ruang UKS sesuai standar,
- d) Tempat ibadah sesuai standar,
- e) Jamban sesuai standar,
- f) Gudang sesuai standar,
- g) Ruang sirkulasi sesuai standar,
- h) Ruang Tata Usaha sesuai standar,
- i) Ruang konseling sesuai standar,
- j) Ruang organisasi kesiswaan sesuai standar,
- k) Kantin yang layak,

- l) Tempat parkir yang memadai,
- m) Unit kewirausahaan dan bursa kerja,
- n) Ruang perpustakaan sesuai standar,
- o) Tempat bermain/lapangan sesuai standar,
- p) Laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer dan bahasa sesuai standar.

2) Kendala yang dialami

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah bahwa kendala dalam implementasi standar sarpras yang dihadapi yaitu:

- a) Laboran memenuhi standar kebutuhan,
- b) Ruang guru TU dan ruang BK belum mematuhi standar,
- c) Keterbatasan dana dan lahan dalam pemenuhan ragam sarpras yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan,
- d) Ruang perpustakaan yang belum sesuai dengan ketentuan dengan berbagai kondisi, antara lain luas minimnya ruang perpustakaan, sarana ruang perpustakaan, dan koleksi buku. Hal tersebut disebabkan terutama karena keterbatasan dana dan luas lahan sekolah,
- e) Ruang bermain/lapangan yang dimiliki sekolah pada umumnya belum sesuai dengan standar yang disebabkan keterbatasan dana dan luas lahan yang dimiliki sekolah,
- f) Ketersediaan laboratorium biologi, fisika, kimia yang sesuai. Kekurangan yang umum mengenai ketiga laboratorium tersebut antara lain sekolah hanya memiliki satu atau dua laboratorium, luas

ruang laboratorium yang ada belum memenuhi luas standar, kelengkapan sarana, alat dan bahan praktikum yang belum sesuai dengan standar. Adapun untuk laboratorium komputer secara umum memiliki kekurangan yaitu luas ruang dan kelengkapan laboratorium komputer,

- g) Banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium bahasa hal ini disebabkan karena ada keterbatasan dana dan lahan yang tersedia,
- h) Pada umumnya sarana yang dimiliki belum sesuai dengan standar, hal ini disebabkan karena ada keterbatasan dana dan luas lahan yang dimiliki.

3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa solusi terhadap kendala dalam implementasi standar sarpras yang dihadapi yaitu:

- a) Mengusulkan sekolah untuk membangun ruang guru, TU, BK sesuai standar,
- b) Mengusulkan kepada komite untuk merevitalisasi laboratorium bahasa,
- c) Mendorong kepala sekolah untuk mencari sumber-sumber dana lain atau bantuan dari berbagai pihak untuk melengkapi ragam sarana agar sesuai ketentuan,
- d) Mendorong kepala sekolah untuk mencari sumber-sumber dana lain atau bantuan dari berbagai pihak untuk melengkapi kebutuhan yaitu:

- (1) ruang perpustakaan agar sesuai dengan ketentuan,
- (2) melengkapi tempat bermain/lapangan agar sesuai ketentuan,
- (3) melengkapi kekurangan laboratorium biologi, fisika, kimia, bahasa, komputer agar sesuai ketentuan,
- (4) mengadakan laboratorium bahasa yang sesuai dengan standar.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa dalam implementasi standar sarpras masih terdapat kendala yang dihadapi dimana sebagian besar sekolah belum memiliki sarana seperti laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer dan bahasa sesuai standar serta sarana penunjang lainnya.

g. Standar Pengelolaan

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa sekolah mengalami kesulitan dalam implementasi standar pengelolaan untuk memenuhi tuntutan bahwa:

- a) Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan,
- b) Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan,
- c) Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan.

Adapun komponen yang sulit dipenuhi adalah ketentuan untuk:

- a) Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik,

- b) Berjiwa kepemimpinan,
- c) Mengembangkan sekolah dengan baik,
- d) Mengelola sumber daya dengan baik,
- e) Berjiwa kewirausahaan,
- f) Melakukan supervisi dengan baik,
- g) Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan,
- h) Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap,
- i) Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan,
- j) Meningkatkan daya guna pendidik dan tenaga kependidikan,
- k) Melaksanakan kegiatan evaluasi diri,
- l) Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan,
- m) Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran.

2) Kendala yang dialami

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa kendala dalam implementasi standar pengelolaan yang dihadapi yaitu tuntutan untuk:

- a) Berjiwa kewirausahaan dan melakukan supervisi akademik karena jumlah yang besar,
- b) Belum semua program sekolah terpenuhi,
- c) Melibatkan unsur komite sekolah seringkali terbatas pada pengadaan dana sedangkan perencanaan pengelolaan belum terlibat secara utuh,
- d) Memenuhi ketentuan yang berlaku bahwa supervisi dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau

guru yang memenuhi kriteria dan ditunjuk oleh kepala sekolah. Pada saat supervisi dilakukan oleh guru terjadi beberapa hambatan, antara lain guru yang disupervisi merasa kurang diperhatikan oleh kepala sekolah selain adanya hambatan egosentris yang bersangkutan. Disamping itu, pemanfaatan hasil supervisi untuk pengembangan keprofesian dan pengembangan karir guru belum maksimal. Sebagai contoh pengembangan keprofesian (keikutsertaan pelatihan, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya) berdasarkan kebutuhan guru atas dasar hasil supervisi. Sedangkan contoh untuk pengembangan karir guru yaitu dalam pemilihan wakil kepala sekolah ataupun tugas tambahan lainnya, seyogyanya menggunakan hasil supervisi sebagai salah satu syarat dalam penentuan tugas tambahan guru,

- e) Mengatasi pemanfaatan sistem informasi manajemen yang belum optimal,
- f) Meningkatkan kinerja kepala sekolah dan staf pelaksana kegiatan dalam menjalankan tugasnya sehingga mereka lebih serius dan tidak asal menjalankan sebagai sebuah rutinitas,
- g) Mengatasi persoalan sekolah yang tidak menyusun RKJM dengan benar.

3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa solusi terhadap kendala dalam implementasi standar sarpras yang dihadapi adalah:

- a) Melakukan keteladanan dalam supervisi akademik,
- b) Membuat, membina, membimbing, melatih dalam pembuatan laporan supervisi akademik,
- c) Berusaha meminimalisir kendala sekolah untuk mencapai program sekolah secara maksimal,
- d) Melakukan mediasi antara kepala sekolah dan komite sekolah agar keterlibatan komite sekolah dalam perencanaan dapat dilakukan secara komprehensif,
- e) Memberikan pendampingan pada kepala sekolah dan guru baik guru yang ditunjuk sebagai supervisor maupun yang bukan tentang pelaksanaan supervisi yang baik dan pemanfaatan hasilnya,
- f) Mendorong kepala sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan guru dan tenaga kependidikan agar dapat memanfaatkan sistem informasi manajemen dengan optimal,
- g) Memberikan arahan/pembinaan kepada kepala satuan pendidikan untuk mencantumkan target-target program yang terukur. Hal ini untuk mengukur keberhasilan dan mempermudah dalam pemantauan dan penyusunan tindak lanjut,
- h) Pembimbingan penyusunan RKJM melalui FGD.

Berdasarkan informasi tersebut bahwa dalam implementasi standar pengelolaan, kendala yang dihadapi adalah kepala sekolah mengalami kesulitan dalam mewujudkan jiwa kewirausahaan. Pemanfaatan sistem informasi di satuan pendidikan belum optimal.

Hasil supervisi pengawas sekolah belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk pengembangan sekolah. Kepala sekolah cenderung melaksanakan tugasnya sebagai kegiatan rutinitas belum adanya inovasi dan kreativitas.

h. Standar Pembiayaan

1) Indikator yang sulit dipenuhi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa sekolah mengalami kesulitan dalam implementasi standar pembiayaan untuk memenuhi tuntutan berikut:

- a) Sekolah memberikan layanan subsidi silang,
- b) Beban operasional sekolah sesuai ketentuan.

Adapun komponen yang sulit dipenuhi adalah:

- a) Pembebasan biaya bagi siswa tidak mampu,
- b) Penyusunan daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas,
- c) Pelaksanaan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu,
- d) Terdapat biaya operasional non personel sesuai ketentuan.

2) Kendala yang dialami

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa kendala dalam implementasi standar pembiayaan yang dihadapi adalah:

- a) Selama ini laporan keuangan yang dibuat sekolah dalam bentuk *hard copy*, sehingga untuk mengakses laporan keuangan harus bertatap muka dengan kepala sekolah atau petugas. Alangkah

- baiknya jika disediakan laporan keuangan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen,
- b) Memberdayakan keterlibatan orang tua dalam pendidikan di sekolah.

3) Solusi yang dilakukan dalam Menyelesaikan Masalah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawas sekolah diketahui bahwa solusi dalam implementasi standar pembiayaan yang dihadapi adalah:

- a) Meningkatkan kompetensi dengan orang tua/wali dengan komite sekolah,
- b) Menghimbau sekolah untuk mengelola dengan biaya sekolah sesuai ketentuan,
- c) Mendorong kepala sekolah untuk menyediakan laporan keuangan dalam bentuk *soft copy* yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen agar mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan,
- d) Menghimbau kepala sekolah untuk membimbing staf pengelola keuangan.

Berdasarkan hasil kajian tersebut diketahui bahwa dalam implementasi standar pembiayaan, kendala yang dihadapi kepala sekolah sebagaimana yang ditemukan sebagian pengawas sekolah, adalah bahwa sekolah belum sepenuhnya memberdayakan peran orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

3. Menurut Pendapat Cabang Dinas Pendidikan Menengah

Data dan informasi terhadap implementasi SNP pada tingkat satuan pendidikan bersumber dari Cabang Dinas Pendidikan

Menengah terkait dengan delapan SNP yaitu SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar PTK, standar pengelolaan, standar sarpras, dan standar pembiayaan sebagaimana diuraikan di bawah.

a. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta, DIY

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pendalaman dengan Balai Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta terkait dengan implementasi SNP dapat di jelaskan sebagai berikut:

1) Indikator yang Sulit dipenuhi Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta

Standar PTK, standar ini sulit dipenuhi karena dengan K-13 tenaga pendidik di balai ini termasuk berlebih untuk mata pelajaran Kimia, Biologi, Bahasa Inggris, Fisika tetapi untuk mata pelajaran Bimbingan Konseling, Olah raga dan Bahasa Indonesia, sejarah, Matematika, Prakarya, dan kewirausahaan masih kurang. Untuk tenaga kependidikan hampir di semua sekolah masih sangat kurang dari pemerintah belum ada penambahan tenaga pendidik dan kependidikan meskipun hal ini sangat berpengaruh terhadap standar proses, maupun standar penilaian.

2) Kendala yang dialami Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta

Ada beberapa guru yang mengalami kekurangan jam mengajar pada mata pelajaran Fisika, Kimia, dan Biologi sehingga harus mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan (karena di surat edaran badan

Pengembangan SDM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29277/JLL/2014 tanggal 25 November 2014 tentang sertifikat pendidik dan kewenangan mengajar guru berdasarkan kurikulum 2013) mata pelajaran tersebut dapat diakui mengajar PKWU meskipun mereka belum pernah mengikuti diklat pemantapan atau pendalaman tentang mata pelajaran tersebut. Dengan demikian guru akan mengalami kesulitan dalam penyusunan administrasi pembelajaran. Untuk tenaga kependidikan setiap pegawai merangkap beberapa tugas.

- 3) Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah
 - a) Melaksanakan pemetaan tenaga pendidik dan mengoptimalkan jam mengajar bagi guru,
 - b) Melaksanakan mutasi guru ke sekolah lain yang masih membutuhkan,
 - c) Melaksanakan pemantapan/pendalaman bagi guru PKWU dengan mengundang narasumber yang berkompeten,
 - d) Mengaktifkan dan mendorong kegiatan di MGMP.
- 4) Standar yang paling menentukan Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

Menurut Cabang Dinas Kota Yogyakarta, standar yang paling menentukan ketercapaian SKL yaitu:

 - a) Standar pendidik
 - b) Tenaga Kependidikan

Karena pendidik adalah yang melakukan perencanaan pembelajaran proses pembelajaran dan pelaksanaan penilaian sedangkan SKL akan sangat dipengaruhi oleh

ketiga standar tersebut yakni standar isi, standar proses dan standar penilaian. Dengan demikian, apabila tenaga pendidik memiliki kompetensi yang baik pada kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian maupun kompetensi sosial maka mereka akan dapat menyampaikan ilmu dan melaksanakan ketugasan sebagai guru dengan baik sehingga diharapkan SKL akan meningkat.

b. Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur

Berdasarkan informasi yang didapat dalam implementasi SNP, dapat dijelaskan bahwa Cabang Dinas Kota Malang dan Kota Batu bahwa semua kebijakan dibuat/berada di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Cabang Dinas belum bisa memberikan informasi secara detail tentang persoalan implementasi SNP.

c. Cabang Pendidikan Dinas Pendidikan Wilayah VII, Bandung, Jawa Barat

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pendalaman dengan cabang Dinas Pendidikan di Kota Bandung terkait dengan implementasi SNP dapat di jelaskan sebagai berikut:

1) Indikator yang sulit dipenuhi Cabang Dinas Kota Bandung

Cabang Dinas Pendidikan Kota Bandung menyatakan bahwa sekolah-sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi standar berikut:

- a) Standar sarpras,
- b) Standar PTK,
- c) Standar pembiayaan.

2) Kendala yang dialami Cabang Dinas Kota Bandung

Dari hasil wawancara mandalam dengan Cabang Dinas Kota Bandung, dapat dinyatakan bahwa kendala-kendala yang dialami satuan pendidikan/sekolah dalam memenuhi tuntutan SKL adalah sebagai berikut:

- a) Masih banyaknya masyarakat miskin sehingga masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi dalam mendukung pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat (menjadi polemik putus sekolah),
- b) Masih ada kekurangan pegawai yang berstatus PNS di Cabang Dinas Wilayah VII, dimana setiap seksi hanya terisi oleh tiga orang pegawai berstatus PNS sedangkan wilayah kerja sangat luas sehingga pelayanan pendidikan tidak bisa maksimal,
- c) Masih terbatasnya sarpras terkait pencapaian standar sarpras misalnya kantor KCD yang masih menumpang, terbatasnya kendaraan dinas sehingga pelayanan pendidikan di lapangan kurang maksimal,
- d) Satuan pendidikan di wilayah Kota Bandung terdapat kendala ruang kelas masih kurang sehingga ada ruang laboratorium yang digunakan sebagai ruang belajar (bantuan pembangunan RKB masih belum mencukupi), toilet siswa masih kurang, belum ada laboratorium bahasa sehingga proses pembelajaran menjadi kurang maksimal, bahkan ada beberapa sekolah yang tidak mempunyai sarana olahraga dikarenakan lahan yang sempit,
- e) Masih kekurangan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS sehingga pembayaran honor non PNS menjadi beban satuan pendidikan.

3) Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah Cabang Dinas Kota Bandung

Solusi yang ditempuh Cabang Dinas Kota Bandung untuk mengatasi persoalan SKL, sebagai berikut:

- a) Memberikan rekomendasi untuk keringanan biaya bagi masyarakat tidak mampu (KETM), untuk masyarakat yang diterima lewat jalur akademik (NHUN) namun tidak mampu secara ekonomi,
- b) Bekerja sama dan menghimbau pihak satuan pendidikan agar sekolah dapat menjalankan fungsi sosialnya terhadap warga yang kurang mampu yang rentan putus sekolah,
- c) Merencanakan bantuan beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi,
- d) Mengusulkan tambahan pegawai yang berstatus PNS kepada Kepala Dinas untuk memperkuat SDM di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII sehingga bisa mendukung program dan kebijakan serta pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- e) Mengusulkan pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII untuk Tahun Anggaran 2019 agar terealisasi,
- f) Memberdayakan tenaga honorer baik pendidik maupun tenaga kependidikan,
- g) Mengusulkan rencana peningkatan anggaran untuk bantuan sarpras di satuan pendidikan terkait pengadaan dan perluasan lahan, penambahan kuota RKB, DAK untuk sarpras (ruang perpustakaan, Aula

multievent, pembangunan toilet, ruang Lab Bahasa, Ruang Praktikum).

4) Standar yang paling menentukan ketercapaian SKL

Standar yang menentukan ketercapaian SKL menurut Cabang Dinas Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a) Standar isi,
- b) Standar proses, dan
- c) Standar penilaian.

Karena ketiga standar tersebut merupakan acuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam meningkatkan kompetensi lulusan melalui proses pembelajaran dan penilaian yang dilakukan di dalam maupun diluar kelas.

Berdasarkan data dan informasi dari kepala sekolah, pengawas sekolah dari Cabang Dinas Pendidikan Menengah dalam implementasi SNP masih mengalami beberapa kendala. Kendala ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori a) Keterbacaan, b) Keterlaksanaan, c) Ketercapaian, dan d) Keterukuran. Kategori tersebut diuraikan dibawah ini, namun persoalan keterukuran tidak menjadi fokus kajian sehingga yang dapat dijelaskan sesuai dengan data dan informasi adalah sebagai berikut:

a. Keterbacaan

Dari hasil pendalaman dapat disampaikan bahwa sebagian kepala sekolah dan guru masih belum semuanya memahami SNP dengan baik. Kepala sekolah dan guru masih mengalami kesulitan dan kendala dalam implementasi SNP karena standar tersebut masih dirasa rumit.

b. Keterlaksanaan

SNP masih belum semua dapat dilaksanakan karena adanya kesulitan dalam pemenuhan standar pada tingkat satuan pendidikan. Standar yang dirasakan sulit dipenuhi yaitu standar PTK, standar sarpras, dan standar pembiayaan. Sekolah terhadap standar tersebut tidak bisa menentukan sendiri tetapi hanya menerima dari pemerintah sehingga pemenuhan standar tersebut bergantung kuota yang tersedia.

c. Ketercapaian

Belum semua unsur dalam SNP bisa dicapai oleh sekolah yang status negeri. Namun bagi sekolah swasta yang berkategori mandiri dengan pembiayaan yang cukup, SNP dapat dicapai dengan baik. Hal ini karena sekolah swasta tersebut dapat mendanai sendiri untuk mencapai semua standar tersebut.

C. Formulasi Restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan

Dalam rangka mencari opsi formulasi restrukturisasi SNP, Balitbang mengadakan kegiatan FGD di enam kota yakni Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Malang, Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Tim Studi SNP dari Balitbang, narasumber dari akademisi dan praktisi pendidikan, perwakilan dari Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, dan Kepala Sekolah.

Pada kegiatan FGD, setiap narasumber menyampaikan makalah yang berisi pendapat dan pemikiran mereka tentang Restrukturisasi SNP, yang selanjutnya didiskusikan bersama peserta FGD.

Berikut disampaikan pendapat dan pemikiran narasumber (pakar), pembahasan pendapat dan pemikiran mereka, dan opsi formulasi restrukturisasi SNP.

1. Pendapat dan Pemikiran Narasumber

a. Prof. Dr. Abdul Azis

Menurut Abdul Azis pemahaman pendidikan yang bermutu yaitu pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa secara teratur, berencana dan berkesinambungan yang mampu melengkapi siswa dengan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk hidup dalam era sekarang dan yang akan datang.

Dalam implementasi standar maka SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL sebagai standar yang harus ditentukan terlebih dahulu karena akan mempengaruhi standar-standar lainnya terutama standar isi, standar proses, dan standar PTK.

Abdul Azis berpendapat bahwa perubahan pada SKL akan berpengaruh terhadap standar isi, proses, dan standar PTK, dengan gambaran sebagai berikut;

- 1) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. (Standar Isi

Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016),

- 2) Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai SKL. Standar proses adalah SNP yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikbud nomor 22 Tahun 2016),
- 3) Standar PTK adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan adalah kualifikasi akademik pendidikan yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan restrukturisasi SNP, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Keterampilan berpikir Abad 21,
- 2) *High-Order Thinking Skills*,
- 3) Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI),
- 4) Era *Disruptive*,
- 5) Era Industri 4.0,
- 6) Bonus Demografi Indonesia 100 tahun.

Namun demikian yang harus dilakukan bukan hanya menyesuaikan akan tetapi lebih pada antisipasi dan proaktif terhadap isu-isu di atas, bukan reaktif sudah terjadi baru mencari penyelesaian. Dengan melaksanakan langkah-langkah persiapan dengan baik diharapkan peningkatan

mutu pendidikan dan peningkatan daya saing bangsa dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam SNP harus dilakukan redefinisi, restrukturisasi, reformulasi terhadap SNP.

b. Prof. Dr. Ace Suryadi

Makalah yang dibuat Ace Suryadi berjudul “SNP dan Pendangkalan Intelektual dalam Sistem Pendidikan”. Ace Suryadi merasa kaget luar biasa ketika membaca tulisan Elizabeth Pisani, (<http://Portraitindonesia.com>) pada 5 Desember 2013, yang berjudul: Anak-Anak Indonesia tidak mengetahui betapa bodohnya mereka? (*Indonesian kids don't know how stupid they are*). Pisani tidaklah mengada-ada, dia melakukan telaahan kembali (*reanalysis*) terhadap data PISA 2012. Pisani menekankan bahwa: “setiap tiga tahun sistem pendidikan Indonesia ikut terlibat dalam *Test PISA* sebagai sebuah ritual yang memalukan.” Kenapa Pisani menyebut dengan istilah *humiliation* karena rata-rata skor tes PISA dalam Matematika, IPA dan Membaca menyiratkan sebuah kondisi yang bukan hanya sangat memprihatinkan tetapi juga memalukan bahkan mungkin ada yang menafsirkan rendahnya derajat bangsa.

Hal ini menunjukkan bahwa SNP memerlukan adanya pengukuran standar untuk memetakan ketercapaian standar. Oleh karena itu diperlukan adanya mekanisme yang memberikan informasi ketercapaian standar pada satuan pendidikan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pertanyaan, benarkah ada kekeliruan dalam berpikir (*mindset*) kita? Ace Suryadi mengambil pendapat dari Reynal Khazali bahwa

seseorang memiliki potensi “*Fixed Mindset*” dan “*Growth Mindset*”. Kondisi kita sekarang ini masih pada tahap *Fixed Mindset* yaitu:

- 1) Kemampuan yang dimilikinya adalah mutlak,
- 2) Ada pintar ada bodoh,
- 3) Diturunkan secara genetik,
- 4) Prestasi disimbulkan dengan angka (*grade*).

Menurut Ace Suryadi, kita seharusnya dalam memperlakukan pendidikan cara berpikir pada tahap *Growth Mindset* yaitu melihat;

- 1) Setiap orang mempunyai kapasitas potensial,
- 2) Potensi setiap orang bisa dikembangkan melalui pendidikan,
- 3) Berpikir kritis dan kreatif terhadap permasalahan yang nyata.

Menurut Ace Suryadi sebelum membuat atau memperbaiki standar maka perlu dipahami “*Fixed Mindset*” dan “*Growth Mindset*” terlebih dahulu. Dengan memahami hal tersebut perbaikan standar akan membawa perbaikan mutu pendidikan. Menurut Ace Suryadi bahwa siswa kita itu tergolong siswa yang bahagia tetapi bodoh. Berbeda dengan negara lain seperti Singapura pandai dan bahagia. Kita bicara tentang sistem, bagaimana dengan sistem kita dalam penyelenggaraan pembelajaran.

Ace Suryadi tidak percaya kalau yang bermasalah adalah SNP. Praktek pendidikan kita masih pada kriteria:

- 1) Menghafal teori atau konsep,
- 2) Belajar terlalu deduktif,
- 3) Kita belajar terlalu teori,
- 4) Penilaian yang terlalu vertikal (minus horisontal). Ada

anak yang bodoh di IPA tetapi di bidang olahraga bisa berprestasi tingkat nasional atau internasional. Seolah-olah hanya akademik, tetapi sekarang dengan industri 4.0 tidak lagi fokus pada akademik tetapi juga prestasi nonakademik juga penting dan dapat menjadi jalan hidupnya. Misal prestasi bulutangkis tingkat juara internasional atau lari tingkat internasional,

- 5) “*Student Centered learning*” tidak berkembang sehingga tidak membangkitkan motivasi belajar,
- 6) *Image* yang keliru dimana ada anggapan Matematika dan IPA itu sulit, sedangkan Ilmu Sosial itu hafalan,
- 7) Kemampuan literasi kurang dikembangkan sejak kecil. Perlu ditingkatkan kemampuan membaca, memahami secara cepat dan tepat, dengan prinsip membaca, menyimak menulis, menghitung, menurur dan berhitung (calistung matutun).

Kemudian menurut Ace Suryadi yang diperlukan cukup SKL dan standar isi. Standar proses, standar PTK, standar penilaian, standar pengelolaan, standar sarpras, standar pembiayaan tidak perlu. Oleh karena itu, BSNP bertugas hanya membuat pedoman penyusunan SNP. BSNP membuat pembagian tugas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dalam pencapaian SNP. Standar dibuat sesederhana mungkin sehingga dapat dikontrol ketercapaiannya.

c. Prof. Anang Santoso

Dalam diskusi, Anang Santoso menyampaikan pengalaman beliau ketika mendampingi guru SD dan SMP menjalankan K-2006 di lebih kurang 20 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi,

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, NTB, NTT, dan Jawa Timur melalui kegiatan bertajuk TEQIP (*Teachers Quality Improvement Program*), kerja sama UM dengan PT Pertamina (Persero) tahun 2010-2014, menunjukkan hal-hal berikut:

Pertama, kelemahan mendasar para guru adalah penguasaan pada materi ajar (standar isi), khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Terjadi kesalahan pemahaman dan penerapan beberapa konsep yang sangat mendasar. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia misalnya, materi mendengarkan/menyimak berubah menjadi materi membaca. KD “mendengarkan pembacaan puisi” sering diajarkan dengan cara guru menyuruh siswa membaca puisi dalam hati setelah itu membaca nyaring. Jadi, siswa tidak pernah mengoptimalkan alat pendengaran (telinga) untuk memahami informasi lisan melalui kegiatan menyimak puisi. Melalui pendampingan yang intensif kesalahan guru dapat diminimalkan. Peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui lokakarya atau *workshop* sangat penting dalam menguatkan kompetensi guru terhadap materi.

Kedua, guru kurang/tidak menggunakan media belajar yang cocok dalam mengajar. Akibatnya, pembelajaran kurang bermakna, verbalistik, dan cenderung membosankan bagi siswa. Mata pelajaran Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia (termasuk pelajaran lainnya) menuntut kehadiran media yang cocok yang dapat menarik perhatian siswa untuk beraktivitas dalam pembelajaran. Melalui pendampingan

yang intensif dalam (i) membuat media sederhana, dan (ii) memanfaatkan media dalam pembelajaran, sehingga kebosanan siswa dalam belajar dapat diminimalkan. Peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui lokakarya atau *workshop* sangat penting dalam menguatkan kompetensi guru dalam pengembangan media belajar.

Dalam konteks peraturan perundangan, yang menjadi masalah adalah implementasinya di daerah, khususnya pada guru-guru di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat dan perguruan tinggi. Pelaksanaan sosialisasi kurikulum yang sifatnya massal tidak banyak memberikan tambahan informasi bagi guru. Kalau sekarang kita berbicara K-2013, yang lebih dipentingkan bagi guru di daerah adalah “pendampingan” dari para pakar kepada guru-guru sehingga guru memperoleh pengalaman langsung dari orang-orang yang tepat dalam membelajarkan KD. Sudah bukan waktunya lagi memberdayakan guru hanya dengan lokakarya di tempat tertentu tanpa tindak lanjut ke lapangan tempat guru-guru mengajar.

Menurut Anang Santoso, Kemendikbud perlu juga memeriksa peraturan daerah (Provinsi dan Kota/Kabupaten) terkait di bidang pendidikan dan kebudayaan apakah memiliki makna dan semangat yang sama dengan peraturan perundangan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kewajiban menulis karya ilmiah bagi guru, misalnya, di banyak Kabupaten/Kota di Indonesia, mereka menafsirkan karya ilmiah dengan penelitian tindakan kelas (PTK). Padahal apabila kita lihat di peraturan perundangan di atasnya tidaklah demikian. Ini salah satu contoh.

Anang Santoso mengingatkan bahwa sebuah peraturan seharusnya bebas dari penyebab yang membuatnya kurang berwibawa. Karena itu Anang Santoso memberi masukan dalam penulisan standar agar dilakukan dengan cermat, sehingga tidak terjadi kesalahan bahasa, antara lain kesalahan penulisan/pengetikan, penggunaan istilah/kata yang tidak baku, kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca, dan kesalahan terjemahan, padanan, dan adaptasi bahasa asing.

d. Bahrul Hayat, Ph.D.

Menurut Bahrul Hayat, pada tahun 2003 mulai ada pembaruan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Ebtanas berubah menjadi UN. Guru dibuatkan UU guru. Alasan perubahan ini adalah karena ingin memegang dan berorientasi pada kompetensi yang dihasilkan. Tujuan pengubahan orientasi pendidikan dari yang semula berbasis *input*, menjadi berbasis *output*, yang disebut juga pendidikan berbasis standar. Pada akhirnya dapat disebut berbasis kompetensi, karena pada umumnya yang dimaksud dengan standar akan merujuk kepada kompetensi. Jadi dulu itu awalnya namanya standar kompetensi. Kenapa saat itu dirumuskan depalan standar? Menurut Bahrul Hayat, awalnya hanya standar kompetensi yang digagas, namun selanjutnya dengan pemikiran perlunya 7 standar lainnya disadari sebagai standar dalam bentuk *credential*. Pada saat mengelola pendidikan berbasis *input*, menurut Bahrul Hayat pemerintah kurang konsisten terhadap pelaksanaan pendidikan. Misalnya kriteria atau syarat mendirikan sekolah dengan standar sarpras yang harus dipenuhi kenyataannya ketika pemerintah mendirikan sekolah kurang

memperhatikan persyaratan dari standar yang ada. Atau ketika dulu diwajibkan guru minimal D2, pada kenyataannya tidak berjalan. Sehingga akhirnya muncul upaya untuk memaksa 7 standar ini tercapai dengan meletakkannya ke dalam UU, untuk menopang 1 standar utama yaitu standar kompetensi. Intinya pendidikan berbasis standar cukup pada standar kompetensi, 7 standar lainnya hanyalah penunjang. Namun tetap dimasukkan karena memang tujuannya adalah sebagai alat yang memaksa tercapainya standar tersebut. Pemaksaan melalui UU ternyata masih belum “*commit*”. Sudah 10 tahun lebih standar masih belum tercapai.

Kesimpulannya Bahrul Hayat sebagai berikut;

- 1) Jika standar memang harus diubah, ditekankan saja bahwa yang terpenting adalah SKL, cukup satu saja. Meskipun tujuh standar lainnya ingin dimasukkan harus diberi keterangan secara eksplisit bahwa ke tujuh standar ini memiliki kedudukan yang berbeda. Hanya sebagai penunjang agar SKL bisa tercapai,
- 2) Terkesan setelah membaca standar yang ada bahwa standar dirasakan sebagai suatu yang *over regulation* (terlalu banyak mengatur). Sedangkan aturan tersebut tidak dirasa sebagai sesuatu yang secara sadar dinilai baik. Misalnya standar guru, standar yang ada saat ini, justru sulit dipahami, kurang memandu, *statement* yang ada pada standar justru dirasa sebagai beban. Standar sarana, tertulis dengan sangat *rigid*, namun sekolah tidak benar-benar menangkap intinya apa. Standar pengelolaan terlalu banyak dan *rigid*. Harusnya standar ditulis yang penting-penting saja (*statement* sederhana), namun

mudah diimplementasikan. Beberapa negara menerapkan standar dengan bentuk *statement* yang sederhana, mudah dipahami, dan justru memandu (bukan membebankan).

Dengan demikian, hal yang perlu dikoreksi adalah bagaimana membuat dokumen-dokumen standar/sederhana dan tidak rumit. Karena dokumen-dokumen ini tidak membuat pengguna merasa terbantu, tetapi justru terlalu banyak dan menyulitkan untuk dipahami.

Saran yang diusulkan yaitu:

- 1) Perlu dibuat standar yang lebih sederhana dan dapat membuat pengguna merasa terbantu dan sebagai pemandu dalam mencapai standar tersebut. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami,
- 2) Standar itu bukan berarti semua hal harus benar-benar sama. Lebih ke arah mana pelaksanaan pendidikan dan apa yang akan dihasilkan,
- 3) Problematika standar harus dibuat setinggi apa? masalah pada rumusan standar. Yang dimaksud standar adalah kriteria minimal, tapi kenyataannya standar dianggap menjadi sesuatu yang mutlak. Standar itu seharusnya kriteria minimal, artinya sekolah bebas untuk berkreasi untuk berkembang setinggi-tingginya. Namun yang terpenting standar minimal tercapai. Jadi harus setinggi apa standar itu?
- 4) Kriteria standar yang baik: *competitiveness* (memiliki daya saing) dan *achievability* (dapat dicapai). Contoh, kenapa Singapura kemampuan matematikanya lebih tinggi dari Inggris, padahal mereka bekas jajahan Inggris. Hal ini dikarenakan arena mereka menaikkan standar lebih tinggi dari Inggris,

- 5) Standar yang terpenting yaitu SKL, ditambah 7 standar lainnya dengan kedudukannya memberikan dukungan pada SKL,
- 6) Rumusan standar dibuat sederhana, dan mudah dipahami.

e. Dr. Budiono

Menurut Boediono bahwa dari delapan standar ini ada standar yang langsung bisa mempengaruhi mutu pendidikan yaitu standar isi dan standar proses. Namun kata Boediono standar tersebut sekarang ini masih banyak masalah dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, satuan pendidikan menghendaki ada pembagian standar yang ada pada satuan pendidikan yang bisa dikontrol oleh kepala sekolah seperti standar isi, proses, dan penilaian.

Sedangkan standar PTK, sarpras, dan pembiayaan, sekolah hanya menerima saja tetapi yang memiliki peran pemenuhan adalah pemerintah. Namun persepsi yang berkembang bahwa delapan standar tersebut menjadi tanggung jawab sekolah untuk melakukan pemenuhannya. Padahal ada beberapa standar yang dapat dikontrol oleh satuan pendidikan dan ada standar yang tidak dapat dikontrol karena menjadi kewenangan pemerintah.

Pelaksanaan dari SNP sebaiknya disesuaikan dengan tingkat tugas dan tanggung jawab pelaksana di lapangan. Dengan demikian hasil pelaksanaan SNP ini dapat ditelusuri secara langsung kepada pelaksana tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan.

Pelaksanaan SNP perlu ditegaskan secara konkrit sesuai dengan tingkat tugas dan tanggung jawab masing-masing di lapangan. Dengan demikian, pengaruh pelaksanaan SNP

terhadap peningkatan mutu pendidikan dapat diukur dan pertanggungjawabannya dapat diminta secara jelas.

Mengingat bahwa mutu pendidikan ditentukan oleh proses belajar mengajar di dalam kelas, maka pelaksanaan berbagai SNP untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar di dalam kelas juga harus merupakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Dengan demikian, apabila proses belajar mengajar di dalam kelas berjalan tidak baik, maka dapat ditelusuri secara langsung kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan pelaksana tugas tersebut.

Apabila dilihat dari peningkatan mutu pendidikan maka yang perlu dikembangkan yaitu proses belajar mengajar. Oleh karena itu untuk perbaikan mutu pendidikan, maka perlu menghidupkan peran MGMP untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

f. Prof. Dr. Dawud

Dalam diskusi, Dawud memiliki pemikiran bahwa dalam penyusunan SNP perlu memperhatikan konstruk dan struktur SNP. Dibawah ini merupakan pemikiran beliau yang disampaikan.

1) Konstruk SNP

Berdasarkan konteks yang dituangkan dalam Pasal 1 PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, berikut disampaikan konstruk SNP, meliputi:

- a) Standar nasional merupakan ukuran minimal yang harus dan bisa dicapai oleh peserta didik seluruh Indonesia seusia,

- b) Sebagai ukuran minimal, standar nasional merupakan landasan dasar untuk berkembangnya kapabilitas peserta didik,
- c) Sebagai sesuatu yang harus dan bisa dicapai oleh peserta didik se-Indonesia seusia, standar nasional merupakan potensi substantif, kebutuhan dasar, kapasitas kematangan usia untuk pengembangan kapabilitas peserta didik dalam menghadapi kehidupan kini dan akan datang.
- d) Potensi substantif itu bisa berupa berpikir bebas (kreatif), bertindak terukur, bertutur komunikatif, berelasi kolaboratif, dan bersikap mandiri.
- e) Kebutuhan dasar bisa berupa kemahiran, kemampuan, dan keterampilan yang memang dibutuhkan dalam kehidupannya saat ini dan yang siap berkembang dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.
- f) Kapasitas kematangan usia didasarkan pada perkembangan fisik dan psikologis peserta didik, bukanlah hasil *framing* idealisasi orang tua atas peserta didik yang mengakibatkan peserta didik menjadi masak sebelum waktunya.

2) Struktur SNP

Berdasarkan paparan pada angka 1 dan 2, berikut pemikiran struktur SNP:

- a) Secara hirarkis, satuan pendidikan sekolah dasar menerapkan “area standar nasional” lebih dominan (misalnya 90%) daripada “area standar non-nasional” (misalnya, 10%); satuan pendidikan sekolah menengah pertama “area standar nasional” sedikit lebih besar

(misalnya 70%) daripada “area standar non-nasional” (misalnya 30%); dan satuan pendidikan sekolah menengah atas “area standar nasional” dan “area standar non-nasional” berimbang (50%:50%).

b) Area standar nasional betul-betul diarahkan untuk memberi landasan “kecakapan” hidup yang siap kembang, misalnya, di sekolah dasar berupa baca tulis hitung, penanaman kedisiplinan, pengembangan kolaborasi, dan penguatan ketahanan hidup.

(1) Dalam berhitung, misalnya di sekolah dasar difokuskan pada operasi hitung yang memang riil dan fungsional dengan bilangan angka yang kecil saja sehingga prinsip-prinsip operasi hitung menjadi bagian pola pikir dan pola tindak peserta didik. Terapan operasi hitung dengan angka-angka besar diserahkan saja dengan mesin (kalkulator, *excel*, SPSS, dsb),

(2) Dalam baca tulis, misalnya di sekolah dasar difokuskan pada penanaman pola-pola bacaan tulisan dasar untuk komunikasi kolaboratif, misalnya kelogisan, keruntutan, dan kepararelان pada satu sisi dan kesantunan, keberterimaan, dan ketepatan pada sisi yang lain,

c) Area standar non-nasional digunakan untuk pengembangan multipotensi dan multitalenta peserta didik dengan pembelajaran yang multirubrik, multimoda, dan multimedia,

(3) Multipotensi dan multitalenta difokuskan untuk pengembangan kapabilitas variatif, karier alternatif, dan potensi lebih peserta didik,

(4) Multirubrik, multimoda, dan multimedia digunakan untuk memfasilitasi pengembangan literasi peserta didik dengan memanfaatkan berbagai rubrik, moda, dan media sesuai dengan eranya.

g. Prof. Dr. Djaali

Menurut Djaali bahwa restrukturisasi itu penting, namun belum ada keinginan untuk mengubah delapan standar yang ada, karena yang lebih penting adalah bagaimana standar yang ada harus benar-benar realistis dan dapat di implementasikan. SNP sudah ada sejak tahun 2005 dengan PP Nomor 19 Tahun 2005. Dalam perjalanannya SNP menurut Djaali, ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu:

- 1) SNP memang tidak realistis (terlalu tinggi),
- 2) Perhatian pemerintah dalam implementasi SNP yang kurang.

Jadi, kemungkinan SNP memang sudah tepat, namun masih ada kesenjangan yang luar biasa antara standar dengan apa yang terjadi di lapangan. Menurut Djaali bahwa komponen paling penting dalam SNP yaitu **guru**. Namun secara kuantitas, kekurangan guru di Indonesia mencapai di atas 300.000. Secara kuantitas, jumlah guru masih sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah sekolah. Bahkan ada beberapa sekolah negeri yang jumlah guru PNSnya hanya satu, yaitu kepala sekolah. Ini belum berbicara kualitas, belum berbicara mengenai standar kompetensi gurunya, masih bicara kuantitas.

Menurutnya, jika gurunya tidak ada, bagaimana SNP bisa berjalan? Setelah saya mengamati langsung ke banyak sekolah. Fakta di lapangan, kebanyakan sekolah diajar oleh guru honorer (yang sedang menangis) karena gajinya

memprihatinkan, yaitu hanya sekitar Rp200.000,-sampai Rp300.000,- yang dibayar per tiga bulan, sementara standar guru sangat tinggi. Menurut Djaali tidak cukup lulusan sarjana yang mengajar tetapi masih perlu tambahan program PPG satu tahun. Namun banyak PPG yang kompetensinya masih di bawah standar, karena sampai saat ini PPG *regular* belum ada. Yang ada hanya proyek PPG. Jika seperti ini, jangan-jangan pendidikan nantinya akan *collapse*, sama seperti zaman dulu, yang mengajar di SD, tamatan SD sehingga muncul pertanyaan, apakah dengan standar guru yang layak mengajar saat ini dengan program (sarjana dan PPG satu tahun) dapat memenuhi jumlah guru yang diperlukan, maka program tersebut perlu dikoreksi? karena jika tidak dikoreksi, dua kali lagi masa presiden, menurut Djaali belum dapat terpenuhi. Ini belum bicara kualitas, masih bicara kompetensi, karena tidak selalu sama antara kualifikasi dengan kompetensi. Berbicara soal kualifikasi LPTK yang ada sekarang kurang lebih terdiri dari 422 perguruan tinggi, tetapi yang negeri hanya 12 universitas. Ditambah 30 universitas negeri yang FKIP universitas negeri. Sebagian besar PTS yang hampir dipastikan, meskipun mereka sudah sarjana pendidikan, sebetulnya secara kualifikasi tidak memenuhi. Kompetensinya sangat jauh di bawah standar. Pendidikan saat ini berkejaran dengan kemajuan teknologi sehingga standar sudah dibuat macam-macam, kemudian menyesuaikan kurikulum, sementara kemampuan kita ada di mana?

Menurut Djaali, lebih baik mengesampingkan mengenai SNP apakah perlu dikoreksi, apakah harus ditambah atau dikurangi. Karena yang terpenting adalah evaluasi seluruh

Permendikbud mengenai SNP. Jangan sampai ini hanya momok atau mimpi yang tidak akan bisa tercapai. Karena pada hakikatnya semua inti pelaksanaan ada di guru. Bila berbicara standar isi, yang melaksanakan adalah guru. Apalagi standar proses, yang terlibat langsung adalah guru. Guru sudah mati-matian berorientasi pada konten, masih belum sampai. Apalagi ditambah prioritas pemerintah untuk melaksanakan pendidikan karakter. Pendidikan karakter seharusnya sudah melekat pada guru. Karena di dalamnya sudah harus ada keteladanan. Maka dari itu, penting untuk mengevaluasi kembali standar-standar yang sudah ditetapkan dengan Permendikbud, mulai dari standar guru, SKL, kemudian standar isi, dan lain lain. Apakah standar isi sudah tepat? karena selama ini yang terlihat konten terlalu banyak. Meskipun sudah direduksi, masih tetap banyak. Dan ini menjadi masalah dalam pendidikan karakter, karena terlalu banyak konten yang harus diajarkan, maka berkurang kendali guru untuk internalisasi nilai, untuk terjadinya ekstrakurikuler, padahal yang memberikan kontribusi besar untuk pendidikan karakter. Contoh fenomena di sekolah yang cukup bagus, di sana memang memberikan penekanan kepada pendidikan karakter. Konsekuensinya, mereka menggunakan jam belajar lebih lama dari sekolah biasa. Dan itu masih keteteran untuk melaksanakan standar pendidikan. Padahal ini dengan guru yang bagus, bukan guru honorer seperti yang disebutkan di atas.

Saran dari Djaali, perlu mengkaji standar-standar nasional pendidikan, dan untuk melakukan studi implementasi dan harus benar-benar studi yang mendalam dan langsung pada satuan pendidikan dalam menerapkan SNP. Nantinya hasil

studi ini yang menjadi masukan untuk memperbaiki standar. Menurut Djaali, jangan menargetkan standar terlalu tinggi, yang terpenting bagaimana implementasinya agar tidak ada kesenjangan antara standar dengan apa yang terjadi di lapangan.

Masalah lain, pada LPTK saat ini masih belum dapat menghasilkan guru yang sesuai standar dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk menghasilkan guru yang baik menurut Djaali, program PPG harus berasrama penuh dan minimal satu tahun sebagai pembiasaan menumbuhkan karakter pendidik.

Kesimpulannya adalah peran guru memang yang paling penting dalam memenuhi standar pendidikan. Namun demikian masih tetap diperlukan target standar yang jelas, oleh karena itu dapat dilanjutkan penelitian tentang standar guru.

h. Prof. Dr. Djemari Mardapi

Menurut Djemari Mardapi, berangkat dari perubahan demi perubahan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) hingga K-2013 dan diikuti dengan perbaikan K-2013 belum menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan yang berarti. Peningkatan penghasilan guru dengan adanya tunjangan sertifikasi guru juga belum memberi dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan, dan kemungkinan ada dampak terhadap ekonomi guru.

Hasil PISA yang dilaksanakan tahun 2012 menunjukkan adanya hubungan antara GDP perkapita dengan rerata Matematika, namun hubungannya tidak linear. Indonesia yang berpenghasilan rendah rerata hasil PISAnya juga

rendah yaitu 375. Namun GDP perkapita Vietnam yang sama dengan Indonesia namun memiliki rerata skor Matematika yang tinggi yaitu sekitar 510. Hal lain yang menarik adalah Qatar yang GDP-nya tinggi namun hasil PISA-nya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penghasilan negara yang rendah kualitas pendidikan juga bisa tinggi.

Terdapat hubungan antara penghasilan guru dan prestasi matematika siswa, namun hubungannya tampak tidak linear juga. Hal yang menarik adalah penghasilan guru matematika Indonesia dan Rumania adalah sama namun prestasi matematika siswa Indonesia adalah 375 dan Rumania adalah 450. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang berkualitas.

Kondisi pendidikan yang dihadapi saat ini tentu perlu dianalisis dan dievaluasi untuk mencari solusi yang tepat. Salah satu usaha yang dilakukan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud adalah melakukan restrukturisasi SNP.

Pengembangan SNP harus memperhatikan fenomena pergeseran kecakapan pada abad 21. Beberapa kajian menunjukkan bahwa ada tiga komponen yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan peserta didik, yaitu, Literasi Dasar, Kompetensi, dan Karakter. Literasi Dasar meliputi literasi membaca, numerasi, literasi IPA, literasi TIK, literasi finansial, literasi budaya dan bermasyarakat. Komponen kompetensi meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Komponen ketiga yaitu karakter yang meliputi rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, kepemimpinan, serta kepekaan sosial dan budaya.

Kecakapan yang diperlukan pada abad 21 tentu menjadi acuan dalam melakukan restrukturisasi SNP.

Pertanyaan pertama dalam pengembangan SNP adalah berapa standar yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran yang bermutu sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu. Mutu pendidikan diukur pada pencapaian kemampuan lulusan dibandingkan dengan SKL. Pada masa UN kriteria kelulusan sebesar 5,50 dirasa terlalu tinggi sehingga diturunkan. Hampir semua sekolah menetapkan kriteria ketuntasan minimal 75 namun tagihan sebesar 55 sulit dipenuhi. Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan kita masih rendah. Sejalan dengan itu hasil PISA menunjukkan hasil yang sama dengan hasil UN. Jadi yang salah bukan standarnya namun mungkin pada strategi pembelajaran di kelas. Pelaksana pembelajaran di kelas adalah guru, sehingga perlu dievaluasi standar kompetensi guru termasuk kompetensi melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dan implementasi kompetensi harus diamati di kelas.

Kinerja guru ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah terutama dalam melakukan pembagian tugas mengajar dan tugas lainnya. Kepala sekolah harus memantau pelaksanaan pembelajaran dan hasil pembelajaran di kelas. Hasilnya digunakan untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Kepala sekolah juga harus memotivasi guru mengajar dan membangun suasana belajar dan mengajar yang nyaman.

Jumlah SNP sebanyak delapan tampaknya terlalu banyak dan selama ini sulit untuk dipenuhi. Untuk itu perlu disederhanakan menjadi beberapa standar yang esensi saja. Pertama, tentu perlu ada SKL karena standar ini

menunjukkan kemampuan lulusan yang diharapkan untuk bekal melanjutkan studi atau untuk bekerja. Pencapaian SKL harus didukung oleh bahan ajar atau materi ajar, sehingga diperlukan standar isi. Untuk mengolah standar isi agar dicapai kompetensi lulusan perlu ada proses pembelajaran. Pelaku proses pembelajaran adalah guru dan yang mengelola guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran adalah kepala sekolah. Untuk mengetahui tingkat pencapaian SKL diperlukan sistem penilaian yang akurat.

Menurut Djemari Mardapi, berdasarkan analisis di atas maka diperlukan 5 SNP untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Standar tersebut adalah: 1) SKL, 2) standar isi, 3) standar proses pembelajaran, 4) standar pendidik dan kepala sekolah, dan 5) standar penilaian. Standar proses pembelajaran merupakan standar yang penting karena cepatnya perkembangan teknologi komunikasi, mengharuskan guru mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Siswa dapat memperoleh informasi melalui jaringan internet sehingga guru harus cerdas membuat siswa aktif belajar.

Menurut Djemari Mardapi bahwa semua standar tersebut harus dilaksanakan dengan saling mendukung. Keberhasilan pelaksanaan tersebut ditentukan oleh partisipasi masyarakat, termasuk orang tua, dengan dukungan pemerintah daerah beserta anggota legislatif.

i. Prof. Dr. Farida Hanum

Menurut Farida Hanum, bahwa sesuai penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang SNP, pendidikan di Indonesia dalam konteks

pembangunan nasional pada hakekatnya mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- 1) Sebagai pemersatu bangsa,
- 2) Sebagai penyamaan kesempatan,
- 3) Sebagai pengembangan potensi diri.

Dari tiga fungsi tersebut, pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Pertanyaan yang sering muncul terhadap SNP dalam implementasinya adalah:

- 1) Apakah benar SNP selama ini telah berhasil dalam mencapai tiga fungsi di atas?
- 2) Bisakah SNP berfungsi sebagai pemersatu bangsa?

Menurut beberapa pemerhati pendidikan dalam tulisan-tulisan mereka tidak jarang mengkritisi keberadaan SNP, yang dianggap justru memperlihatkan perbedaan dan ketimpangan yang sangat mencolok dari kualitas pendidikan di Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, antara daerah maju dan daerah tertinggal. Apalagi temuan data dan kondisi satuan pendidikan di wilayah yang tertinggal dalam delapan standar pendidikan tersebut, kurang diikuti oleh perbaikan-perbaikan yang konsisten oleh pihak terkait dan yang bertanggung jawab pada masalah pendidikan. Ketimpangan sarpras pendidikan dan sumber daya pendidik yang sangat mencolok antara sekolah yang berkualitas baik dengan sekolah pinggiran dan di daerah tertinggal, jauh dari rasa

keadilan. Hal ini tidak jarang menimbulkan rasa kecemburuan sosial yang tinggi bagi satuan pendidikan dan daerah yang pendidikannya masih sangat jauh dari ukuran SNP. Rasa kecewa dan rasa tidak adil ini sering berakibat dan menimbulkan apatis bagi praktisi pendidikan. Hal-hal sosiologis inilah yang belum mendapat porsi dalam menentukan delapan SNP tersebut.

Dalam hal berfungsi sebagai penyamaan kesempatan juga banyak dikritisi dan sering menimbulkan pertanyaan besar, antara lain:

- 1) Apakah benar dengan adanya SNP dapat menciptakan kesempatan yang sama?
- 2) Apakah sebenarnya justru memacu ketimpangan pendidikan?

Realitas yang ada menunjukkan bahwa dari temuan-temuan dan data penilaian delapan SNP yang rendah jarang sekali ditindaklanjuti dengan komitmen untuk perbaikan-perbaikan secara khusus, terpadu dan berkelanjutan. Bahkan hasil yang kurang baik tersebut tidak jarang berdampak teguran bahkan hukuman bagi sekolah yang kurang berkualitas tersebut, terutama dari pejabat daerah yang merasa malu dengan kondisi tersebut. Hal tersebut selanjutnya berdampak pada ketidakjujuran satuan pendidikan dalam mengevaluasi diri.

Demikian pula dengan fungsi sebagai pengembangan potensi diri, SNP kurang dapat berfungsi sebagaimana diharapkan, karena implementasi SNP menyamakan ukuran keberhasilan antara satuan pendidikan yang berada di perkotaan, pedesaan dan daerah yang khusus serta tertinggal. Seyogyanya ada klasifikasi menurut kondisi

daerah, agar pemenuhannya dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Kondisi masyarakat dan wilayah yang berbeda perlu mendapat perhatian dalam membuat kebijakan, agar pengembangan potensi diri dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada.

Menurut Farida Hanum, sebagai pedoman mencapai kualitas pendidikan, keberadaan SNP masih tetap diperlukan, namun harus direvisi sesuai dengan rumusan masukan-masukan dan kritik-kritik yang positif dan membangun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain;

- 1) Dalam revisi SNP, instrumen pengukuran perlu disesuaikan dengan perbedaan kondisi masyarakat, kondisi geografis, kondisi satuan pendidikan, kondisi sumber daya dan sumber dana yang tersedia,
- 2) Perlu ada klasifikasi SNP daerah perkotaan, pedesaan dan daerah khusus,
- 3) Perlu dibangun kesadaran bagi satuan pendidikan maupun dinas pendidikan, bahwa evaluasi diri sekolah (EDS) harus dilaksanakan dengan jujur sehingga potret mutu merupakan potret nyata yang ada pada satuan pendidikan tersebut,
- 4) Ketika fakta dan data tentang kondisi riil tentang standar mutu suatu satuan pendidikan atau wilayah yang kondisinya masih kurang memenuhi standar yang ditetapkan, maka perlu ada tindak lanjut perbaikan yang berkesinambungan, seperti perbaikan sarpras, perbaikan kompetensi guru, perbaikan pada jalannya proses pendidikan, dan lainnya,
- 5) Instrumen standar yang dipakai untuk mengukur seyogyanya tidak sama untuk semua wilayah. Perlu

disesuaikan dengan pemetaan tentang kondisi kualitas pendidikan di wilayah tersebut,

- 6) Perlu memperhatikan kondisi satuan pendidikan yang diukur dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, status sosial ekonomi dan karakteristik lingkungan sosial tempat satuan pendidikan,
- 7) Butir-butir pengukuran setiap standar seyogyanya dibuat tidak terlalu banyak, namun mampu memberikan informasi dan gambaran tentang hasil ukuran dari setiap standar. Artinya jelas mana yang sudah baik dan mana yang harus ditingkatkan.

SNP sebagai sebuah pedoman sekaligus ukuran untuk mencapai mutu pendidikan di Indonesia masih dibutuhkan. Namun perlu direvisi sesuai dengan data evaluasi implementasi delapan SNP tersebut di setiap wilayah di Indonesia. Gambaran tentang keberadaan hasil evaluasi terhadap masing-masing standar, seharusnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi. Kedepan, dari pemetaan hasil data evaluasi implementasi tersebut dapat diketahui standar dan bagian mana yang sudah baik dan masih kurang, apa kendala yang dialami oleh satuan pendidikan. Dengan demikian hasil revisi ke depan dapat bermanfaat, artinya bila revisi dilakukan harus berbasis data evaluasi implementasi dari delapan SNP.

j. Prof. Dr. Haris Anwar Syafrudie

Pada saat diskusi dengan Haris Syafrudie, beliau menyoroti bahwa dalam pendidikan kita selama ini siswa disibukkan dengan kegiatan hafalan. Lomba yang terbanyak untuk menghafal, dan banyaknya menguasai ilmu pengetahuan. Masyarakat dan orang tua memahami pendidikan adalah

hafal semua materi pelajaran, dilatih dan bangga dengan seberapa banyak anak hafal bukan bagaimana berpikir kritis. Belum nampak pada standar isi membahas tentang berpikir kritis, oleh karena itu, sudah saatnya unsur-unsur berpikir kritis dimunculkan pada standar isi. Tumbuh suburnya perpecahan di kalangan masyarakat karena berita bohong alias *hoax*. Karena generasi mendatang tidak dilatih dengan berpikir kritis, masyarakat Indonesia rentan termakan *hoax*. Kini siswa dilatih mampu membaca. Siswa dilatih dapat memahami substansi, tapi tidak dilatih untuk kritis, kritis membaca teks, kritis membaca kehidupan dan kritis untuk selalu memposisikan diri.

Lebih lanjut menurut Haris Syafrudie, ujian sekolah kita lebih banyak menggali hafalan, ujian dan evaluasi belajar di sekolah atau di perguruan tinggi yang cenderung mementingkan hafalan. Lebih banyak soal bentuk pilihan berganda, atau mengisi titik-titik. Kalau dibilang tidak ada, maka sangat jarang diberikan soal *essay*, dimana seseorang harus menuangkan konsep pemikiran dan bahkan memberikan dan mengemukakan ide-ide baru. Sistem hafalan pada persekolahan kita selama ini hanya membuat seseorang “mengiyakan” pendapat atau pemahaman seseorang yang dianggap sebagai panutan. Layaknya sapi dicocok hidungnya, seseorang tidak terbiasa kritis mempertanyakan sesuatu. Apabila generasi mendatang bangsa ini mulai dikenalkan dengan berpikir kritis maka berita bohong tidak mudah tersebar, dan Indonesia akan lebih toleran, dewasa dan lebih adem tenteram dan apabila generasi mendatang mulai dikenalkan dengan berpikir kritis, maka kejayaan penduduk pulau Jawa yang pada 800 tahun

sebelum Masehi sudah berhasil membangun tempat peribadatan megah yang bernama Borobudur akan kembali.

Terkait dengan SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan siswa. Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Haris Syafrudie berpendapat bahwa jenis pendidikan pada jenjang SD, SMP, maupun SMA adalah pendidikan akademik. Semua materi yang disampaikan guru dan yang dipelajari siswa adalah pengetahuan akademik. Apa yang dipelajari siswa lebih banyak kepada aspek kognitif dan sangat sedikit sekali aspek psikomotor seperti di sekolah kejuruan. Sepatutnya kata kompetensi digunakan pada jenis pendidikan kejuruan bukan jenis pendidikan akademik. Di sekolah kejuruan siswa dituntut terampil selain tahu, karena kompetensi yang terkandung di dalamnya merupakan penguasaan tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Kompetensi di sekolah kejuruan melatih keterampilan pengetahuan dan sikap, sementara untuk sekolah umum hanya mengutamakan pengetahuan, seharusnya siswa di sekolah umum dinilai seberapa siswa tahu bukan kompeten. Pada hakekatnya kompetensi merujuk pada karakteristik yang mendalam dari seseorang, yaitu karakteristik kinerja individu dalam pekerjaannya. Ia dikenal juga dengan *an underlying characteristics of an individual which is causally related to criterion-referenced effective and or superior performance in a job or situation* (Mitrani, 2002). Kompetensi mengandung makna kepribadian yang melekat pada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi dalam tugas pekerjaan dan melakukan kinerja. Standar ini

hendaknya hanya diberlakukan di sekolah kejuruan saja, bukan ditagihkan di SD, SMP dan SMA.

Terkait dengan standar PTK, Haris Syafrudie berpendapat bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a). Kompetensi pedagogik; b). Kompetensi kepribadian; c). Kompetensi profesional; dan d). Kompetensi sosial. Pada kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang berisi pengetahuan sikap dan keterampilan, masih ditambahkan kompetensi kepribadian dan kompetensi lain, bukankah dalam kompetensi sudah ada unsur sikap, demikian juga dengan kompetensi sosial. Keempat kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial) implementasinya sulit diukur, karena kriterianya beragam. Kriterianya tidak sama pada satu wilayah dengan wilayah lain di Indonesia. Usulan penulis, mestinya sebagai agen pembelajaran kompetensi yang dituntut hanya kompetensi mengajar saja, karena dalam kompetensi mengajar sudah ada semua pengetahuan tentang mengajar, semua keterampilan tentang menyelenggarakan belajar mengajar dan semua sikap relevan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

k. Dr. Heru Tiyono

Heru Tiyono membahas kaitan delapan standar dalam SNP. Semua orang tahu bahwa guru menjadi ujung tombak dalam mencapai mutu keluaran pendidikan yang tinggi. Artinya, jika standar yang lain tercapai tinggi tetapi standar guru tidak tercapai, maka tetap saja mutu pendidikan akan rendah. Tetapi dalam SNP saat ini ketentuan standar guru digabungkan dengan personel lain di sekolah di dalam

Standar PTK. Memang guru bukan satu-satunya penentu mutu siswa, namun menjadi penentu yang paling penting, sehingga penulis berpendapat standar guru sebaiknya ditetapkan tersendiri.

Standar guru seyogyanya mencakup ketentuan minimum tentang kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, kompetensi dalam mengerjakan soal-soal UN/Ujian berstandar Nasional, dan kinerja pelaksanaan proses belajar mengajar yang membuat siswa menyukai belajar, terlibat dalam proses, dan memahami ilmu yang diajarkan guru, serta kewajiban mengikuti pelatihan materi-materi penting tertentu minimal satu kali dalam tiga bulan.

Penulis pernah mendapat informasi langsung dari beberapa guru di suatu SD di kota besar, bahwa mereka sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah mendapat semacam *refresher training* tentang mata pelajaran, sehingga mereka mengajar berdasarkan buku yang ada dan ingatan yang mungkin juga sudah memudar. Dapat dibayangkan bagaimana kualitas murid di sekolah tersebut.

Standar guru yang baru perlu mengatur proses asesmen yang jelas dan objektif untuk mengukur apakah standar telah dilaksanakan dan dicapai oleh guru yang dinilai. Yang perlu ditekankan, pengukuran pemenuhan standar guru tidak hanya bersifat administratif, namun yang paling utama adalah proses belajar mengajar di kelas dan penilaian dari murid terhadap guru yang dinilai. Asesmen kewajiban administratif guru sebaiknya diminimalkan.

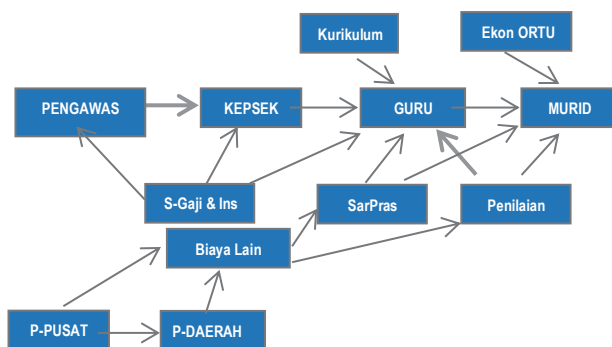
Sampai saat ini kualitas pendidikan ditengarai masih rendah karena kualitas guru dalam mengajar yang masih rendah. Berbagai program peningkatan kualitas guru telah diberikan oleh pemerintah sehingga patut di apresiasi, namun demikian untuk efektivitas dan dampaknya masih perlu dievaluasi. Melalui pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan E. Nurzaman, pemerintah memberikan pengakuan, bahwa “Kehadiran guru yang profesional dan memahami serta menguasai kecakapan abad 21 memegang peranan penting dalam mewujudkan peserta didik yang cerdas, tangguh, mandiri dan mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia dengan tetap menjunjung tinggi budaya dan karakter bangsa.” (<https://edukasi.kompas.com/read/2018/07/01/00505311/guru-ujung-tombak-keberhasilan-implementasi-kurikulum-2013>. Diakses pada 10-08-2018).

Guru yang berkualitas tinggi tentu saja tidak dapat bekerja dengan baik jika tidak ada dukungan dari kepala sekolah yang baik dan sarpras yang memadai. Standar kepala sekolah ada baiknya diatur tersendiri mengingat pengaruh yang sangat kuat dari kualitas kepala sekolah terhadap kualitas pendidikan di suatu satuan pendidikan telah dibuktikan oleh berbagai kajian.

Tugas pemerintah pusat dan daerah sebaiknya diatur dalam standar secara eksplisit sehingga dapat diukur pemenuhannya, misalnya dalam pemenuhan hak-hak guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Hubungan keterkaitan pemenuhan antar standar dapat disajikan sebagaimana pada gambar berikut. Tanda panah menunjukkan berpengaruh secara langsung, dari gambar

terlihat guru yang berkualitas (berkinerja tinggi) secara langsung mempengaruhi kompetensi lulusan. Guru yang berkualitas dipengaruhi secara langsung oleh kepala sekolah yang berkualitas, sarpras yang memadai, dan sistem gaji dan insentif yang baik. Kinerja kepala sekolah secara langsung dipengaruhi oleh pengawas yang baik.



Gambar 2. Keterkaitan pemenuhan antar standar

Kajian restrukturisasi SNP sangat penting dilaksanakan dengan hati-hati. Penulis mengusulkan agar kajian fokus pada isu seputar peningkatan standar kinerja guru dan kepala sekolah tanpa mengabaikan kaitannya dengan standar lainnya dalam SNP. Ada baiknya dilakukan pengumpulan pendapat dari beberapa guru teladan nasional dalam kajian untuk mendapatkan perspektif lapangan.

Sebelum perbaikan terhadap SNP dilakukan, tentu saja perlu diperoleh data dan informasi yang akurat tentang pemenuhan standar nasional ini.

1. Herwindo Haribowo, Ph.D.

Menurut Herwindo Haribowo, standar pendidikan dalam prakteknya mencerminkan tingkat penguasaan siswa terhadap isi atau materi pelajaran sangat berguna untuk berbagai kepentingan. Bagi guru, standar pendidikan merupakan acuan untuk menyusun strategi, metode, pendekatan, dan perencanaan pengajaran atau dikenal sebagai Rencana Pembelajaran Semester (RPS), termasuk menyusun silabus dan evaluasi pengajaran. Bagi siswa, standar pendidikan berguna untuk mempersiapkan diri dalam belajar, dan dapat menentukan cara belajar dan memahami materi pelajaran yang harus dikuasainya. Bagi orang tua, standar pendidikan berguna sebagai acuan tingkat kemampuan anaknya dalam menguasai materi pelajaran, sehingga dapat membantu secara efektif cara belajar anaknya di rumah. Bagi kepala sekolah dan pemerintah di berbagai tingkatan, standar pendidikan sangat berguna sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum, melakukan pengukuran (tes), mengadakan evaluasi, dan melakukan pembinaan terhadap guru, siswa, dan sekolah.

Lebih lanjut Herwindo Haribowo mengemukakan bahwa standar pendidikan pada umumnya disusun oleh asosiasi profesi setiap mata pelajaran. Tingkat atau tingkat standar yang harus dicapai pada umumnya didasarkan kepada "*nature of the subject*", tingkat/jenjang pendidikan (kelas dan satuan pendidikan), serta usia peserta didik. Yang dimaksud dengan *nature of the subject* adalah ada mata pelajaran yang sifatnya berjenjang atau vertikal, seperti Matematika. Mata pelajaran ini menuntut siswa untuk menguasai suatu topik tertentu sebelum melanjutkan belajar

atau mempelajari topik berikutnya (ada suatu *pre-requisit*). Namun ada juga mata pelajaran yang “*by nature*” sifatnya tidak berjenjang dan harus berurutan, misalnya sejarah atau sosiologi. Guru dapat mengajarkan dan siswa dapat mempelajari suatu topik tanpa harus menguasai topik tertentu sebelumnya. Sistematika dalam belajar tergantung urutan yang dibuat oleh guru tanpa adanya jenjang dari topik-topik yang harus dipelajari.

Bagi negara yang menganut sistem federasi/ desentralisasi seperti Amerika Serikat, dulu Jerman dan Finlandia, standar pendidikan disusun oleh masing-masing negara bagian. Namun bagi negara yang menganut sistem pemerintahan unifikasi, seperti Jepang, Belanda dan Indonesia, standar pendidikan disusun oleh pemerintah pusat dan diberlakukan secara nasional. Pada sepuluh tahun terakhir, Amerika Serikat berusaha untuk menyusun dan mengembangkan standar nasional dan kurikulum nasional, namun dalam prakteknya standar dan kurikulum nasional tersebut hanya digunakan sebagai acuan, sedangkan untuk praktek pengajaran sehari-hari masih mengacu kepada standar yang dibuat oleh masing-masing negara bagian (*State*). Di Finlandia, standar dan kurikulum sebelumnya dibuat dan diterapkan oleh masing-masing provinsi, namun sejak tahun 1970 mereka menyusun dan menyepakati adanya standar dan kurikulum nasional yang digunakan oleh semua sekolah di Finlandia sampai saat ini. Perlu diketahui, bahwa berdasarkan penelitian internasional yang dikenal dengan *Trends International of Mathematics and Science Study* (TIMSS), Finlandia merupakan negara tertinggi tingkat penguasaan materi pelajarannya untuk beberapa tahun

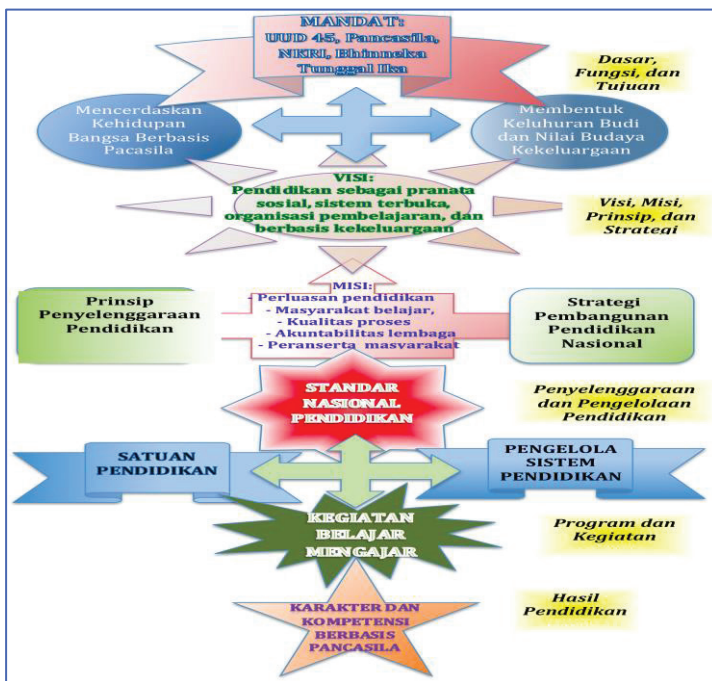
secara berturut-turut. Bagi Negara Indonesia, yang semula standar dan kurikulum (catatan: standar pendidikan implisit tertuang dalam kurikulum nasional) bersifat nasional, namun sejak perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi pada tahun 2001, dalam perkembangannya standar dan kurikulum diserahkan kepada masing-masing daerah, wilayah, bahkan masing-masing sekolah.

Menurut Herwindo Haribowo, standar pendidikan yang dituangkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP tersebut didasarkan kepada pendekatan pendidikan yang dipandang dari sistem *Input – Proses – Output* atau IPO. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu ekonomi, khususnya dalam proses industri/produksi. Dalam proses produksi ini, pendidikan dipandang memiliki komponen *input*, proses, dan *output*. Dari ke delapan standar tersebut dapat diidentifikasi, bahwa yang termasuk ke dalam ***Input*** adalah standar PTK, standar sarpras (5), dan standar pembiayaan (7), yang termasuk ke dalam komponen ***Proses*** adalah: standar proses (2), dan standar pengelolaan (6) dan yang termasuk ke dalam komponen ***Output*** adalah: SKL (3), dan standar penilaian pendidikan (8).

m. Dr. Ibrahim Musa

Menurut Ibrahim Musa, dalam penyusunan SNP pendekatan yang diambil yaitu pembelajaran. Pendidikan nasional sebagai suatu sistem yang diatur dalam UU yang berawal dari UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berbasis Pancasila dan membentuk keluhuran budi dan budaya kekeluargaan. Kemudian diturunkan dalam visi

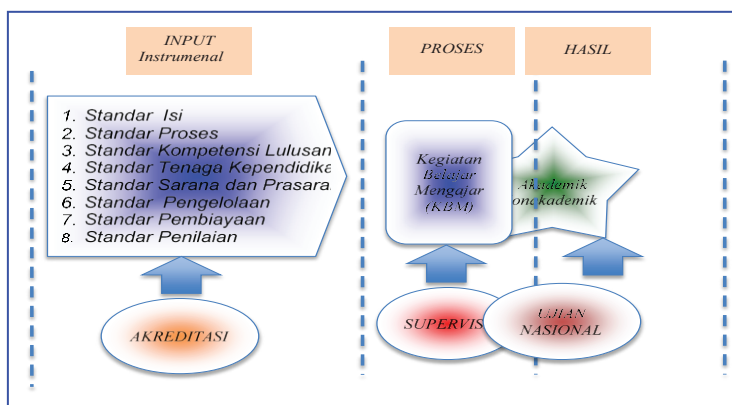
yakni pendidikan sebagai pranata sosial, sistem terbuka, organisasi pembelajaran dan berbasis kekeluargaan dan misi yakni perluasan pendidikan, masyarakat belajar, kualitas proses, akuntabilitas lembaga dan peran serta masyarakat. Berdasarkan hal tersebut disusun SNP dalam mengelola kegiatan proses belajar mengajar. Proses awal penyusunan SNP tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Hal ini merupakan bagian dari naskah akademik penyusunan SNP.



Gambar 3. Tahapan pola pikir penyusunan SNP,
(Ibrahim Musa)

Kemudian jika kita lihat dari masing-masing standar maka berangkat dari tujuan apa yang ingin dicapai, menurut

Ibrahim Musa dalam proses pembelajaran perlu diketahui tujuan yang ingin dicapai seperti dalam standar isi dalam kurikulum. Selanjutnya dalam pelaksanaan SNP seperti dalam tahap *input instrumental*, seperti standar isi, proses, SKL, PTK, sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Ketercapaian ini diukur melalui akreditasi yang hasilnya terdokumentasi dan akhirnya sekolah mendapat sertifikat akreditasi. Akreditasi merupakan penilaian kelayakan standar dengan perangkat akreditasi. Tahap berikut yaitu proses pembelajaran yang dilakukan pada satuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya kegiatan belajar mengajar supaya hasilnya sesuai dengan standar maka diperlukan supervisi. Supervisi ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahap akhir yaitu hasil (*output*) yaitu mencerminkan hasil dari akademik dan non akademik pada tingkat nasional hasil dapat dipetakan melalui UN.



Gambar 4. Tahapan pelaksanaan SNP, dalam proses dan hasil.

Dalam Restrukturisasi SNP, menurut Ibrahim Musa terdapat perdebatan bahwa dalam SNP dimana tidak cukup satu standar saja seperti SKL, namun harus ada standar lain yang mendukung SKL. Oleh karena itu, sebenarnya yang mengimplementasikan delapan SNP yaitu guru, maka guru dan kepala sekolah yang mengetahui terhadap tingkat ketercapaiannya delapan SNP.

n. Prof. Dr. I Made Putrawan

Menurut I Made Putrawan, bahwa SNP memang perlu dilakukan perbaikan atau revisi dalam mengikuti perkembangan global yang terjadi pada saat ini. Pemikiran I Made Putrawan didasarkan pada *Management by Objective* (MBO) yaitu tujuan kita kemana? oleh karena itu, sesuai tujuan atau targetnya yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam mencapai tujuan tersebut maka benar kita harus fokus pada SKL. Namun SKL menurut I Made Putrawan, apakah hanya fokus pada sikap, kemampuan dan keterampilan? kenapa tidak ditambah dengan perilaku karena tujuan pendidikan nasional diarahkan kepada tanggung jawab yang menuntut adanya perilaku nyata bukan sekedar sikap saja. Pendidik harus bisa membawa siswa mampu berperilaku sebagai manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus bisa mengukur perilaku, dalam penjelasannya I Made Putrawan berangkat dari

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah standar-standar yang didefinisikan sebagai kriteria telah mencakup pencapaian seperti tertera dalam tujuan pendidikan nasional tersebut?
- 2) Apakah capaian pembelajaran sudah dirumuskan sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional?
- 3) Apakah standar-standar tersebut masih relevan dengan era *disruption*?

Menurut I Made Putrawan sekarang ini kita berada pada era *disruption* yaitu masa kekacauan seperti peran orang sekarang diganti dengan mesin dan sebagainya. Kemudian transisi menuju era *bunden* yaitu era berlimpah informasi dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan ujung Kurikulum 2013 yang diambil Anderson Kreatwall yaitu *creat* atau mencipta. Menurut I Made Putrawan ini berat bagi guru di daerah yang tidak memiliki komputer atau tidak memiliki kemampuan IT atau keterampilan. Hal ini karena dalam Kurikulum 2013 tidak menggunakan teori Bloom yang menggunakan prinsip pembelajaran jenjang C1 sampai dengan C6. Sejak awal siswa tidak dikembangkan dari aspek perilaku namun lebih pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menjadi pertanyaan I Made Putrawan dalam SKL kenapa hanya dibatasi pada sikap, pengetahuan dan keterampilan? namun perlu ada penambahan yaitu aspek perilaku sesuai dengan harapan dari tujuan pendidikan mewujudkan manusia yang bertanggung jawab bukan sekedar pada norma-norma yang dihafal dan tidak menjadi perilaku. Seseorang terampil tetapi bagaimana perilakunya. Oleh karena itu, SKL perlu ditambah dengan perilaku, dan untuk SKL yang pertama adalah pengetahuan, sikap dan

keterampilan karena seseorang bertindak bermula pada pengetahuan kemudian bersikap.

I Made Putrawan mengusulkan untuk mempertimbangkan aspek perilaku sesuai dengan Model Teoretik Kualitas Hidup (dari Mollenkopf, Heidrun et.al) yang menjelaskan bahwa kualitas hidup dipengaruhi oleh faktor kepribadian, faktor lingkungan atau situasi. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap sosial kerja sama dan sosial dukungannya yang akan berpengaruh terhadap kualitas hidup, oleh karena itu guru harus bisa mengukur perilaku agar siswa berperilaku berakhlak mulia maka diperlukan pengetahuan dan harus mengetahui sikap untuk berperilaku dengan baik. Strateginya dan metode pembelajaran dengan *Problem Based Learning* (PBL).

Diperlukan adanya perubahan mendasar dan konseptual terhadap susunan standar-standar pendidikan nasional yang lebih menekankan adanya tambahan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang meliputi perubahan dalam hal paradigma siswa, cara berpikir yang lebih logik, dan perilaku yang lebih positif.

Sementara yang sudah dijadikan standar keluaran hanya meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga hal ini yang dikhawatirkan seperti dikemukakan oleh Covey (2004/2008) “apabila kita ingin ada perubahan yang merupakan “*quantum leap*” berubah cepat maka harus bekerja menggunakan paradigma dan bukan berkuat pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Mengurutkan standar lulusan dengan “sikap” lebih dulu dari pada pengetahuan perlu ditinjau ulang mengingat secara

konseptual sebagai dasar seseorang bersikap adalah pengetahuan.

Tiga dimensi dalam pengukuran sikap adalah pengetahuan, “*feeling*,” dan “*action tendency*.” (dalam Bennett, 1974). *If You Want to Make **Minor**, Incremental Changes and Improvements, Work on Practices, Behavior or Attitude. But If You Want to Make Significant, Quantum Improvement, Work on **Paradigms***. Paradigma merupakan cara dan daya pandang seseorang dalam mendeskripsikan sesuatu dan dapat diakui bersama oleh *peer group*.

Menurut I Made Putrawan, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 siswa perlu dipersiapkan atau dibekali dengan beberapa keterampilan dan perilaku yang dapat menghadapi era tersebut. Selanjutnya dalam tabel di bawah ini keterampilan yang perlu disiapkan untuk peserta didik.

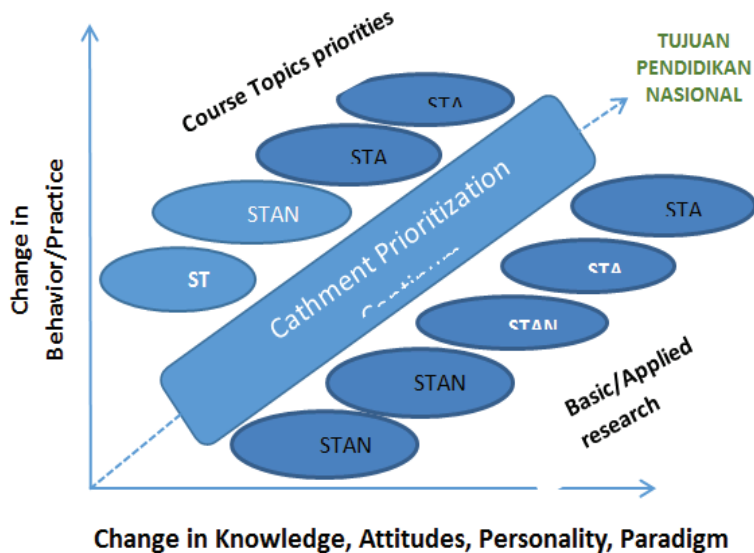
Tabel 2. Skill yang dibutuhkan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0

No	Jenis Skill	No	Jenis Skill
1	Complex problem solving	6	Emotion intelligence
2	Critical thinking	7	Judgment and decision making
3	Creativity	8	Service orientation
4	People management	9	Negotiation
5	Coordinating with other	10	Cognitive flexibility

(Sumber: *Future of Jobs Reports, World Economic Forum*, 2016)

Berdasarkan uraian tersebut, menurut I Made Putrawan SNP perlu direvisi atau diperbaiki sehingga dapat menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Peserta didik tidak selalu diajarkan etika dan norma yang memberikan pilihan salah dan benar. Dalam SKL perlu ada tambahan perilaku, karena kita bekerja selalu berdasarkan perubahan yang cepat maka bekerjalah menggunakan **paradigma** dan bukan berkatut pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu dilakukan proses pembelajaran dengan metode PBL sehingga siswa dilatih berpikir kritis untuk dapat memecahkan masalah.

Usulan perubahan SNP dengan menghadapi revolusi industri.



Gambar 5. Tantangan dalam pengetahuan, sikap, kepribadian, paradigm

o. Dr. Jafriansen Damanik

Jafriansen Damanik memberikan pendapat mengenai kedelapan standar dalam SNP, karena diperlukan untuk menjamin mutu pendidikan nasional, maka standar pendidikan tetap diberlakukan, yang tentu saja perlu dikaji untuk disempurnakan. Menurut aturan Pemerintah, standar pendidikan memang harus disempurnakan.

Dalam melakukan restrukturisasi SNP, dapat ditempuh dengan cara mengurangi indikator muatan standar, menyederhanakan aspek standar, dan mengurangi komponen standar. Berikut uraian masing-masing standar;

1) Standar Kompetensi Lulusan

SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang dihasilkan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa berdasarkan muatan/isi kurikulum, dan dinilai secara holistik.

Oleh sebab itu SKL harus tetap diberlakukan, dan secara rutin dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai masukan, SKL ini sebaiknya sampai pada tingkat kompetensi.

2) Standar Isi

Standar isi terdiri dari ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi dan merupakan penjabaran dari SKL. Maka perlu diusulkan standar isi sebaiknya berfokus pada ruang lingkup materi saja, sedangkan tingkat kompetensi dimasukkan ke dalam SKL.

Standar isi yang memuat ruang lingkup materi perlu ditetapkan untuk dapat digunakan sekolah dalam mengembangkan bahan pembelajaran yang diberlakukan secara nasional.

3) Standar Proses

Meskipun banyak yang berpendapat bahwa apabila proses distandarkan akan sangat bervariasi, tergantung banyak hal, namun karena standar proses ini mencakup persiapan, prinsip, karakteristik, perencanaan, dan pengawasan, maka harus tetap dipertahankan.

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terdapat empat kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Dari empat kompetensi tersebut, maka secara spesifik yang diperlukan adalah kompetensi profesional (guru menguasai materi yang akan disampaikan) dan kompetensi pedagogik (guru terampil menyampaikannya). Adapun kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian tidak spesifik untuk guru, karena itu berlaku untuk semua orang. Standar PTK sebaiknya hanya yang spesifik saja dan kompetensi guru ini sebaiknya dimasukkan ke dalam standar proses karena ketika guru melakukan standar proses, dia akan menunjukkan kompetensinya. Begitu pula bila diperhatikan dalam instrumen akreditasi, untuk kompetensi profesional dan pedagogik itu nantinya akan ditanyakan pula dalam standar proses karena di standar PTK yang ditanyakan adalah dia “mampu melakukan”, sedangkan pada standar proses yang ditanyakan dia

“melakukan”. Jadi cukup dimasukkan di standar proses saja. Selain itu sudah ada UU yang mengatur tentang guru, sehingga tidak perlu diatur kembali dalam standar PTK.

5) Standar Sarana dan Prasarana

Bunyi standarnya adalah setiap satuan pendidikan wajib mempunyai sarpras. Pada kenyataannya, standar sarpras tidak benar-benar harus sebanyak yang tertera di standar, misalnya sekolah harus memiliki lapangan sepak bola, padahal tidak harus memiliki selama masih bisa terpenuhi dengan bekerja sama dengan lembaga lain.

Sebenarnya persyaratan mengenai prasarana pendidikan sudah ada di peraturan lain, sehingga tidak perlu distandarkan secara khusus dalam SNP. Persyaratan pembangunan gedung sudah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan beberapa peraturan terkait antara lain PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/Prt/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

Sedangkan untuk sarana, sebenarnya sudah tercermin dalam standar proses, misalnya peralatan dan bahan apa saja yang diperlukan ketika guru melaksanakan proses pembelajaran di laboratorium. Dengan demikian sarana dan prasarana dapat dipertimbangkan untuk tidak distandarkan secara khusus untuk sekolah.

6) Standar Pengelolaan

Pengelolaan atau manajemen tidak harus secara spesifik distandarkan untuk sekolah, karena sudah berlaku umum. Secara umum semua organisasi mempunyai visi, misi, perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan sebagainya, namun hal tersebut tidak semua spesifik untuk sekolah.

7) Standar Pembiayaan

Pembiayaan sangat bervariasi antar sekolah untuk apa saja komponennya dan berapa besar biayanya yang dibutuhkan. Sulit untuk menentukan standar pembiayaan, sehingga tidak harus dibuat standar. Barangkali inilah sebabnya Permendikbud mengenai pembiayaan tidak diterbitkan lagi sejak tahun 2009, karena selalu berubah setiap saat dan berbeda di berbagai tempat.

8) Standar Penilaian

Standar ini harus tetap diberlakukan karena menyangkut mekanisme, prosedur, instrumen, dan sebagainya. Hasil dari penilaian yang dilakukan secara objektif dapat menunjukkan sejauh mana siswa dan lulusan telah memenuhi standar kompetensi, serta membandingkan nilai yang dicapai oleh siswa antar sekolah dan antar daerah.

Menurut Jafriansen Damanik, jika memang harus ada restrukturisasi maka terdapat empat standar yang perlu dipertahankan, yakni SKL, standar isi, standar proses dan standar penilaian. Keempat standar ini merupakan

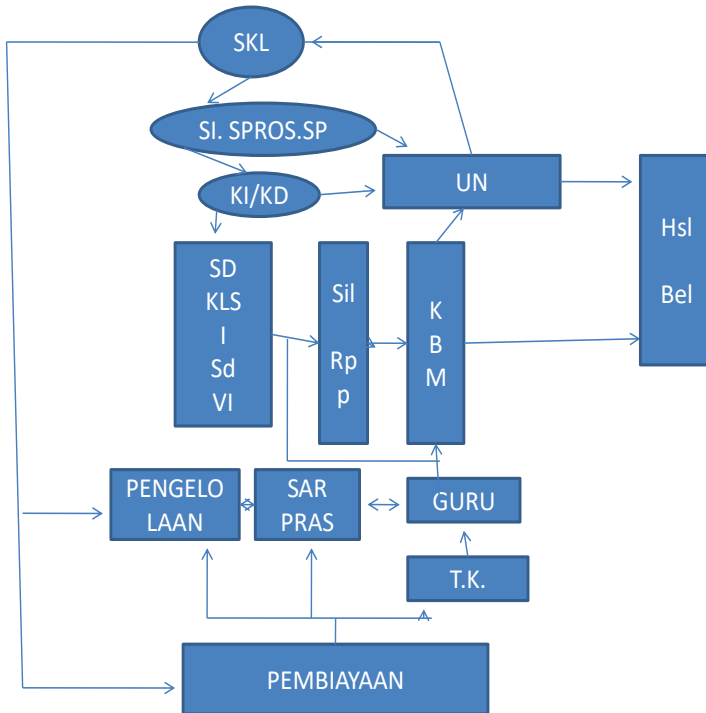
komponen yang terkait langsung dengan hasil Pendidikan.

p. Dr. Siskandar

Menurut Siskandar, SKL merupakan salah satu standar dalam SNP yang memiliki kedudukan berbeda dengan tujuh standar lainnya. SKL menjadi acuan utama dari standar isi, standar proses, standar penilaian, standar PTK, standar pengelolaan dan standar pembiayaan (Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016, Bab.I. huruf C).

Kedudukan SKL merupakan perubahan dari konstelasi SNP sebelumnya dimana masing-masing standar memiliki kedudukan yang sama. SKL merupakan profil kompetensi yang dimiliki lulusan satuan/jenjang pendidikan tertentu. Adapun dimensi SKL mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam perspektif pengembangan kurikulum, keterkaitan SKL dan standar-standar lainnya dalam lingkup SNP dapat digambarkan sebagai berikut.

KBM- HASIL BELAJAR - SNP



Gambar 6. Hubungan KBM-hasil belajar-SNP

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016, Bab I huruf C SKL menjadi acuan utama tujuh standar lainnya. Diagram di atas memberi gambaran kaitan yang lebih terurai mulai dari SKL sampai dengan pembelajaran dan hasil belajar. Diagram di atas menunjukkan kaitan beberapa komponen “antara” yang perlu dipersiapkan atau

dikembangkan dengan merujuk pada K.I.1. sd K.I.4. menjadi silabus dan RPP oleh guru yang kompeten dan profesional. Kegiatan pembelajaran yang dikelola guru sebagai perwujudan silabus dan RPP secara operasional (*in action*) di kelas. Komponen tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam SNP, akan tetapi kunci dalam mewujudkan interaksi guru-siswa, siswa-siswa, dan siswa dengan sarana dan lingkungan. Proses pembelajaran tersebut mendorong keaktifan siswa dan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan *scientific* diharapkan menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi sebagaimana dideskripsikan dalam SKL. Dengan demikian guru sebagai bagian dari standar PTK menjadi aktor utama dalam mewujudkan pencapaian SKL yang pada gilirannya menuju pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum itu sendiri dikembangkan mengacu pada standar isi, standar proses, standar penilaian dimana ketiga standar tersebut mengacu pada SKL. Kompetensi dan profesionalitas guru dikembangkan dan dibina melalui bantuan dan pelatihan profesional yang diberikan oleh tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional (pengawas, kepala sekolah, tenaga kompeten dan profesional lainnya, dan birokrasi pendidikan) melalui mekanisme dan wadah-wadah pelatihan dan pembinaan guru. Pembelajaran yang dikelola guru kompetensi dan profesional diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang dideskripsikan dalam SKL.

Lebih lanjut, Siskandar berpendapat bahwa perubahan SNP memiliki dua asumsi yaitu: 1) Seandainya SNP sudah pas dan 2) Seandainya SNP harus dibongkar.

1) Seandainya SNP sudah Pas

Awalnya kedelapan standar memiliki kedudukan yang sama, kemudian kedudukan SKL berada di atas standar yang lain sehingga kini timbul SKL ada banyak turunannya, seperti KI1, KI2, KI3, dan KI4 serta ada KD dan materi. Sebenarnya jika mengacu pada zaman yang lalu, ini namanya kurikulum dan dibuat silabus, dalam silabus ada skenario bagaimana mengajar dan metodenya, kemudian sarana yang digunakan, hingga aktivitas harian yang selanjutnya dibuat RPP. Saat ini terdapat *gap* apakah guru sudah paham dalam menjabarkan materi KI/KD dan sebagainya menjadi sebuah silabus. Hal ini sangat penting bagi guru untuk memahami materi KI/KD dan lain-lain, serta bagaimana mengimplementasikan.

Meskipun KI1 dan KI2 tidak diujikan dalam UN dan US, namun dalam teori pembelajaran ini dinamakan *Nurturance Effect* yang bermakna bahwa pendidikan karakter harus sudah tertanam pada guru dan akan menularkan kepada peserta didik.

2) Seandainya SNP harus Dibongkar

Komponen GTK harus dipisah karena hasil studi internasional mengatakan bahwa guru itu tergantung dari siapa yang melatih dan membina. Kenyataannya saat ini Direktorat Dikdasmen mengalami kesulitan menemukan pelatih yang kompeten dan profesional untuk melatih 3 juta guru akibatnya siapa saja bisa melatih sehingga dampaknya berpengaruh pada kualitas guru. Pendidikan guru ada dua komponen, pendidikan pra jabatan dan dalam jabatan. Menurut penelitian, guru yang baik adalah

anak SLTA 5% terbaik dari lulusannya, hal ini berlaku di Korea Selatan, Jepang Singapura dan Jerman. Namun di Indonesia, standar ini belum tentu dapat dilakukan.

Sepakat bahwa guru adalah kunci utama dan berdasarkan tambahan dari buku Cohen, jika ingin pendidikan berhasil harus mempersatukan tiga pilar, yaitu guru, murid, orang tua dan masyarakat jadi diperlukan adanya kerja sama dan integrasi.

Dari uraian di atas, Siskandar menyimpulkan;

- 1) SNP sebagai suatu penjaminan agar sistem pendidikan berjalan efektif dan efisien demi berfungsinya sistem pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional,
- 2) Kedudukan SKL sebagai acuan utama bagi semua standar lainnya dan menjadi tolok ukur atau barometer dalam menjalankan pendidikan, khususnya pembelajaran,
- 3) Proses pembelajaran atau pembelajaran menjadi kunci bagi pencapaian SKL,
- 4) Penilaian yang mencakup semua aspek dan dijalankan secara objektif diharapkan menggambarkan kualifikasi sebagaimana yang dituntut SKL.

q. Prof. Dr. Sugiyono

Menurut Sugiyono bahwa SKL dapat dicapai melalui standar proses pembelajaran yang akan didukung oleh standar isi, penilaian, pengelolaan, PTK, sarpras dan pembiayaan. Sekolah yang berhasil menurut Sugiyono sesuai teori manajemen 80% ditentukan oleh kompetensi kepala sekolah artinya bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan dalam mencapai mutu pendidikan pada

satuan pendidikan. Berdasarkan analisis dari Sugiyono, dari data dan informasi yang didapat bahwa dengan delapan SNP dalam implementasi pada satuan pendidikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- 1) Walaupun tingkat ketercapaian SNP di DKI Jakarta dan mungkin kota-kota besar lain tinggi, namun standar nasional yang digunakan selama 13 tahun (2005 s.d. 2018) belum mampu membawa kualitas pendidikan pada gradasi yang tinggi. SNP belum mampu membawa pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
- 2) Bukan SNPnya yang kurang baik, tetapi implementasi terhadap setiap standar nasional yang belum baik karena masih banyak sekolah yang belum mampu mencapai standar nasional tersebut,
- 3) Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi pada setiap standar masih mengandung berbagai kelemahan, khususnya pada standar proses, pengelolaan dan kepemimpinan kepala sekolah.

Selanjutnya Sugiyono mengusulkan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Perumusan SNP hendaknya sesuai dengan pengertian pendidikan yang tertera dalam UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian SNP sebaiknya mencerminkan usaha sadar dan terencana, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran, peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya sendiri, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara;

- 2) Bila delapan standar nasional tetap digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia, maka usaha yang perlu dilakukan adalah memenuhi ketercapaian delapan standar nasional tersebut;
- 3) Penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, dan birokrasi pendidikan, baik di daerah maupun di pusat, perlu diintensifkan agar standar nasional tercapai pada gradasi yang tinggi dan selanjutnya mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

r. Prof. Dr. Syarif Sumantri

Dalam diskusi, Syarif Sumantri menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan bervariasi, membuat standar menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks. Meskipun demikian, standar sangat diperlukan untuk mengendalikan kualitas/mutu pendidikan. Standar dibuat agar implementasinya mudah namun tetap efektif, efisien, dan sebagainya.

Seperti yang telah diketahui bahwa standar dibuat secara minimal sejak tahun 2005, meskipun banyak dinamika untuk melihat apakah standar masih sesuai atau tidak, perlu melihat perkembangan IPTEK tentunya perkembangan era abad 21, perkembangan industri 4.0, dan sebagainya. Kemampuan sains, matematika dan literasi Indonesia masih cenderung rendah dibandingkan negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah standar belum terimplementasi dengan baik, atau justru standar terlalu tinggi atau terlalu rendah? pada intinya, kunci utama kemajuan pendidikan

adalah guru dan apabila guru memenuhi standar minimal, maka standar yang lain akan mengikuti.

Meskipun teknologi sudah berkembang maju, namun tetap tidak dapat menggantikan posisi guru. Namun, posisi guru akan tersingkir jika tidak mampu menggunakan teknologi. Guru seharusnya tidak hanya menguasai konten, namun juga menguasai pedagogik, dan yang terpenting menguasai teknologi. Sayangnya jaringan teknologi di Indonesia belum menyebar secara merata.

Syarif Sumantri, dalam diskusi menyoroti tentang kompetensi guru, yaitu tidak saja menguasai konten, juga menguasai pedagogik, dan berikutnya adalah menguasai teknologi sehingga ketiga integrasi inilah yang dipersyaratkan. Pada umumnya saat ini, jika dibandingkan dengan negara lain penyebaran jaringan di Indonesia masih belum merata, dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas.

Kritiknya adalah adanya pembagian kompetensi sosial, pedagogik, profesional, kadang saling *overlapping* sehingga sulit untuk dibuat lebih spesifik dan sarannya adalah menyederhanakan kompetensi setiap konten.

Bagaimana posisi ke delapan standar? posisinya relatif cukup, namun pada pelaksanaannya masih banyak kelemahan. Masih menjadi pertanyaan apakah asesor sudah objektif atau belum. Peran beberapa LPMP belum maksimal, seharusnya lebih *powerfull* dalam mengawal mutu pendidikan pada satuan pendidikan di daerah. Menurut Syarif Sumantri, dari 8 SNP untuk standar PTK belum optimal.

Syarif Sumantri mengemukakan kriteria memilih standar sebagai berikut;

- 1) Tingkat yang sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang sebelumnya,
- 2) Kemudahan penerapannya,
- 3) Instruksi standar yang tepat serta tidak bersifat paksa,
- 4) Pemakai mudah menerimanya,
- 5) Apabila diterapkan pada masyarakat yang berbeda-beda atau situasi tertentu akan mempunyai hasil yang sama.

2. Pembahasan terhadap Delapan Standar

Dari hasil pendapat para narasumber yang dirangkum dari makalah dan diskusi FGD, dapat dilihat bahwa pendapat mereka dapat dikelompokkan dalam tiga kategori: (a) mereka yang berpendapat bahwa restrukturisasi SNP adalah masalah implementasi SNP di lapangan (Prof. Dr. Dawud, Prof. Dr. Djaali, Dr. Ibrahim, Dr. Heru Triyono, Prof. Dr. Syarif Sumantri, dan Prof. Dr. Sugiyono), (b) mereka yang berpendapat bahwa restrukturisasi SNP adalah peninjauan kembali konsep SNP dan implementasinya dalam berbagai tingkat birokrasi di lapangan (Dr. Bahrul Hayat, Prof. Dr. Ace Suryadi, Prof. Dr. Abdul Aziz, Dr. Budiono, Prof. Dr. Djemari Mardaphi, Prof. Dr. Farida Hnum, Prof. Dr. Haris, Dr. Herwindo, Prof. Dr. I Made Putrawan, dan Dr. Jafriansen), dan (c) mereka yang berpendapat bahwa restrukturisasi SNP menyangkut masalah yang lebih luas yaitu pengelolaan SNP (Prof. Dr. Ace Suryadi).

Pada umumnya para narasumber yang menyampaikan pandangannya dalam FGD sependapat untuk meninjau bahkan melakukan restrukturisasi SNP, baik dari segi jumlah delapan standar, keutamaan SKL dibandingkan

dengan standar lain, maupun dalam hal isi dari masing-masing standar. Berikut beberapa narasumber yang memberikan pandangan berbeda.

Ace Suryadi berpendapat bahwa yang bermasalah adalah praktek atau pelaksanaan proses pendidikan, bukan SNP. Namun demikian dia berpendapat bahwa yang diperlukan adalah SKL dan standar isi, sementara enam standar lainnya tidak diperlukan.

Djaali juga menyatakan bahwa belum ada keinginan untuk mengubah delapan standar yang ada, karena yang lebih penting adalah bagaimana standar yang ada harus benar-benar realistis dan dapat diimplementasikan. Dalam perjalanannya SNP menurut Djaali, ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu SNP memang tidak realistis (terlalu tinggi), atau perhatian pemerintah dalam implementasi SNP yang masih kurang.

Syarif Sumantri juga berpendapat bahwa posisi kedelapan standar yang ada sekarang masih relatif cukup, namun kelemahannya ada pada pelaksanaan atau pemenuhan standar.

Selanjutnya Sugiyono berpendapat bahwa bukan SNPnya yang kurang baik, tetapi implementasi terhadap setiap standar nasional yang belum baik, karena masih banyak sekolah yang belum mampu mencapai standar nasional tersebut. Bila delapan standar nasional tetap digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia, maka usaha yang perlu dilakukan adalah memenuhi ketercapaian delapan standar nasional tersebut.

Sementara itu menurut Farida Hanum, sebagai pedoman mencapai kualitas pendidikan keberadaan SNP masih tetap diperlukan, tetapi harus direvisi sesuai dengan rumusan masukan-masukan dan kritik-kritik yang positif dan membangun.

Berikut pendapat narasumber tentang masing-masing standar dan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan restrukturisasi SNP.

a. Standar Kompetensi Lulusan

Semua narasumber sepakat untuk tetap memberlakukan SKL, karena yang utama adalah SKL. Ada yang mengusulkan untuk menetapkan SKL saja, atau SKL dan standar isi, atau SKL sebagai standar utama dan tujuh standar lainnya sebagai pendukung.

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP disebutkan bahwa SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan perlu ditambah dengan perilaku, dan untuk urutan pertama dalam SKL yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan, karena seseorang bertindak dimulai dengan pengetahuan dan dilanjutkan dengan bersikap.

SKL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lainnya. SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang dihasilkan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa berdasarkan muatan/isi kurikulum, dan dinilai secara holistik.

Oleh sebab itu SKL harus tetap diberlakukan, dan secara rutin dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK.

b. Standar Isi

Standar isi merupakan salah satu standar yang langsung bisa mempengaruhi mutu pendidikan, dan dapat dikontrol pelaksanaannya oleh kepala sekolah beserta guru. Pencapaian SKL harus didukung oleh bahan ajar atau materi ajar yang lengkap, yang dicakup dalam standar isi. Standar isi diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas, bahkan ada yang berpendapat bahwa pemerintah cukup menetapkan SKL dan standar isi saja, sedangkan enam standar lainnya tidak perlu.

Dalam standar isi perlu dimunculkan tentang unsur-unsur berpikir kritis. Meskipun selama ini materi pelajaran dalam standar isi dirasakan terlalu banyak, sehingga dengan waktu yang terbatas guru sulit mengintegrasikan dengan pendidikan karakter.

Standar isi terdiri dari ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sementara tingkat kompetensi merupakan penjabaran dari SKL, oleh karena itu ada yang mengusulkan agar standar isi hanya berfokus pada ruang lingkup materi saja sedangkan tingkat kompetensi dimasukkan ke dalam SKL.

Standar isi yang memuat ruang lingkup pelajaran masih perlu ditetapkan untuk dapat digunakan sekolah dalam mengembangkan bahan pembelajaran yang diberlakukan secara nasional.

c. Standar Proses

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai SKL. Namun dalam standar proses selama ini diatur tentang prinsip, karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, penilaian proses dan hasil, serta pengawasan. Jadi bukan hanya tentang mengatur pelaksanaan pembelajaran.

Pada umumnya para narasumber setuju untuk tetap memberlakukan standar proses. Standar proses merupakan salah satu standar yang langsung bisa mempengaruhi mutu pendidikan, dan pelaksanaannya dapat dikontrol langsung oleh kepala sekolah. Apabila dilihat dari peningkatan mutu pendidikan maka yang paling utama perlu dikembangkan yaitu proses pembelajaran.

Ada yang berpendapat dalam proses pembelajaran dilakukan dengan metode PBL sehingga siswa dilatih berpikir kritis untuk dapat memecahkan masalah.

Untuk mengolah standar isi agar dicapai kompetensi lulusan perlu ada proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran merupakan standar yang penting karena perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat mengharuskan guru mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien.

SKL dapat dicapai melalui standar proses pembelajaran yang akan didukung oleh standar isi, penilaian, pengelolaan, PTK, sarpras dan pembiayaan.

Ada juga yang berpendapat bahwa proses pembelajaran sulit distandarkan karena sangat bervariasi dan tergantung

banyak hal. Namun demikian, karena standar proses ini mencakup persiapan, prinsip, karakteristik, perencanaan, dan pengawasan, maka harus tetap dipertahankan.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar PTK adalah kriteria mengenai pendidikan pra jabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Semua narasumber sependapat bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan mutu pendidikan. Namun terdapat perbedaan pendapat apakah perlu dibuat standar khusus untuk guru atau disatukan dengan standar tenaga kependidikan sebagaimana Standar PTK yang selama ini berlaku. Apabila standar PTK harus diubah komponen guru dan tenaga kependidikan harus dipisah.

Ada yang berpendapat bahwa standar guru yang ada saat ini sulit dipahami, kurang memandu, dan pernyataan standar yang ada dirasakan sebagai beban. Guru sebagai bagian dari standar PTK menjadi aktor utama dalam mewujudkan pencapaian SKL yang pada gilirannya menuju pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Diperlukan standar guru karena apabila guru memenuhi standar maka standar yang lain akan mengikuti. Sebaiknya guru tidak hanya menguasai konten, namun juga menguasai pedagogik, dan yang lebih penting menguasai teknologi. Peran guru memang yang paling penting dalam memenuhi standar pendidikan sehingga diperlukan standar yang jelas.

Pendapat lain menyatakan kompetensi guru dapat dimasukkan ke dalam standar proses karena ketika guru

melakukan proses, dia akan menampilkan kompetensinya. Dalam mengukur pemenuhan standar guru selama ini yang ditanyakan adalah apa yang “mampu dilakukan” sedangkan pada standar proses yang ditanyakan adalah apa yang “sudah dilakukan”. Apabila guru sudah melakukan berarti dia mampu melakukan sehingga kompetensi guru tercermin dalam standar proses. Selain itu sudah ada UU dan PP yang mengatur tentang guru sehingga tidak perlu diatur kembali dalam standar PTK.

Di samping itu, pemenuhan standar PTK terutama menyangkut ketersediaan dan kualifikasi guru, bukan menjadi tanggung jawab kepala sekolah namun merupakan tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara pendidikan.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarpras adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kriteria atau syarat mendirikan sekolah dengan standar sarpras yang harusnya dipenuhi, kenyataannya banyak sekolah yang didirikan dan dimiliki pemerintah sendiri kurang memenuhi standar sarpras. Standar sarpras tertulis dengan sangat rinci, namun sekolah tidak benar-benar menangkap intinya.

Dalam standar sarpras disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarpras. Pada dasarnya sarpras sekolah tidak benar-benar harus sebanyak yang tertera di

standar, misalnya sekolah harus memiliki lapangan sepak bola, padahal tidak harus memiliki selama masih bisa terpenuhi, misalnya dengan bekerja sama dengan lembaga lain.

Di samping itu, pemenuhan standar sarpras bukan menjadi tanggung jawab sekolah namun tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara pendidikan.

Sebenarnya persyaratan mengenai prasarana juga sudah ada di peraturan lain sehingga tidak perlu distandarkan secara khusus dalam SNP, hal tersebut termasuk untuk prasarana sedangkan untuk sarana sebenarnya sudah tercermin di dalam standar proses. Misalnya ketika guru melaksanakan proses pembelajaran di laboratorium sehingga bisa dipertimbangkan untuk tidak distandarkan secara khusus untuk sekolah.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan

Beberapa narasumber menyatakan standar pengelolaan tidak diperlukan, sementara narasumber lain tidak membahas tentang standar pengelolaan. Pengelolaan atau manajemen tidak harus secara spesifik distandarkan untuk sekolah, karena sudah berlaku umum. Secara umum, semua organisasi mempunyai visi, misi, perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan sebagainya, namun demikian semua itu tidak spesifik untuk sekolah.

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Pembiayaan sangat bervariasi antar sekolah, komponennya apa saja dan berapa besar biayanya, sehingga sangat sulit untuk menentukan standar pembiayaan dan tidak harus dibuat standar. Barangkali inilah penyebab Permendikbud mengenai pembiayaan tidak diterbitkan lagi sejak tahun 2009 karena selalu berubah setiap saat dan berbeda di berbagai tempat.

Di samping itu pemenuhan standar pembiayaan bukan menjadi tanggung jawab sekolah, namun merupakan tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara pendidikan.

h. Standar Penilaian

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Untuk mengetahui tingkat pencapaian SKL diperlukan sistem penilaian yang akurat.

Standar ini tetap diberlakukan karena menyangkut mekanisme, prosedur, instrumen, dan sebagainya. Jadi dengan penilaian yang memenuhi standar diharapkan hasil penilaian bisa dibandingkan antar satu sekolah/daerah dengan yang lain.

3. Pertimbangan dalam Restrukturisasi SNP

Menurut para narasumber, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka melakukan restrukturisasi SNP, sebagai berikut;

- a. SKL sebagai standar yang dijadikan acuan dalam penetapan standar-standar lainnya dan harus ditentukan terlebih dahulu.
- b. Standar-standar yang didefinisikan sebagai kriteria harus mencakup pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam SKL tidak hanya dibatasi pada sikap, pengetahuan dan keterampilan, namun perlu ada penambahan lagi seperti aspek perilaku yang sesuai dengan harapan dari tujuan pendidikan untuk mewujudkan manusia yang bertanggung jawab bukan sekedar pada norma-norma saja yang dihafal dan tidak menjadi perilaku.
- c. SNP dikembangkan sejalan dengan konteks pembangunan nasional yang pada hakekatnya mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai pemersatu bangsa, sebagai penyamaan kesempatan, dan sebagai pengembangan potensi diri.
- d. Standar sebaiknya tidak terlalu banyak mengatur (*over regulation*) sebagaimana yang ada selama ini. Aturan tersebut seharusnya dirasakan sebagai sesuatu yang secara sadar dinilai baik dan memberi arah perbaikan mutu pendidikan.
- e. Standar sebaiknya memiliki daya saing (*competitiveness*) dan dapat dicapai (*achievability*).
- f. Standar sebaiknya memperhatikan perkembangan IPTEK, pendidikan abad 21, perkembangan industri 4.0, dan lain-lain.
- g. Standar sebaiknya dapat mendorong siswa dan lulusan berpikir kritis dan kreatif.
- h. Rumusan standar dibuat sederhana, mudah dipahami, dan tidak terlalu *rigid*.

- i. Ada pembagian standar, mana yang bisa dikontrol oleh kepala sekolah dan mana yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara pendidikan. Standar pendidikan di tingkat sekolah hendaknya fokus pada standar yang dapat dikontrol oleh kepala sekolah.
- j. Jumlah SNP sebanyak delapan terlalu banyak dan selama ini sulit untuk dipenuhi, oleh karena itu perlu disederhanakan menjadi beberapa standar yang esensi saja.
- k. Standar yang ditetapkan dibatasi pada aspek yang spesifik dan terkait langsung dengan proses pembelajaran dan pemenuhan tujuan pendidikan.
- l. Standar guru agar dipisah dengan tenaga kependidikan karena fungsi dan peran guru dalam proses serta hasil pendidikan sangat sentral dan berbeda dengan peran tenaga kependidikan lainnya.
- m. Apabila sudah ada peraturan-peraturan lain yang mengatur secara khusus aspek tersebut maka tidak perlu dibuat lagi dalam standar pendidikan, misalnya standar sarpras.
- n. Untuk memperbaiki standar, perlu dilakukan studi yang mendalam dan langsung pada satuan pendidikan dalam menerapkan SNP.

4. Kosepsi Penyusunan Formulasi Restrukturisasi SNP

SNP menjadi panduan dalam mencapai mutu pendidikan yang diharapkan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK saat ini dan masa depan maka sudah tidak bisa ditawar bahwa pembangunan pendidikan merupakan sektor pembangunan yang strategis dalam menyiapkan SDM kompetitif yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Keunggulan SDM menjadi faktor utama yang dapat

menjawab perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu merupakan amanah dari UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Dengan demikian untuk mencapai mutu pendidikan diperlukan SNP yang dapat menjadi panduan setiap penyelenggara pendidikan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil diskusi dengan narasumber yang berasal dari akademisi dan praktisi pendidikan maka dalam penyusunan SNP dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur penyusunan standar yang terdiri dari tingkat siswa, tingkat kelas dan tingkat sekolah, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Standar pada tingkat siswa

Standar ini berorientasi pada ketercapaian hasil belajar yang diperoleh menjadi dasar kompetensi siswa atau SKL. Siswa memperoleh manfaat setelah selesai proses belajar memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kompetensi ini dibedakan menjadi dua yaitu kompetensi generik yang bersifat umum dan kompetensi subjektif bersifat khusus terkait dengan mata pelajaran yang diselesaikan dalam proses belajar.

SKL sebagai standar yang harus ditentukan terlebih dahulu oleh setiap perubahan pada standar tersebut akan mempengaruhi standar-standar lainnya terutama mengenai standar isi, proses dan penilaian. Namun demikian, berdasarkan tuntutan perubahan kebutuhan yang berkaitan

dengan hal itu pada kesempatan ini hanya ada perubahan berupa penambahan beberapa hal sebagai berikut:

1) Kompetensi yang bersifat generik pada satuan pendidikan

Adapun Standar Kompetensi bersifat generik pada setiap jenjang yaitu:

a) Pada tingkat SD/MI/SDLB/Paket A

- (1) Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan anak,
- (2) Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri,
- (3) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya,
- (4) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial, serta ekonomi di lingkungan sekitarnya,
- (5) Mencari dan menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, sistematis dan kreatif.

b) Pada tingkat SMP/MTs/SMPLB*/Paket B

- (1) Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan remaja,
- (2) Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri,
- (3) Menunjukkan sikap percaya diri,
- (4) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas,
- (5) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional,

- (6) Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif,
- (7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif.

c) Pada tingkat SMA/MA/SMALB*/Paket C

- (1) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja,
- (2) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya dengan belajar dari orang lain dan lingkungannya,
- (3) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya,
- (4) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial kemasyarakatan,
- (5) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global,
- (6) Mencari dan membangun serta menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, sistematis dan inovatif,
- (7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, sistematis dan inovatif dalam pembuatan/pengambilan keputusan,
- (8) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri dan orang lain,
- (9) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan/memberikan hasil yang terbaik,
- (10) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah yang kompleks,

- (11) Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam, sosial dan budaya,
- (12) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab,
- (13) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

d) Pada tingkat SMK/MAK

- (1) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja,
- (2) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya,
- (3) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya,
- (4) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial,
- (5) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global,
- (6) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, sistematis dan inovatif,
- (7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan,
- (8) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri,
- (9) Menunjukkan sikap kompetitif.

2) Kompetensi yang bersifat Subjektif pada Mata Pelajaran

Kompetensi yang bersifat subjektif pada mata pelajaran sebagai Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran

(SK-KMP) yang meliputi kelompok-kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

- a) Agama dan Akhlak Mulia,
- b) Kewarganegaraan dan Kepribadian,
- c) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
- d) Estetika,
- e) Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan.

SK-KMP dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni:

- a) Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia serta memiliki kemampuan olah raga, olah pikir dan olah rasa. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, IPTEK, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan,
- b) Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani,
- c) Kelompok mata pelajaran IPTEK bertujuan untuk mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis kritis, kreatif dan inovatif peserta didik. Pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa,

matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.

3) Standar pada tingkat kelas

Standar ini yang mengatur keterlaksanaannya kegiatan proses belajar mengajar (KBM). Standar pada tingkat kelas yaitu standar yang mengatur terjadinya interaksi pembelajaran di dalam kelas. Standar yang terjadi pada proses pembelajaran yaitu standar isi, standar penilaian dan standar proses. Standar ini menjadi inti SNP dalam mencapai SKL. Standar pada tingkat kelas ini yang bertanggung jawab untuk memenuhinya yaitu kepala sekolah.

4) Standar pada tingkat Sekolah

Standar pada tingkat sekolah ini yang mendukung terjadinya pelaksanaan proses belajar mengajar dengan efektif maka standar yang diperlukan untuk mendukung yaitu standar pendidik, standar sarpras, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Standar pada tingkat sekolah ini yang bertanggungjawab adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memenuhinya.

Dalam mencapai SNP maka perlu disusun kerangka prosedur penyusunan standar, sistem implementasi standar dan operasional standar sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a) Kerangka Prosedur Penyusunan Desain Standar

Dalam kerangka penyusunan standar tersebut di atas penyusunan standar dimulai pada penyusunan SKL yaitu

kompetensi apa yang akan dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran.

SKL akan di jabarkan pada standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar tersebut terjadi pada tingkat kelas.

Dalam mendukung pelaksanaan standar pada tingkat kelas supaya berjalan sesuai tujuan pada SKL maka perlu di persiapkan standar pendidik, standar pengelolaan, standar sarpras dan standar pembiayaan yang disiapkan pada tingkat sekolah.

b) Sistem Implementasi SNP

Dalam sistem implementasi SNP maka dalam pemenuhan standar berangkat dari pemenuhan standar pada tingkat sekolah yaitu standar PTK, standar pengelolaan, standar sarpras dan standar pembiayaan.

Pada tingkat kelas standar yang harus dipenuhi yaitu standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Pada tingkat kelas standar ini akan berpengaruh dalam pencapaian SKL.

Agar SKL akan tercapai secara efektif maka perlu pemenuhan standar pada tingkat sekolah dan standar pada tingkat kelas.

c) Sistem Pencapaian SNP

Konsep pencapaian SNP di atas, dapat diwujudkan dengan pembagian tanggung jawab sebagai berikut;

- (1) Standar *setting agency*, unit kerja yang bertanggungjawab untuk menyusun SNP yang

menjadi panduan dalam menjamin tercapainya pendidikan yang bermutu yaitu BSNP,

- (2) *Standar fulfillment agency*, unit kerja yang bertanggungjawab untuk memenuhi SNP yaitu satuan pendidikan dan pemerintah,
- (3) *Standar monitoring agency*, unit kerja yang bertanggungjawab untuk melakukan monitoring atau pemantauan ketercapaian SNP yaitu BAN-S/M.

BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. SNP pada jenjang SMA berdasarkan akreditasi 2017, terdapat tiga standar pendidikan yang capaiannya paling rendah yaitu, standar PTK (82,2), standar sarpras (82,9) dan SKL (86,5). Pada standar PTK, komponen yang rendah pada satuan pendidikan adalah pada persoalan tenaga kependidikan, administrasi, laboran dan pustakawan. Tenaga kependidikan ini berpengaruh terhadap perolehan akreditasi standar PTK yang rendah. Standar sarpras juga pada kategori rendah karena sebagian besar sekolah tidak memiliki sarana laboratorium dan perpustakaan yang sesuai standar sedangkan SKL masih tergolong memiliki capaian sedang karena setiap butir tidak ada yang jawaban D dan E lebih dari 10%. Artinya SKL sebagian sekolah memiliki rata-rata butir pertanyaan tidak menimbulkan masalah.
2. Dalam implementasi SNP berdasarkan data dan informasi dari kepala sekolah, pengawas sekolah dari Cabang Dinas Pendidikan Menengah dalam implementasi SNP masih mengalami beberapa kendala. Apabila diklasifikasikan kendala-kendala tersebut berada dalam kategori a) **Keterbacaan**, yaitu bahwa sebagian kepala sekolah dan guru masih belum semuanya memahami SNP dengan baik.

Kepala sekolah dan guru masih mengalami kesulitan dan terkendala dalam implementasinya karena merasakan standar yang ada masih dirasa rumit sehingga masih ada sebagian standar yang belum dipahami dengan benar oleh kepala sekolah dan guru, b) Keterlaksanaan, yaitu bahwa belum semua standar dapat dilaksanakan karena adanya kesulitan dalam pemenuhannya pada tingkat satuan pendidikan. Standar yang dirasakan sulit dipenuhi yaitu standar PTK, standar sarpras, dan standar pembiayaan. Sikap sekolah terhadap standar tersebut bersifat menerima saja sehingga pemenuhan standar tersebut bergantung kuota yang diberikan oleh pemerintah, c) Ketercapaian, masih belum semuanya standar bisa dicapai oleh sekolah meskipun yang berstatus negeri. Namun bagi sekolah swasta yang memiliki kategori mandiri dalam pembiayaan yang cukup SNP dapat dicapai dengan baik, hal ini karena sekolah swasta dengan pembiayaan mandiri dapat mendanai keperluan untuk mencapai standar tersebut.

3. Formulasi dan restrukturisasi SNP mengisyaratkan bahwa penyusunan standar dapat diklasifikasikan dalam struktur desain standar pada tingkat siswa sebagai SKP, artinya standar ini merupakan tujuan utama siswa setelah selesai melaksanakan pembelajaran dengan memiliki kompetensi yang diharapkan. Pada tingkat kelas yang harus di capai adalah standar isi, standar proses dan standar penilaian dan pada tingkat ini terjadi proses pembelajaran yang melibatkan tiga standar tersebut. Pada tingkat sekolah sebagai standar pendukung yaitu standar PTK, standar pengelolaan, standar sarpras dan standar pembiayaan, artinya sekolah dan pemerintah menyiapkan dan mendukung agar standar pada

tingkat kelas tercapai. Oleh karena itu sekolah mempunyai tugas untuk menjamin ketercukupan standar PTK, standar pengelolaan, standar sarpras dan standar pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran-saran dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Ketercapaian SNP pada tingkat satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan SNP. Berdasarkan temuan di lapangan diketahui bahwa kepala sekolah mengalami kesulitan terhadap pemenuhan standar PTK, standar sarpras, dan standar pembiayaan. Pada tiga standar tersebut satuan pendidikan atau pihak sekolah bersifat pasif karena hanya menerima saja sehingga sulit untuk memenuhi ketercapaian standar tersebut, kecuali pada sekolah swasta yang sudah berada pada tingkat mandiri, delapan SNP dapat dipenuhi. Oleh karena itu perlu dilakukan klasifikasi pembagian tanggung jawab pada tingkat satuan pendidikan dan pemerintah. Satuan pendidikan bertanggungjawab terhadap ketercapaian SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar pengelolaan. Sementara Penyelenggara Pendidikan (pemerintah, yayasan) bertanggungjawab dalam memenuhi standar PTK, standar sarpras dan standar pembiayaan.
2. Ketercapaian SNP juga bergantung pada tingkat kompleksitas muatan standar yang akan dicapai. Standar yang terlalu berat muatan isinya menjadi beban, sehingga tidak berfungsi sebagai standar sebagai panduan yang akan dipenuhi oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, perlu

peninjauan kembali untuk penyederhanaan muatan standar.

3. Berdasarkan implementasi SNP terkait dengan SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian bahwa untuk tenaga pendidik (guru) satuan pendidikan banyak mengalami kesulitan dan kendala dalam memenuhinya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tenaga pendidik masih belum memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian secara baik. Oleh karena itu, untuk mencapai efisiensi atau efektifitas dalam standar PTK harus dipisahkan antara Pendidik dan Kependidikan. Jadi, pendidik memiliki standar pendidik sendiri sedangkan tenaga kependidikan dimasukkan dalam standar pengelolaan. Ketercapaian Standar PTK selalu rendah karena satuan pendidikan kesulitan dalam memenuhi standar kependidikan seperti tenaga administrasi, tenaga laboran, dan tenaga pustakawan.

C. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan data dan informasi serta hasil pembahasan dapat disampaikan rekomendasi/opsi kebijakan terkait dengan implementasi dan restrukturisasi SNP ditujukan kepada pihak-pihak, sebagai berikut:

1. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Dalam menghasilkan SNP maka yang perlu dipertimbangkan oleh BSNP yaitu Kerangka Konsep Penyusunan Desain SNP. SNP sebagai panduan dalam mencapai mutu pendidikan maka perlu disusun menjadi sebuah *grand desain* mutu lulusan yang diharapkan atau

kompetensi lulusan yang menjadi tolok ukur yang akan dicapai. Hal ini sesuai dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, mutu pendidikan merupakan kunci utama dalam menyiapkan SDM yang kompetitif yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia dan merupakan hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Keunggulan SDM merupakan modal dasar pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan yang bermutu merupakan prasyarat utama untuk memperoleh keluaran lulusan yang berkualitas.

Dalam menyiapkan pendidikan yang bermutu tentunya diperlukan SNP yang dapat menjadi panduan setiap penyelenggara pendidikan pada pemerintah atau yayasan. Berdasarkan hasil diskusi dengan narasumber yang berasal dari akademisi dan praktisi pendidikan maka dalam penyusunan SNP dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur penyusunan standar yang terdiri dari tingkat-tingkat sebagaimana yang dideskripsikan pada bagian berikut.

a. Standar pada tingkat siswa

Standar pada tingkat siswa merupakan kompetensi siswa atau SKL yang ditentukan pada awal menyusun standar. Standar ini memberikan ukuran standar kelulusan setelah siswa melaksanakan proses pembelajaran. Terdapat tiga aspek kompetensi yang harus dicapai yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kompetensi tersebut dibedakan menjadi dua yaitu kompetensi generik atau bersifat umum dan kompetensi subjektif atau bersifat khusus yang terkait dengan mata pelajaran yang diselesaikan dalam proses belajar.

SKL sebagai standar yang harus ditentukan terlebih dahulu oleh setiap perubahan pada standar tersebut dan akan mempengaruhi standar-standar lainnya terutama mengenai standar isi, proses dan penilaian. Namun demikian, berdasarkan tuntutan perubahan kebutuhan yang berkaitan dengan hal tersebut pada kesempatan ini hanya ada perubahan berupa penambahan beberapa hal sebagai berikut;

1) Kompetensi yang bersifat generik pada satuan pendidikan

Adapun Standar Kompetensi bersifat generik pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:

a) Pada tingkat SD/MI/SDLB/Paket A

- (1) Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan anak,
- (2) Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri,
- (3) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya,
- (4) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial, ekonomi di lingkungan sekitarnya,
- (5) Mencari dan menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, sistematis dan kreatif.

b) Pada tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B

- (1) Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan remaja,

- (2) Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri,
- (3) Menunjukkan sikap percaya diri,
- (4) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas,
- (5) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional,
- (6) Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif,
- (7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif.

c) Pada tingkat SMA/MA/SMALB/Paket C

- (1) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja,
- (2) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya dengan belajar dari orang lain dan lingkungannya,
- (3) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya,
- (4) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial kemasyarakatan,
- (5) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global,

- (6) Mencari dan membangun serta menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, sistematis dan inovatif,
- (7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, sistematis dan inovatif dalam pembuatan/pengambilan keputusan,
- (8) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri dan orang lain,
- (9) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan/memberikan hasil yang terbaik,
- (10) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah yang kompleks,
- (11) Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam, sosial dan budaya,
- (12) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab,
- (13) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

d) Pada tingkat SMK/MAK

- (1) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja,
- (2) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya,
- (3) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya,
- (4) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial,

- (5) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global,
- (6) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, sistematis dan inovatif,
- (7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan,
- (8) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri,
- (9) Menunjukkan sikap kompetitif.

2) Kompetensi yang bersifat subjektif pada mata pelajaran

Kompetensi yang bersifat subjektif pada mata pelajaran sebagai SK-KMP meliputi kelompok-kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

- a) Agama dan Akhlak Mulia,
- b) Kewarganegaraan dan Kepribadian,
- c) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
- d) Estetika,
- e) Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan.

SK-KMP dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni:

- a) Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia serta memiliki kemampuan olah raga, olah pikir dan olah rasa. Tujuan

tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, IPTEK, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan,

b) Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani,

c) Kelompok mata pelajaran IPTEK bertujuan untuk mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis kritis, kreatif dan inovatif peserta didik. Pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.

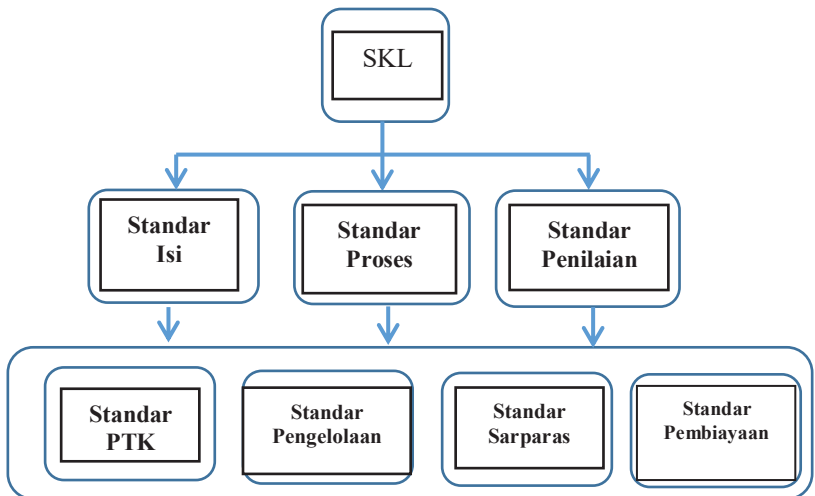
b. Standar pada tingkat kelas

Standar ini yang mengatur keterlaksanaannya kegiatan proses belajar mengajar (PBM). Standar pada tingkat kelas ini yaitu standar yang mengatur terjadinya interaksi pembelajaran di dalam kelas. Standar yang terjadi pada proses pembelajaran yaitu standar isi, standar penilaian dan standar proses. Standar ini menjadi inti SNP dalam mencapai SKL. Standar pada tingkat kelas ini yang bertanggung jawab untuk memenuhinya adalah kepala sekolah

c. Standar pada tingkat Sekolah

Standar pada tingkat sekolah ini mendukung terjadinya pelaksanaan proses belajar mengajar dengan efektif maka standar yang diperlukan untuk mendukung standar pendidik, standar sarpras, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Standar pada tingkat sekolah ini bertanggungjawab adalah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk memenuhinya.

Dalam mencapai SNP maka perlu disusun kerangka prosedur penyusunan standar, dimulai dari penyusunan SKL dan mengalir ke standar di bawahnya sebagaimana pada gambar di bawah ini:



Gambar 7. Kerangka Konsep Penyusunan Desain SNP

Dalam kerangka penyusunan standar tersebut di atas dimulai dari penyusunan SKL yaitu kompetensi apa yang akan dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran.

SKL akan dijabarkan pada standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar tersebut terjadi pada tingkat kelas.

Dalam mendukung pelaksanaan standar pada tingkat kelas supaya berjalan sesuai tujuan pada SKL maka perlu dipersiapkan standar pendidik, standar pengelolaan, standar sarpras dan standar pembiayaan.

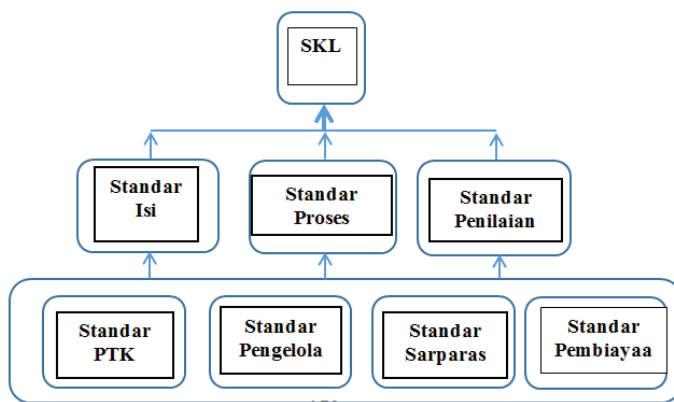
2. Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M)

Dalam implementasi SNP pada tingkat satuan pendidikan maka yang perlu diperhatikan adalah sistem pemenuhan implementasi SNP. Proses pemenuhan SNP perlu dibedakan pada tingkat sekolah, tingkat kelas, dan tingkat siswa. Dalam mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan maka pada tingkat satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah perlu mempersiapkan ketercukupan yaitu standar PTK, standar pengelolaan, standar sarpras, dan standar pembiayaan. Oleh karena itu, sekolah harus dapat mengidentifikasi ketercukupan (standar PTK, standar pengelolaan, standar sarpras, dan standar pembiayaan) supaya proses belajar di dalam kelas dapat berjalan dengan efektif.

Pada tingkat kelas untuk keterlaksanaannya standar menjadi tanggung jawab tenaga pendidik (guru). Guru sebelum menjalankan tugas sebagai pendidik di kelas harus memahami 4 (empat) standar yaitu SKL, standar isi, standar

proses dan standar penilaian. Oleh karena itu, guru harus memastikan dirinya sebagai tenaga profesional yang harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi dan kompetensi sosial. Kemampuan profesional tersebut memberikan jaminan tercapainya SKL yang dikuasai oleh siswa.

Penjelasan sistem atau alur pemenuhan SNP dimulai dari tahap bawah menuju ke atas, dimana untuk ketercapaian SKL dapat digambarkan bagan seperti di bawah;



Gambar 8. Sistem implementasi SNP

Berdasarkan sistem pemenuhan tersebut di atas, maka hasil Akreditasi dari BAN- S/M sebagai standar *monitoring agency* terhadap ketercapaian standar pada satuan pendidikan perlu dijadikan sebagai pedoman peningkatan mutu pada satuan pendidikan dan masuk dalam program kerja satuan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah. Oleh karena itu, rekomendasi hasil akreditasi yang dihasilkan oleh BAN-S/M perlu dipisahkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menerima rekomendasi ketercapaian standar PTK, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan SKL,
 - b. Satuan Pendidikan menerima rekomendasi ketercapaian standar isi, standar proses, standar penilaian dan SKL.
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam pemenuhan SNP perlu ada pembagian tugas dan kewajiban antara satuan pendidikan dan pemerintah. Pada sisi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan standar sarpras, standar pembiayaan dan standar pengelolaan. Dengan pembagian tugas tersebut satuan pendidikan dapat berkonsentrasi pada pencapaian standar proses pembelajaran yang terjadi di kelas yang dilaksanakan oleh guru. Hal ini akan mengurangi beban satuan pendidikan dalam pemenuhan SNP.

4. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Tenaga pendidik dan kependidikan bagi satuan pendidikan sangat penting dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tenaga pendidik merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai SKL. Dalam pemenuhan tenaga pendidik satuan pendidikan sangat bergantung dari pemerintah, oleh karena itu tanggung jawab dalam pemenuhan Standar PTK adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mutu pembelajaran pada satuan pendidikan sangat bergantung pada kualitas tenaga pendidik sehingga tanggung jawab Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sangat penting untuk dalam menentukan

kualitas pendidikan. Demikian halnya, ketercukupan dan kualitas tenaga laboran, pustakawan dan tenaga administrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah turut mendukung peningkatan kualitas tersebut.

5. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab terhadap kontrol ketercapaian standar pengelolaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Standar pengelolaan ini sangat penting karena dapat berfungsi sebagai kendali atas ketersediaan dan ketercukupan standar lainnya. Dengan perangkat ini Dinas Pendidikan dapat melakukan pembinaan manajemen penyelenggaraan satuan pendidikan supaya delapan SNP dapat efektif berfungsi dengan baik.

6. Satuan Pendidikan

Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, satuan pendidikan memiliki tanggung jawab atas ketercapaian standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Tiga standar tersebut dilaksanakan oleh guru dalam pengawasan dan koordinasi kepala sekolah. Dengan demikian satuan pendidikan memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan standar isi, standar proses, dan standar penilaian, oleh karena itu, satuan pendidikan tidak memiliki tanggung jawab atas seluruh standar dalam pemenuhan namun hanya di batasi pada pemenuhan standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'ti, 2017, Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja BAN S/M Tahun Periode 2012 s.d 2017, Jakarta BAN-S/M
- Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Hanik, Umi *Implementasi total Quality Management Dalam Meningkatkan pendidikan*, (Semarang: Rasail media Group, 2011)
- Kardidi, Ravik, Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Teknologi Belajar Jarak Jauh, Makalah Disampaikan dalam Seminar Regional Unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh –Universitas Terbuka, Solo: 28 Mei 2005.
- Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah


Permendiknas No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya

Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education*, terjemahan Ahmad Ali Riyadi dan

Fahrurrozi (Yogyakarta: IRCISOD, 2006), hlm. 73.

Usman, Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



Laporan hasil penelitian dengan judul Evaluasi Implementasi dan Restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan disusun dalam rangka menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan dalam mengenai capaian akreditasi, implementasi setiap SNP dan memformulasikan restrukturisasi SNP. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa masih terdapat standar yang memiliki capaian rendah pada SNP jenjang SMA, masih terdapat kendala dalam implementasi SNP dan perlunya penyusunan standar yang diklasifikasikan dalam struktur desain standar pada siswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan opsi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan dan restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan bagi stakeholder terkait.

